

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
DI SMK MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Teknik
Universitas Negeri Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh
M. Alfian Alfarisi
NIM. 05504244041

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF
JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2012**

Persetujuan

Skripsi yang berjudul "Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta" yang disusun oleh M. Alfian Alfarisi, NIM. 03504244041 ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan.



Yogyakarta, 25 Juni 2012
Dosen Pembimbing

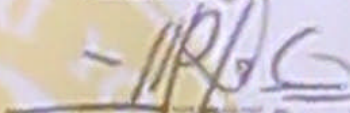
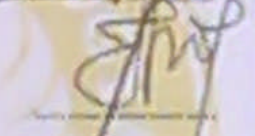
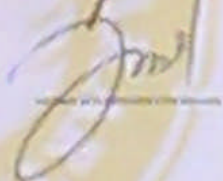
Ku. Haryono, M.Pd.

NIP. 19601228 198601 1 001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta" yang disusun oleh M. Alfian Alfurid, NIM. 05504244041 ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 29 Juni 2012 dan dinyatakan lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Kir Haryana, M. Pd.	Ketua Penguji		17/7 2012
Moch. Solikin, M. Kes.	Sekretaris Penguji		17/7 2012
Bambang Sulistyio, M. Eng	Penguji Utama		17/7 2012

Yogyakarta, Juli 2012
Fakultas Teknik



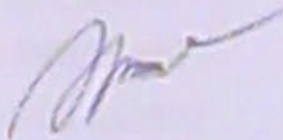
Dr. Moch. Usni Triyono, M.Pd.
NIP. 19560216 198603 1 0031

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Tanda tangan dosen penguji yang tertera dalam halaman pengesahan adalah asli. Jika tidak asli, saya siap menerima sanksi ditunda yudisium pada periode berikutnya.

Yogyakarta, Juni 2012
Yang menyatakan,



M. Alfian Alfarisi
NIM. 05504244041

MOTTO

"JIKA KITA BISA MENJADI YANG TERBAIK, MENGAPA TIDAK!"

(IF WE CAN BE THE BEST, WHY NOT!)

Karya sederhana ini dipersembahkan untuk :

IBUNDA ISTIQOMAH

AYAHANDA M. TAUFIQ

ADINDA FANI SAHARANI

ADINDA RIZQI NUR ZAMMI

ADINDA M. SALMAN BAIHAQI

IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SMK MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA

Oleh
M. Alfian Alfarisi
05504244041

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang ditunjukkan dengan prinsip-prinsip MBS meliputi kemandirian, kerjasama/kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas sekolah.

Penelitian ini adalah penelitian non-eksperimental kuantitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Subyek penelitian adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru, kepala TU, bendahara, dan komite sekolah. Pengumpulan data menggunakan multi-metode yaitu angket, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data angket diperoleh dari 98 responden dengan menggunakan statistik deskriptif. Analisis data wawancara melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dokumen dalam bentuk studi dokumen untuk melengkapi atau mendukung data angket dan wawancara. Uji validitas instrumen dilakukan melalui penilaian para ahli (*Experts Judgement*).

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi manajemen berbasis sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta pada kategori baik yang ditunjukkan dengan; (1) kemandirian sekolah sudah berjalan baik, yaitu program sekolah dikembangkan atas inisiatif warga sekolah sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan sekolah serta terdapat usaha dan kegiatan sekolah dalam penggalan dana dengan memanfaatkan potensi sumber daya sekolah dengan mendirikan unit produksi dan jasa sekolah; (2) kerjasama sekolah yaitu kerjasama antar warga sekolah dan dengan pihak luar sekolah terjalin dengan baik, sekolah memiliki perjanjian kerjasama (MoU) dengan 7 (tujuh) Du/Di dari tahun 2006-2014; (3) bentuk partisipasi *stakeholders* (pemerintah, masyarakat, dan warga sekolah) yaitu berupa dukungan dana, dukungan material/fasilitas, dukungan pemikiran, dan dukungan tenaga pada kategori baik; (4) keterbukaan sekolah sudah berjalan dengan baik, yaitu program dan keuangan sekolah dirumuskan bersama dengan melibatkan warga sekolah dan komite sekolah. Sekolah membuat media/wadah komunikasi dan informasi terhadap program dan keuangan sekolah dalam bentuk komunikasi langsung, papan pengumuman, website sekolah, maupun laporan kegiatan; dan (5) akuntabilitas sekolah sudah berjalan dengan baik karena sekolah telah memberikan pertanggungjawaban proses dan hasil pelaksanaan program maupun keuangan sekolah kepada warga sekolah, komite sekolah, yayasan, dan pemerintah. Sekolah membentuk mekanisme pertanggungjawaban melalui pelaporan yang disampaikan dalam pertemuan rapat dengan warga sekolah, komite sekolah, yayasan, dan pemerintah.

Kata kunci: Implementasi, Manajemen Berbasis Sekolah, SMK Muhammadiyah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan. Penulis menyadari bahwa selama dalam penyusunan skripsi ini tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala dukungan, bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis. Ucapan terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd. M.A. selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Moch. Bruri Triyono, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Bapak Martubi, M.Pd., M.T. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Bapak Budi Tri Siswanto, M.Pd. selaku penasihat akademik yang telah memberikan pengarahan selama studi.
5. Bapak Kir Haryana, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan dengan baik selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. `

7. Bapak Drs. Sutrisno, M.M., selaku Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang telah memberikan ijin penelitian.
8. Guru dan karyawan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang telah membantu dalam pengambilan data penelitian ini.
9. Ibu dan Abah yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi selama masa studi dan penulisan skripsi.
10. Keluarga tercinta yang selalu berdo'a untuk kelancaran penulisan skripsi.
11. Teman-teman mahasiswa Pendidikan Teknik Otomotif angkatan 2005 yang senantiasa saling memberi dukungan dan nasihat selama masa studi.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Dalam penulisan laporan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan penulis yang masih perlu belajar cara penulisan karya ilmiah yang baik.

Yogyakarta, Juni 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	14
D. Rumusan Masalah	15
E. Tujuan Penelitian	15
F. Manfaat Penelitian	16
BAB II. KAJIAN TEORI	
A. Deskripsi Teori.....	17
1. Manajemen Pendidikan.....	17
2. Manajemen Sekolah	18
3. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).....	19
4. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah.....	32

B. Penelitian yang Relevan.....	58
C. Kerangka Pikir	61
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	67
B. Subjek Penelitian.....	67
C. Lokasi Penelitian.....	69
D. Teknik Pengumpulan Data.....	69
E. Instrumen Penelitian.....	70
F. Teknik Analisis Data.....	75
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian	80
1. Deskripsi Data Kemandirian Sekolah	82
2. Deskripsi Data Kerjasama Sekolah.....	99
3. Deskripsi Data Bentuk Partisipasi.....	105
4. Deskripsi Data Keterbukaan Sekolah.....	113
5. Deskripsi Data Akuntabilitas Sekolah	117
B. Pembahasan.....	123
1. Pembahasan Kemandirian Sekolah	123
2. Pembahasan Kerjasama Sekolah.....	135
3. Pembahasan Bentuk Partisipasi	140
4. Pembahasan Keterbukaan Sekolah	144
5. Pembahasan Akuntabilitas Sekolah	147
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	150
B. Keterbatasan Penelitian.....	152
C. Saran.....	152
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pengelolaan Sekolah Dalam Pemenuhan SNP Melalui MBS.....	28
2. Subjek Penelitian.....	68
3. Kisi-Kisi Instrumen Angket	72
4. Kisi-Kisi Instrumen Wawancara	72
5. Kisi-Kisi Instrumen Dokumentasi.....	73
6. Jumlah Skor Implementasi Manajemen Berbasis Sekolahh	80
7. Kategori Penilaian Jumlah Skor Implementasi MBS.....	81
8. Kategori Skor Kewenangan Sekolah dalam Pengembangan Kurikulum dan Program Pembelajaran	83
9. Kategori Skor Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	87
10. Pendidik (Guru) SMK Muhammdiyah 3 Yogyakarta.....	89
11. Tenaga Kependidikan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta	90
12. Kategori Skor Pemenuhan Sarana Prasarana Sekolah	92
13. Pemenuhan Ruang Pembelajaran Umum.....	93
14. Pemenuhan Ruang Khusus (Praktek).....	94
15. Pemenuhan Ruang Penunjang Sekolah.....	95
16. Kategori Skor Pemenuhan Pembiayaan/Dana Sekolah.....	96
17. Sumber Dana Sekolah	97
18. Kategori Skor Kemandirian Sekolah	98
19. Kategori Skor Kerjasama Internal Sekolah.....	100
20. Kategori Skor Kerjasama Eksternal	101
21. Daftar Kerjasama dengan Dunia Usaha/Industri.....	104
22. Kategori Skor Kerjasama Sekolah	104
23. Kategori Skor Dukungan Dana	106
24. Dukungan Dana <i>Stakeholders</i>	107
25. Kategori Skor Dukungan Material/Fasilitas.....	108
26. Kategori Skor Dukungan Pemikiran	109

27. Kategori Skor Dukungan Tenaga.....	111
28. Kategori Skor Bentuk Partisipasi <i>Stakeholders</i>	112
29. Kategori Skor Keterlibatan Warga Sekolah dan Komite Sekolah	113
30. Kategori Skor Kemudahan Mengakses Informasi	115
31. Kategori Skor Keterbukaan Sekolah.....	117
32. Kategori Skor Pelaporan Program dan Keuangan Sekolah	117
33. Kategori Skor Pertemuan	119
34. Kategori Skor Kepuasan Warga Sekolah dan Komite Sekolah	121
35. Kategori Skor Akuntabilitas Sekolah.....	122
36. Dukungan Dana <i>Stakeholders</i> Pada Tahun Ajaran 2009/2010.....	141

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir Penelitian	65
2. Diagram Pie Kewenangan Sekolah dalam Pengembangan Kurikulum dan Program Pembelajaran	83
3. Diagram Pie Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	87
4. Diagram Pie Pemenuhan Sarana Prasarana Sekolah.....	92
5. Diagram Pie Pemenuhan Pembiayaan/Dana Sekolah	96
6. Diagram Pie Kemandirian Sekolah.....	99
7. Diagram Pie Kerjasama Internal Sekolah	100
8. Diagram Pie Kerjasama Eksternal Sekolah.....	101
9. Diagram Pie kerjasama Sekolah	105
10. Diagram Pie Dukungan Dana.....	106
11. Diagram Pie Dukungan Material/Fasilitas	108
12. Diagram Pie Dukungan Pemikiran.....	109
13. Diagram Pie Dukungan Tenaga	111
14. Diagram Pie Bentuk Partisipasi <i>Stakeholders</i>	112
15. Diagram Pie Keterlibatan Warga Sekolah dan Komite Sekolah.....	114
16. Diagram Pie Kemudahan Mengakses Informasi.....	117
17. Diagram Pie Keterbukaan Sekolah	117
18. Diagram Pie Pelaporan Program dan Keuangan Sekolah	119
19. Diagram Pie Pertemuan.....	120
20. Diagram Pie Kepuasan Warga Sekolah dan Komite Sekolah.....	121
21. Diagram Pie Akuntabilitas Sekolah	123

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kartu Bimbingan Skripsi	159
2. Surat Ijin Penelitian.....	162
3. Surat Keterangan Validasi.....	171
4. Instrumen Penelitian.....	175
5. Data Hasil Angket	196
6. Data Hasil Wawancara.....	206
7. Data Hasil Dokumentasi	219

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pendidikan nasional Indonesia dimaksudkan untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, serta efisiensi manajemen pendidikan dalam menghadapi tuntutan globalisasi. Era globalisasi yang sedang terjadi saat ini dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks dan persaingan sumber daya manusia yang semakin ketat, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu upaya pemerintah untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul tersebut adalah melalui pendidikan.

Terlepas dari harapan tersebut di atas, Indonesia sebenarnya menghadapi masalah mendasar yaitu mutu pendidikan yang cenderung masih rendah. Hal ini disebabkan oleh sistem pendidikan di Indonesia yang buruk. Dari hasil survei *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang dimuat di Kompas pada tanggal 5 September 2001 (Yuliana, 2007), disebutkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia terburuk di kawasan Asia, yaitu dari 12 negara yang disurvei Indonesia menduduki urutan ke-12.

Menurut Depdiknas (2001: 1-2), rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain disebabkan oleh sistem pendidikan yang sentralistik (terpusat) dan partisipasi masyarakat khususnya orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah selama ini sangat minim. Kebijakan

penyelenggaraan yang bersifat sentralistik (terpusat) dimana hampir semua hal diatur secara rinci dari pusat telah menyebabkan sekolah kehilangan kemandirian, kreativitas dan inisiatif untuk mengambil kebijakan yang diperlukan tanpa adanya petunjuk dari birokrasi pendidikan di atasnya. Partitipasi masyarakat (*stakeholders*) selama ini lebih berupa dukungan dana, kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas, sehingga sekolah tidak memiliki beban untuk mempertanggungjawabkan proses dan hasil pendidikan kepada masyarakat (*stakeholders*).

Menghadapi rendahnya mutu pendidikan tersebut, maka perlu dilakukan upaya perbaikan terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Upaya pemerintah dalam menyikapi hal tersebut adalah dengan melakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan yaitu dari manajemen pendidikan mutu berbasis pusat menuju manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau manajemen berbasis sekolah (Depdiknas, 2001: 3). Perubahan sistem penyelenggaraan pendidikan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan pendidikan yang ada.

Mulyasa (2003: 11) menyampaikan bahwa melalui manajemen berbasis sekolah pemerintah memberikan otonomi luas kepada sekolah dengan mengikutsertakan masyarakat untuk mengelola sumber daya sekolah dan mengalokasikannya sesuai dengan kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar masyarakat lebih memahami, membantu, dan mengontrol penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sekolah bersama masyarakat diberi

kewenangan untuk mengelola sumber daya sekolah dan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas, kebutuhan, dan potensi setempat, serta mempertanggungjawabkannya baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Manajemen berbasis sekolah yang ditandai dengan otonomi sekolah serta pelibatan masyarakat merupakan respon pemerintah terhadap gejala-gejala ketidakpuasan yang muncul dari masyarakat terhadap kinerja sekolah dan rendahnya mutu pendidikan.

Dijelaskan lebih lanjut, manajemen berbasis sekolah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mutu, pemerataan, dan relevansi. Peningkatan efisiensi antara lain diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Sementara peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, berlakunya sistem insentif dan disinsentif. Peningkatan pemerataan antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi pada kelompok tertentu terutama masyarakat tidak mampu. Sedangkan peningkatan relevansi antara lain dapat dilakukan melalui fleksibilitas dan keleluasaan sekolah untuk melakukan pengembangan kurikulum sekolah sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan melakukan penataan jurusan atau program keahlian.

Implementasi manajemen berbasis sekolah ditegaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51, ayat (1), “pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal

dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah”. Kemudian dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 49, ayat (1), “pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Dengan implementasi manajemen berbasis sekolah diharapkan tumbuh kemandirian sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah, peningkatan kerjasama atau kemitraan sekolah, peningkatan partisipasi warga sekolah dan masyarakat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah.

Kendatipun MBS telah diterapkan di sekolah, namun secara realita di lapangan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Penerapan konsep MBS di Indonesia masih menghadapi permasalahan yang cukup kompleks, terkait dengan kesiapan sumber daya pendidikan. Berdasarkan hasil kajian lapangan ditemukan berbagai permasalahan dalam implementasi MBS di sekolah, diantaranya yaitu: (1) belum dipahaminya konsep MBS secara utuh dan benar oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*); (2) resistensi terhadap perubahan karena kepentingan, ketidakmampuan secara teknis dan manajerial, atau tertambat pada tradisi dan kelaziman yang telah mengkristal dalam tubuh sekolah dan dinas pendidikan; (3) kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip MBS (kemandirian, kerjasama, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas); (4) belum optimalnya partisipasi pemangku kepentingan sekolah, dan (5) belum optimalnya *teamwork* yang kompak dalam menerapkan MBS (Depdiknas, 2009: 31-32).

SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta merupakan SMK kelompok teknologi dan rekayasa yang memperoleh hasil penilaian dengan kategori amat baik (terakreditasi A). SMK Muhammadiyah 3 juga merupakan sekolah RSBI sejak tahun 2007 sampai sekarang. Kemudian di bidang manajemen, sekolah ini telah memperoleh sertifikat manajemen mutu ISO 9001:2008. Keberhasilan meraih predikat terakreditasi A, RSBI, dan ISO 9001:2008 merupakan prestasi besar bagi SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta.

Dari uraian di atas nampak bahwa di satu sisi implementasi MBS di sekolah diduga belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, tetapi pada saat yang sama SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta menunjukkan prestasi yang membanggakan. Mencermati lebih dalam bagaimana implementasi MBS pada sekolah tersebut dirasa sangat perlu, karena dengan pencapaian yang dimiliki diharapkan memberikan indikasi awal bahwa sekolah telah mampu mengimplementasikan MBS dengan baik. Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi MBS di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta.

B. Identifikasi Masalah

Implementasi MBS di sekolah dalam kenyatannya masih menemui banyak permasalahan. Kemungkinan adanya masalah dalam implementasi MBS disebabkan oleh kondisi dan karakteristik masing-masing sekolah yang berbeda. Berikut pemaparan permasalahan implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) yang terjadi selama ini.

1. Konsep MBS belum dipahami oleh para pemangku kepentingan

Manajemen berbasis sekolah merupakan model manajemen pendidikan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwesannya kepada sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (Depdiknas, 2009: 10). Manajemen berbasis sekolah menganut prinsip kemandirian, kerjasama, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Namun, berdasarkan hasil kajian Depdiknas (2009: 36) masih terdapat sebagian sekolah yang jauh dari prinsip-prinsip MBS dalam mengelola sekolah. Hal ini berdampak timbul ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan. Kondisi yang demikian disebabkan oleh pelaku pendidikan yang belum bisa memahami makna MBS dengan benar.

Berdasarkan hasil penelitian MCW (2006: 31) di kota Malang didapati fakta bahwa kurangnya pemahaman kepala sekolah dan guru untuk terlibat dalam pengembangan MBS disebabkan karena mereka sudah terbiasa dan terpolakan dengan model manajemen lama yang begitu sentralistik, walaupun mereka sudah mendapatkan petunjuk mengenai implementasi MBS secara teknis. Selain itu guru juga kurang memahami bagaimana melakukan sinergi antara MBS dengan proses mengajar di kelas. Penerapan MBS dipahami oleh kepala sekolah hanya sebatas membentuk Komite Sekolah sebagai pengganti BP3 dan dijadikan alat

untuk melegitimasi mengambil keputusan untuk menaikkan SPP dan iuran lainnya. Demikian pula dengan perencanaan anggaran sekolah yang pembuatannya masih dimonopoli oleh kepala sekolah.

Pemahaman kepala sekolah, guru, maupun masyarakat yang sangat minim menyebabkan konsep MBS sangat sulit diterapkan di sekolah. Penerapan konsep MBS tidak dapat berjalan dengan demokratis apabila kepala sekolah masih mempertahankan dominasinya dalam pengelolaan sekolah tanpa mendengarkan aspirasi warga sekolah lainnya dan masyarakat. Padahal kesuksesan implementasi MBS terletak pada pemahaman para pemangku kepentingan sekolah (kepala sekolah, guru, maupun masyarakat).

2. Kemandirian Sekolah

Dalam implementasi MBS sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kewenangan tersebut merupakan otonomi sekolah untuk mengelola (merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi/mengevaluasi) program sekolah, tanpa harus menunggu atau dibatasi petunjuk dari birokrasi pendidikan di atasnya. Pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah akan memberikan akan memberikan fleksibilitas dalam mengelola sumber dayanya secara optimal.

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang berlangsung secara sentralistik telah menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan

sangat tergantung pada keputusan birokrasi di atasnya. Kebiasaan sekolah yang telah sangat tergantung pada birokrasi di atasnya akan menghambat kemandirian sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul (2003) menyatakan bahwa implementasi MBS pada tingkat SMK dan SMA masih banyak sekolah yang menunggu petunjuk dan arahan dari atas, belum menunjukkan kemandirian untuk melakukan perubahan dalam rangka peningkatan mutu sekolah dan lulusannya (Tamsir, 2010: 11). Sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan yang terbaik bagi sekolahnya, sehingga dituntut untuk memiliki kemampuan dan kesanggupan kerja yang tidak selalu menggantungkan pada atasan. Untuk menjadi mandiri, sekolah harus memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugasnya.

Hal terpenting agar kemandirian sekolah dapat dicapai adalah apabila para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Menurut Nurkolis (2003: 269), di Indonesia kemandirian sekolah belum dimiliki karena banyak guru dan kepala sekolah yang belum memenuhi syarat untuk menjalankan pekerjaannya. Bahkan banyak guru yang tidak memenuhi standar minimal untuk menjalankan tugasnya sehari-hari atau belum layak mengajar.

3. Kerjasama/Kemitraan Sekolah

Kemitraan adalah bentuk kerjasama antara sekolah dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Depdiknas, 2009: 42). Esensi kemitraan pada dasarnya untuk meningkatkan kepedulian maupun

kepemilikan dari para pemangku kepentingan. Bentuk kerjasama sekolah dengan para *stakeholder* (pemangku kepentingan sekolah) disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah serta kondisi dan kebutuhan para *stakeholder* yang menjadi mitranya. Kerjasama sekolah yang baik ditunjukkan oleh hubungan antar warga sekolah yang erat, hubungan sekolah dan masyarakat erat, serta adanya kesadaran bersama bahwa *output* program sekolah merupakan hasil bersama (*team work*) (Depdiknas, 2009: 63).

Kebersamaan (*team work*) merupakan salah satu prinsip yang dituntut oleh manajemen berbasis sekolah, karena *out put* pendidikan merupakan hasil kolektif warga sekolah, bukan hasil individual. Karena itu, budaya kerjasama antar fungsi dalam sekolah, antar individu dalam sekolah, harus merupakan kebiasaan antar individu dalam sekolah. Belum optimalnya kerjasama (*team work*) yang kompak di sekolah akan menghambat kegiatan sekolah dalam upaya meningkatkan mutunya.

Dalam Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan mengenai peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah disebutkan bahwa setiap sekolah/madrasah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan. Kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah seperti masyarakat, dunia usaha/industri, dan lain sebagainya. Sistem kemitraan sekolah dapat ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis.

Hubungan kerjasama yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat dapat tercermin dalam kemauan masyarakat untuk bergabung dalam wadah komite sekolah. Komite sekolah merupakan mitra sekolah yang diharapkan mampu mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam memajukan pendidikan di sekolah. Namun demikian, tidak semua masyarakat peduli terhadap proses pendidikan di sekolah. Berdasarkan hasil penelitian Suparlan (2007) ditemukan bahwa penerapan MBS dalam prinsip kerjasama/kemitraan sekolah dengan masyarakat mengalami masalah, khususnya di daerah pedesaan, yaitu banyak orang tua dan masyarakat yang tidak mau terlibat dalam kegiatan komite sekolah. Hal ini dikarenakan budaya masyarakat yang hanya menyerahkan bilat-bulat urusan pendidikan kepada pihak sekolah.

Selain itu, kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha/industri juga mengalami masalah. Hasil penelitian Suwati (2010: iii) menemukan hambatan dalam kegiatan pendidikan sistem ganda yang meliputi: terbatasnya jumlah tempat praktek yang menerima siswa praktek, kurangnya kesadaran tempat praktek untuk pendidikan sistem ganda, kurang kesesuaian jenis pekerjaan dengan program belajar yang ditempuh anak didik. Semua kondisi ini bisa juga terjadi pada tempat lain, sehingga dibutuhkan kerja keras dari para pemangku kepentingan agar kerjasama antara sekolah dengan para pemangku kepentingan dapat terjalin dengan baik.

4. Partisipasi *stakeholders* (pemangku kepentingan)

Partisipasi adalah proses dimana *stakeholders* (warga sekolah dan masyarakat) terlibat aktif baik secara individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung, dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengevaluasian pendidikan di sekolah (Depdiknas, 2009: 43). Partisipasi merupakan kondisi terciptanya lingkungan yang terbuka di sekolah, dimana warga sekolah (guru, karyawan, siswa) dan masyarakat (orang tua siswa, dunia usaha/industri, dan lainnya) didorong untuk memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Partisipasi pada dasarnya untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, dan dukungan dari warga sekolah maupun masyarakat berupa dukungan dana, pemikiran, tenaga, dan material/fasilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Balitbang Diknas, dikutip dari Nurkolis (2006: 124) menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian guru, tingkat partisipasi orang tua siswa dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah rendah, yaitu rata-rata 57,1%. Selain itu, hasil penelitian Rohmat (2007: iii) mengungkapkan bahwa kepedulian masyarakat untuk berperan serta sangat rendah, disebabkan masyarakat tidak mengetahui bentuk-bentuk dan cara berpartisipasi dalam bidang pendidikan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih rendahnya partisipasi *stakeholders* dalam penyelenggaraan pendidikan di

sekolah dikarenakan mereka kurang peduli terhadap proses pendidikan di sekolah dan tidak mengetahui bentuk serta cara berpartisipasi di sekolah.

5. Keterbukaan Sekolah

Keterbukaan dalam pengelolaan sekolah dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara transparan. Transparansi sangat diperlukan untuk membangun keyakinan dan kepercayaan *stakeholders* terhadap sekolah. Transparansi ini ditunjukkan dengan keterlibatan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan, serta penggunaan uang sebagai alat kontrol. Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara sekolah dan publik melalui penyediaan informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat.

Salah satu masalah yang krusial terkait dengan keterbukaan sekolah yaitu penggunaan dana sekolah yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS). Dalam penentuan APBS, terutama penarikan dana dari orang tua siswa melibatkan banyak pihak, terutama dari orang tua siswa dan komite sekolah. Akan tetapi, kenyataan di lapangan tidaklah demikian, karena masih ada kepala sekolah yang sangat mendominasi dalam penentuan APBS.

Berdasarkan hasil penelitian ICW (Ade Irawan dkk, 2004: 102), dikatakan bahwa dalam penentuan APBS dari pembuatan hingga pelaksanaan, kepala sekolah sangat mendominasi, sehingga yang terjadi di lapangan adalah penetapan APBS tidak terbuka dengan melibatkan orang

tua siswa. Dikatakan lebih lanjut, sekolah tidak pernah mengumumkan berapa besar subsidi yang diterima sekolah dari pemerintah dan dialokasikan untuk apa saja.

Dari uraian di atas menunjukkan keterbukaan sekolah belum terlaksana dengan baik, yaitu program dan dana sekolah dikelola secara transparan. Sekolah seharusnya terbuka kepada warga sekolah dan masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana jalannya program sekolah dan kondisi dana sekolah. Dengan adanya keterbukaan tersebut, maka akan meningkatkan kepercayaan antar warga sekolah maupun masyarakat terhadap sekolah.

6. Akuntabilitas Sekolah

Akuntabilitas sekolah adalah pertanggungjawaban sekolah kepada warga sekolahnya, masyarakat, dan pemerintah melalui pelaporan dan pertemuan yang dilakukan secara terbuka (Depdiknas, 2009: 45). Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan sekolah terhadap keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas ini berbentuk laporan prestasi yang dicapai dan dilaporkan kepada pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat.

Fakta di lapangan menunjukkan akuntabilitas sekolah belum terlaksana dengan baik. Menurut hasil penelitian ICW (Ade Irawan, dkk., 2004: 119), menyebutkan bahwa di SMU 1 Cimahi, sekolah membebankan kepada orang tua siswa untuk kegiatan Palang Merah Remaja (PMR) total sebanyak Rp 4,2 juta. Namun, di sekolah tersebut

tidak ada kegiatan PMR sehingga dana yang sudah dipungut dari orang tua siswa tidak jelas kemana larinya dan tidak dipertanggungjawabkan. Sedangkan di SMU 5 Cimahi, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 13,8 juta untuk penyelenggaraan rapat sebanyak 30 kali dalam satu tahun. Akan tetapi, kenyataannya rapat hanya dilakukan antara 5–6 kali, sedangkan dana rapat yang sudah dianggarkan tidak jelas dipakai untuk apa.

Hasil penelitian di atas menunjukkan akuntabilitas sekolah yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan belum sesuai harapan. Masih ada sekolah yang memungut dana untuk program sekolah dari orang tua siswa namun tidak dipertanggungjawabkan bagaimana pelaksanaan dan hasilnya kepada yang memberi dana tersebut. Seharusnya sekolah memberi keterangan kepada orang tua siswa baik melalui pelaporan maupun pertemuan terkait pengelolaan program dan dana sekolah yang telah dipakai dan bagaimana hasil pelaksanaan program tersebut.

C. Pembatasan Masalah

Permasalahan yang dikemukakan pada identifikasi masalah tidak dapat dibahas secara keseluruhan dalam penelitian ini, karena berbagai faktor dan keterbatasan yang dimiliki peneliti. Pembahasan pada penelitian ini difokuskan pada penerapan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah yang meliputi kemandirian, kerjasama, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas sekolah. Hal ini dikarenakan masih banyak sekolah yang mengalami masalah dalam penerapan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah tersebut.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kemandirian sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta?
2. Bagaimana kerjasama sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta?
3. Apa saja bentuk partisipasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta?
4. Bagaimana keterbukaan sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta?
5. Bagaimana akuntabilitas sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui kemandirian sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta.
2. Mengetahui kerjasama sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta.
3. Mengetahui bentuk partisipasi *stakeholder* di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta.
4. Mengetahui keterbukaan sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta.
5. Mengetahui akuntabilitas sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis

Memberikan sumbangan informasi atau referensi bagi perkembangan khazanah keilmuan khususnya bidang pendidikan terkait dengan implementasi manajemen berbasis sekolah.

2. Secara praktis

Sebagai masukan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan secara luas dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Adapun implementasi manajemen berbasis sekolah yang belum sejalan dengan prinsip-prinsip MBS dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak yayasan Muhammadiyah maupun Dinas Pendidikan.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Manajemen Pendidikan

Istilah manajemen berasal dari kata kerja dalam bahasa Inggris *manage* yang dalam bahasa Indonesia berarti mengelola. Dari pengertian ini manajemen dapat dipahami sebagai pengelolaan. Apabila pengertian tersebut diterapkan dalam pendidikan, maka pengertiannya menjadi mengelola pendidikan. Sejalan dengan pengertian ini, Mulyasa (2003: 20) mengartikan manajemen sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses untuk mencapai tujuan yang ditetapkan baik tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Manajemen dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008), diartikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sementara itu, para pakar administrasi pendidikan seperti sergioivanni, Coombs, dan Thurson mendefinisikan manajemen sebagai “*process of working with and trough others to accomplish organizational goals efficiently*” (Ibrahim Bafadal 2003: 39). Pengertian manajemen ini dapat dimaknai sebagai proses kerja dengan dan melalui (mendayagunakan) orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Kehadiran manajemen dalam organisasi adalah untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Kegiatan proses pencapaian tujuan tersebut yaitu berupa tindakan-

tindakan yang mengacu kepada fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen ini menurut G.R. Terry, yang dikutip dari Engkoswara (2010: 86) sebagai suatu proses yang terdiri dari tindakan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) yang dilaksanakan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa dalam proses pencapaian tujuan dimulai dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dikerjakan dengan mengerahkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Dari berbagai definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan merupakan suatu proses pengelolaan pendidikan melalui kerjasama sekelompok orang dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang berupaya untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam pencapaian tujuan pendidikan tersebut diperlukan fungsi-fungsi manajemen pendidikan yang meliputi tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan proses pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang ditetapkan dapat tercapai.

2. Manajemen Sekolah

Manajemen sekolah pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama dengan manajemen pendidikan. Namun, manajemen pendidikan mempunyai jangkauan yang lebih luas daripada manajemen sekolah.

Menurut Rohiat (2009: 14), manajemen sekolah adalah melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sekolah. Hal ini berarti manajemen sekolah sebagai pengelolaan sekolah yang dilakukan dengan dan melalui sumber daya yang dimiliki sekolah untuk mencapai tujuan sekolah.

Manajemen pendidikan umumnya dan manajemen sekolah khususnya merupakan pengelolaan institusi (sekolah) yang dilakukan dengan dan melalui pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Dua hal yang merupakan inti manajemen sekolah yaitu fungsi manajemen dan aspek urusan sekolah. Dalam PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) disebutkan bahwa standar pengelolaan berkaitan dengan fungsi manajemen sekolah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan atau sekolah agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan aspek manajemen sekolah meliputi kurikulum, PBM, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, hubungan masyarakat, dan lainnya.

3. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

a. Pengertian manajemen berbasis sekolah

Secara leksikal, manajemen berbasis sekolah berasal dari tiga kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Berbasis berasal dari kata dasar basis yang berarti dasar atau

basis. Sekolah adalah lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberikan pelajaran (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). Berdasarkan makna leksikal tersebut, maka manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berasaskan pada sekolah itu sendiri.

Definisi yang mencakup makna lebih luas dikemukakan oleh Wohlstetter dan Mohram (1996) yang dikutip dari Nurkolis (2006: 2). Secara luas manajemen berbasis sekolah berarti pendekatan politis untuk mendesain ulang organisasi sekolah dengan memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada partisipan sekolah pada tingkat lokal guna memajukan sekolahnya. Manajemen berbasis sekolah dalam pengertian yang sama dikemukakan oleh Myers dan Stonehill, dikutip dari Umaedi (2008: 4.3) adalah strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui pengalihan otoritas pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke daerah dan ke masing-masing sekolah sehingga kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap proses pendidikan.

Selain itu, Depdiknas (2009: 10) mengartikan manajemen berbasis sekolah sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwesannya kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, pengusaha, dan sebagainya) untuk meningkatkan mutu

sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundangan yang berlaku. Dengan otonomi tersebut, sekolah diberikan kewenangan dan tanggungjawab untuk mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan tuntutan sekolah serta masyarakat atau **stakeholder** yang ada. Baik peningkatan otonomi sekolah, fleksibilitas pengelolaan sumber daya sekolah maupun partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah, kesemuanya itu ditujukan untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan peraturan perundangan yang berlaku.

Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan atau kemandirian yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus diri sendiri secara merdeka (tidak tergantung pihak lain). Fleksibilitas merupakan keluwesan-keluwesannya yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu sekolah. Peningkatan partisipasi yang dimaksud yaitu penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis, dimana warga sekolah (guru, siswa, dan karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, usahawan, dan sebagainya) didorong untuk terlibat secara langsung memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah merupakan model pengelolaan pendidikan yang memberikan kewenangan (otonomi) lebih besar kepada sekolah

untuk mengelola sekolahnya sendiri yang didukung partisipasi warga sekolah dan masyarakat sesuai dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Dapat juga dikatakan bahwa manajemen berbasis sekolah pada hakikatnya adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait (*stakeholders*) dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi mencapai tujuan sekolah.

Manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan partisipatif. Disamping itu, menurut Surya Darma (2010: 9) manajemen berbasis sekolah diterapkan dengan asumsi sebagai berikut:

- 1) Dengan pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah, maka sekolah akan lebih kreatif, inisiatif, dan inovatif dalam meningkatkan kinerja sekolah;
- 2) Dengan pemberian fleksibilitas/keluwes-keluwes yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumberdayanya, maka sekolah akan lebih luwes dan lincah dalam mengadakan dan memanfaatkan sumberdaya secara optimal untuk meningkatkan mutu sekolah;

- 3) Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya sehingga dia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia untuk memajukan sekolah;
- 4) Sekolah lebih mengetahui kebutuhannya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dan tingkat perkembangan serta kebutuhan peserta didik;
- 5) Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolahlah yang paling mengetahui apa yang terbaik bagi sekolahnya;
- 6) Penggunaan sumberdaya pendidikan lebih efektif dan efisien jika dikontrol oleh warga sekolah dan masyarakat setempat;
- 7) Keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan akan mampu meningkatkan rasa kepemilikan, dedikasi, transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap sekolah;
- 8) Sekolah lebih bertanggungjawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah dan pemerintah daerah, orangtua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya sehingga sekolah akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan;
- 9) Sekolah akan mampu bersaing secara sehat dengan sekolah-sekolah lainnya dalam peningkatan mutu pendidikan melalui upaya-upaya kreatif dan inovatif yang didukung oleh orangtua siswa, masyarakat

sekitar, dan pemerintah daerah setempat; dan sekolah dapat secara cepat menanggapi perubahan, aspirasi masyarakat, dan lingkungan yang berubah dengan cepat.

b. Peningkatan mutu pendidikan melalui MBS

Dalam pandangan Umaedi (1999), mutu diartikan sebagai derajat keunggulan suatu barang atau jasa dibandingkan dengan yang lain. Sementara itu, Sallis (2006: 22-25) dalam *Total Quality Manajemen in Education* mengemukakan konsep mutu dalam tiga pengertian. *Pertama*, mutu sebagai konsep yang absolut (mutlak), *kedua*, mutu dalam konsep yang relatif, *ketiga*, mutu menurut konsumen.

Dalam pengertian absolut, sesuatu disebut bermutu jika memenuhi standar yang tertinggi dan tidak dapat diungguli, sehingga mutu dianggap sesuatu yang ideal yang tidak dapat dikompromikan, seperti kebaikan, keindahan, maupun kebenaran. Mutu dalam konsep ini menunjukkan keunggulan status dan posisi dengan mutu tinggi. Jika dikaitkan dengan konteks pendidikan, maka konsep mutu absolut bersifat elit karena hanya sedikit lembaga pendidikan yang dapat memberikan pendidikan dengan mutu tinggi kepada siswa, dan sebagian besar siswa tidak dapat menjangkaunya.

Dalam pengertian relatif, sesuatu dikatakan bermutu apabila suatu produk atau jasa telah memenuhi persyaratan atau kriteria, atau standar yang ada. Produk atau jasa tersebut tidak harus terbaik, tetapi

memenuhi standar yang telah ditetapkan, termasuk memenuhi tujuan pelanggan. Jadi pada konteks ini sangat tergantung standarnya, apakah standar tinggi, sedang, atau rendah.

Dijelaskan lebih lanjut, terdapat dua aspek dari mutu relatif, yaitu mutu yang mendasarkan pada standar, dan mutu yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Aspek pertama menunjukkan bahwa mutu diukur dan dinilai berdasarkan persyaratan kriteria dan spesifikasi (standar-standar) yang telah ditetapkan lebih dulu. Pemenuhan standar ini ditunjukkan oleh produsen secara konsisten sehingga hasilnya (produk maupun jasa) tetap sesuai spesifikasi yang ditetapkan.

Aspek kedua, konsep ini juga mengakomodasi keinginan konsumen atau pelanggan, sebab di dalam penetapan standar (persyaratan, kriteria, dan spesifikasi) produk atau jasa yang dihasilkan memperhatikan syarat-syarat yang dikehendaki pelanggan. Perubahan-perubahan standar antara lain juga didasarkan atas keinginan dan pemenuhan kebutuhan pelanggan, bukan semata-mata kehendak produsen. Oleh karena itu, produk atau jasa yang dihasilkan akan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.

Dengan memperhatikan dua aspek konsep relatif dari mutu tersebut, menunjukkan bahwa standar bersifat dinamis, dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan yang terjadi. Oleh karena itu, mutu dalam konsep relatif ini dapat terus berkembang dan lembaga dapat terus melakukan inovasi untuk

meningkatkan spesifikasi dan standar serta menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggannya. Dalam konteks pendidikan, produk dari lembaga pendidikan berupa jasa.

Kepuasan pelanggan (siswa, orang tua dan masyarakat) dapat dibagi dalam dua aspek yaitu tata layanan pendidikan dan prestasi yang dicapai siswa. Dari aspek tata layanan pendidikan, kepuasan pelanggan dilihat dari layanan penyelenggaraan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan, seperti layanan bagi siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan dari aspek prestasi yang dicapai siswa, mutu dihubungkan dengan capaian yang telah diperoleh dalam kaitannya dengan kompetensi yang diinginkan oleh pelanggan.

Di Indonesia, mutu dalam pengertian absolut dapat dilihat dari adanya beberapa sekolah unggulan, baik berasal dari sekolah yang berbasis masyarakat maupun sekolah yang diprakarsai oleh pemerintah. Beberapa sekolah yang unggul adalah sekolah-sekolah yang ingin tampil beda, dengan kekhasan yang tidak dimiliki sekolah lain.

Dalam dunia pendidikan di Indonesia, mutu dalam pengertian relatif (standar) diterapkan dengan mengacu pada sejumlah standar yang telah ditetapkan. Standar pendidikan tersebut ditetapkan dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan maka ditetapkan delapan standar nasional pendidikan. Di luar standar tersebut pemerintah juga melakukan pengecekan standar yang berkaitan

dengan kinerja sekolah dan kelayakan pengelolaan pendidikan melalui sistem akreditasi sekolah.

Mutu berdasarkan kepuasan pelanggan menjadi bagian penting dari keberlangsungan hidup sekolah, karena masyarakat akan memilih pendidikan yang terbaik bagi putra-putrinya, sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Oleh karena itu, sekolah yang tidak memperhatikan kebutuhan pelanggan akan ditinggal oleh masyarakat. Pentingnya pelanggan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan di Indonesia direspon positif oleh pemerintah dengan dibentuknya komite sekolah, yang berfungsi sebagai tempat menyalurkan aspirasi masyarakat pengguna jasa pendidikan di sekolah.

Hal ini diperkuat lagi dengan penerapan manajemen berbasis sekolah yang ditetapkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 51 ayat (1). Dalam penjelasan pasal ini, yang dimaksud manajemen berbasis sekolah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah dan guru dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Dari penjelasan pasal 51 ayat (1) tersebut, wawasan mutu dari segi kepuasan konsumen yang diwakili oleh komite sekolah dengan ikut membantu mengelola kegiatan pendidikan di sekolah sudah terpadu dalam penerapan manajemen berbasis sekolah.

Depdiknas (2009: 24) menyatakan bahwa MBS secara utuhnya adalah untuk mencapai tidak hanya mutu pendidikan, tetapi juga untuk

memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hal ini ditegaskan dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang SNP Pasal 49, ayat (1) disebutkan “pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan/kerjasama, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas”. Kaitan antara pemenuhan SNP yang dikelola dengan prinsip-prinsip MBS dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pengelolaan Sekolah dalam Pemenuhan SNP Melalui MBS.

MANAJEMEM SEKOLAH ASPEK-ASPEK SEKOLAH		IMPLEMENTASI MBS: (kemandirian, kemitraan/kerjasama, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas)					
		Perencanaan	Pelaksanaan	Pengawasan/ evaluasi	Pengkoordinasian	Pengkomunikasian	Dan sebagainya
PEMENUHAN SNP	SKL						
	SI						
	PBM						
	Penilaian						
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan						
	Sarana dan prasarana						
	Pengelolaan						
	Pembiayaan						

(Sumber: Depdiknas (2009) *Manajemen Berbasis Sekolah*, hal. 39)

Standar Nasional Pendidikan adalah standar pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh sekolah, yang berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, yang terdiri dari

delapan aspek pendidikan. Pengertian delapan aspek SNP berdasarkan PP No. 19 tahun 2005 adalah sebagai berikut:

- 1) Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 2) Standar isi/KTSP adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- 3) Standar proses adalah SNP yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 4) Standar penilaian pendidikan adalah SNP yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik
- 5) Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
- 6) Standar sarana dan prasarana adalah SNP yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain,

yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan TIK.

- 7) Standar pengelolaan adalah SNP yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten /kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- 8) Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

Manajemen berbasis sekolah mengandung prinsip kemandirian, kemitraan/kerjasama, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam pengelolaan sekolah, setiap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/ evaluasi program sekolah untuk mencapai pemenuhan aspek-aspek SNP ditunjukkan oleh prinsip-prinsip MBS.

1) Perencanaan program sekolah

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang SNP Pasal 53 menyatakan bahwa: “setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun”. Demikian pula dalam Lampiran Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan disebutkan bahwa setiap sekolah harus menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang

bersifat empat tahunan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang bersifat satu tahunan. Dalam penyusunan program kerja sekolah yang berupa RKS dan RKAS ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan/kerjasama, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dituangkan di dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak-pihak terkait, disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah dan disahkan berlakunya oleh dinas pendidikan atau yayasan. Pada dasarnya secara substansi isi RKS dan RKAS adalah sama, yaitu memuat program kerja sekolah berkaitan dengan aspek-aspek sekolah yang akan dilaksanakan dan dikembangkan dalam kerangka pemenuhan SNP.

2) Pelaksanaan program sekolah

Pelaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan. Pelaksanaan program sekolah diupayakan makin lama mampu mandiri (untuk hal-hal tertentu) tanpa banyak bergantung kepada pihak lain. Pelaksanaan program sekolah tertentu juga harus menjalin kerjasama atau kemitraan dengan *stakeholders* untuk menghasilkan tujuan yang optimal. Demikian juga suatu program harus dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak secara

proporsional dan professional, sehingga menumbuhkan semangat partisipasi. Sekolah dalam melaksanakan programnya juga harus terbuka, yaitu tidak ada pelaksanaan program sekolah yang hanya diketahui oleh individu atau kelompok tertentu saja. Semua pelaksanaan program tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural dan professional, sehingga menumbuhkan tingkat kepercayaan publik dan pihak-pihak lain semakin tinggi.

3) Pengawasan program sekolah

Setelah program kerja sekolah disusun dan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip MBS, maka dalam pengawasan terhadap pelaksanaan program sekolah juga menganut prinsip-prinsip MBS. Berdasarkan Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan disebutkan bahwa pengawasan dan evaluasi sekolah terdapat lima hal, yaitu: program pengawasan, evaluasi diri, evaluasi dan pengembangan KTSP, evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan akreditasi sekolah. Masing-masing program tersebut harus dilaksanakan oleh sekolah, kecuali akreditasi

4. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008), implementasi berarti penerapan. Sementara itu, Salusu (1996) menyatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran (Lolowang, 2008: 19). Dari dua pengertian ini, implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau operasionalisasi suatu keputusan guna

mencapai suatu sasaran. Dalam hal ini adalah implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) sebagai model pengelolaan pendidikan di sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan/kerjasama, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas (PP No. 19 tahun 2005).

Pengelolaan sekolah diupayakan makin lama mampu mandiri (untuk hal-hal tertentu) tanpa banyak bergantung kepada pihak lain. Begitu juga dalam hal tertentu sekolah harus menjalin kerjasama atau kemitraan dengan *stakeholder* untuk menghasilkan tujuan yang optimal. Demikian juga suatu program harus dilaksanakan dengan dukungan semua pihak secara proporsional dan professional, sehingga menumbuhkan semangat partisipasi. Sekolah juga harus terbuka, yaitu tidak ada program dan dana sekolah yang hanya diketahui oleh individu atau kelompok tertentu saja. Pengelolaan program dan dana sekolah dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural dan professional, sehingga menumbuhkan kepercayaan.

a. Kemandirian sekolah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008), mandiri adalah keadaan dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain, sedangkan kemandirian adalah hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Pengertian ini menunjukkan bahwa kemandirian terlihat dari keadaan yang dapat berdiri sendiri atau tidak selalu tergantung kepada pihak lain dalam memutuskan atau melakukan sesuatu. Senada dengan hal ini, Surya Darma (2010: 15) menyampaikan bahwa otonomi dapat diartikan sebagai kemandirian yaitu kemandirian

dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri, kemandirian dalam program dan pendanaan merupakan tolok ukur utama kemandirian sekolah.

Prinsip kemandirian sekolah dalam MBS sejalan dengan teori MBS yang dikemukakan oleh Cheng, yaitu prinsip sistem pengelolaan mandiri (Nurkolis, 2006: 52). Menurutnya, MBS mempersilakan sekolah menjadi sistem pengelolaan secara mandiri dibawah kebijakannya sendiri. Sekolah memiliki otonomi untuk mengembangkan tujuan pengajaran, memecahkan masalah, dan mencapai tujuan berdasarkan kondisi mereka masing-masing. Hal ini dapat terjadi apabila terjadi pelimpahan wewenang dari birokrasi di atasnya ke tingkat sekolah.

Otonomi yang berarti mempunyai kewenangan mengatur semua masalah secara mandiri pada sekolah bukanlah otonomi tanpa batas. Sebagai kewenangan yang diberikan oleh otoritas di atasnya, hal ini merupakan pelimpahan wewenangan yang ada batasnya. Di antara batasan otonomi sekolah menurut Umaedi (2008: 4.6) adalah kebijakan dan peraturan yang berlaku, serta idealisme atau harapan mengapa manajemen berbasis sekolah perlu diterapkan.

Batasan pertama, yaitu kebijakan dan peraturan perundangan yang berlaku. Kebijakan dapat berupa kebijakan nasional, propinsi, atau kabupaten/kota yang berhubungan dengan pengelolaan sekolah dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Sisdiknas yang berlaku.

Batasan kedua, yaitu berupa harapan-harapan semua *stakeholder* (orang tua, masyarakat, pengguna lulusan, guru, kepala sekolah, dan penyelenggara pendidikan) yang berkepentingan terhadap keberhasilan pendidikan untuk melaksanakan fungsinya. Kalau batasan pertama bersifat normatif, sedangkan batasan kedua bersifat relatif dalam arti bahwa manajemen berbasis sekolah dinilai dari sejauh mana ia dapat memenuhi harapan para *stakeholder*.

Pengertian kemandirian sekolah menurut Depdiknas (2009: 40) lebih ditekankan kepada kewenangan sekolah dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri dengan tidak selalu tergantung kepada pihak lain. Kemandirian dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/ evaluasi program sekolah merupakan tolok ukur kemandirian sekolah. Program sekolah yang dimaksudkan disini sesuai dengan Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan adalah upaya sekolah dalam pemenuhan aspek-aspek standar nasional pendidikan (SNP). Program sekolah tersebut dikembangkan sendiri menjadi berbagai kegiatan dengan cakupan dan luasan sesuai dengan kondisi dan kemampuan sekolah.

Kemandirian sekolah akan mampu berjalan dengan semestrianya apabila didukung oleh sejumlah kemampuan, seperti kemampuan mengambil keputusan yang terbaik, kemampuan memecahkan persoalan sekolah, maupun kemampuan memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk menjadi mandiri, sekolah harus memiliki sumberdaya

yang cukup untuk menjalankan tugas dan fungsinya, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya selebihnya yaitu peralatan, perlengkapan, perbekalan, dana, dan bahan/material (Surya Darma, 2010: 24). Depdiknas (2009: 59) menyatakan bahwa suatu sekolah dapat mandiri dalam pelaksanaan program jika didukung oleh sejumlah kemampuan SDM sekolah, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan tuntutan program, didukung oleh sumber dana yang memadai sesuai dengan tuntutan program. Hal ini berarti bahwa sekolah yang mandiri dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan sumber daya sekolah tersebut, yang meliputi ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan, ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, dan ketersediaan dana sekolah sesuai dengan tuntutan program.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kemandirian sekolah dapat di lihat dari beberapa hal diantaranya: 1) sekolah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan 2) sekolah memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan sumber dayanya sendiri, Untuk lebih jelasnya indikator kemandirian sekolah dalam penelitian adalah sebagai berikut.

- 1) Sekolah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan.

Sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan yang terbaik bagi bagi sekolahnya, sehingga dituntut untuk memiliki kemampuan

dan kesanggupan kerja yang tidak selalu menggantungkan pada atasan. Kewenangan dalam mengatur sekolah secara mandiri ini harus sejalan dengan kebijakan maupun peraturan yang berlaku. Kewenangan sekolah yang akan dibahas dalam penelitian ini berdasarkan lampiran Permen No. 19 tahun 2007 adalah kewenangan pada program kurikulum dan pembelajaran.

Saat ini telah terjadi pergeseran kewenangan sebagian pengelolaan kurikulum dari pemerintah pusat ke sekolah melalui Permendiknas No. 22 tahun 2006, No. 23 tahun 2006, dan No. 24 tahun 2006. Pengelolaan kurikulum yang dimaksud dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Pemerintah Pusat hanya menetapkan standar dan sekolah diharapkan mengoperasionalkan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya sekolah berhak mengembangkan KTSP ke dalam Buku I KTSP, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, proses pembelajaran, dan sistem penilaian.

Permendiknas No. 22 tahun 2006 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar ini berdasarkan PP No. 19 tahun 2005 Bab III pasal 5 ayat (2) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban

belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik. Disamping itu penyusunan kurikulum tersebut selain mengacu pada Standar Isi juga harus mengacu pada Permendiknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan panduan penyusunan KTSP yang diterbitkan oleh BSNP. Acuan penyusunan kurikulum tersebut dikukuhkan dengan Permendiknas No. 24 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaannya.

Depdiknas (2006) menyatakan bahwa pelaksanaan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan terdiri dari:

a) Analisis Konteks, yang meliputi

- (1) Analisis potensi dan kekuatan/kelemahan yang ada di sekolah: peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, program-program yang ada di sekolah.
- (2) Analisis potensi peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar: komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri, dunia kerja, sumber daya alam dan sosial budaya.
- (3) Mengidentifikasi standar isi dan standar kompetensi lulusan sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

b) Mekanisme penyusunan

(a) Tim penyusun

Tim penyusun kurikulum SMK terdiri atas guru, konselor, kepala sekolah dan nara sumber dengan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota, dan disupervisi oleh dinas kabupaten kota/kota dan propinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan

(b) Kegiatan

Penyusunan kurikulum merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja dan/atau lokakarya sekolah dan/atau kelompok sekolah yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pembelajaran baru.

(c) Pemberlakuan

Dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan SMK dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah serta diketahui oleh komite sekolah dan dinas kabupaten/kota/propinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan

Dokumen kurikulum dapat diformat dan dikemas dalam tiga buku utama sebagai berikut:

a) Buku I. Petunjuk umum

Berisi tentang visi dan misi satuan pendidikan/sekolah, tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan struktur muatan kurikulum.

b) Buku II. Silabus dan RPP

Berisi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) lengkap untuk setiap mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran.

c) Buku III Pedoman Penilaian

Berisi petunjuk pelaksanaan penilaian, baik proses, prosedur, maupun mekanisme penilaian.

Proses belajar mengajar merupakan kegiatan utama sekolah. Sekolah diberi kebebasan memilih strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang paling efektif, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, karakteristik guru, dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah. Permendiknas No. 41 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Pada penilaian proses pembelajaran mengacu kepada lampiran Permendiknas

No. 20 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

2) Sekolah memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan sumber dayanya sendiri

Manajemen berbasis sekolah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah, sehingga kepala sekolah, guru dan *stakeholder* terkait diharapkan melakukan sesuatu yang terbaik untuk sekolahnya. Sehubungan dengan ini maka sekolah harus didukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya sekolah yang memadai. Sumber daya sekolah tersebut diantaranya adalah pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan pembiayaan/dana sekolah.

Dalam UU No. 20 tahun 2003 disebutkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi,

pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pendidik dan tenaga kependidikan harus mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam Permendiknas No. 16 tahun 2007 disebutkan karakteristik seorang pendidik meliputi standar kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik. Kualifikasi akademik dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun uji kelayakan dan kesetaraan yang biasanya ditunjukkan dengan sertifikat atau ijazah sebagai bukti kelulusannya.

Adapun kompetensi pendidik dapat diketahui melalui kinerja pendidik yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan pendidik yang berkaitan dengan sikap mental sebagai seorang pendidik. Sesuai dengan standar, maka kompetensi pedagogik minimal yang harus dimiliki, guru adalah mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran

Kompetensi kepribadian terkait dengan kemampuan guru dalam hal pengendalian diri. Dalam hal ini guru memiliki integritas kepribadian dan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan guru dalam berhubungan

dengan orang lain, dalam hal ini guru mampu berkomunikasi secara efektif dan santun dengan sesama guru, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat. Adapun kompetensi profesional berkaitan dengan penguasaan guru terhadap keilmuan bidang keahlian yang diampunya yaitu dengan menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.

Kebutuhan sumber daya sekolah yang terpenting lainnya adalah ketersediaan sarana prasarana sekolah. Sekolah diberikan kewenangan dalam program pengelolaan sarana dan prasarana sekolah mulai dari merencanakan, memenuhi, mendayagunakan, dan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sekolah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas, baik kecukupan maupun kesesuaiannya.

Dalam Permendiknas No. 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK, disebutkan standar sarana prasarana sekolah mencakup: (1) bangunan; (2) kelengkapan sarana prasarana ruang pembelajaran umum, (3) kelengkapan sarana prasarana ruang penunjang, dan (4) kelengkapan sarana prasarana ruang pembelajaran khusus. Sekolah dikatakan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana berarti harus memiliki minimal kebutuhan sarana dan prasarana yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu

sekolah harus mampu mendayagunakan dan memanfaatkannya secara optimal.

Sumber daya selanjutnya yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah pembiayaan/dana sekolah. Menurut Harsono (2007: 9) biaya pendidikan berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi 4 jenis, (1) biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah, (2) biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat orang tua/wali siswa, (3) biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua/wali siswa, misalnya sponsor dari lembaga keuangan dan perusahaan, dan (4) lembaga pendidikan itu sendiri. Senada dengan hal ini, Umaedi (2008: 3.7) menyatakan bahwa sumber pembiayaan sekolah dapat bersumber dari (1) pemerintah, (2) masyarakat termasuk dana dari orang tua/masyarakat/dunia usaha, dan (3) sumber lainnya, misalnya hibah atau pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerimaan sumber biaya pendidikan juga ditegaskan dalam PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, disebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Depdiknas (2009: 63) menjelaskan indikator kemandirian sekolah ditinjau dari sumber dana dan pendanaan antara lain dapat dilihat dari: 1) upaya sekolah dalam mengembangkan unit-unit usaha/*income generating* untuk menghasilkan pemasukan dana, baik

berupa usaha jasa maupun produk; 2) Mengupayakan dapat bantuan dana secara kontinyu dari daerahnya untuk mendukung pelaksanaan program yaitu dianggarkan melalui APBD daerah, agar tidak tergantung dari pemerintah pusat; 3) meningkatkan peran dan fungsi komite sekolah untuk mendukung pelaksanaan program khususnya dalam bidang pendanaan/keuangan. 4) mengoptimasikan potensi sumber daya sekolah (SDM, sarpras, lingkungan fisik/social, dan lainnya) dan masyarakat sekitarnya untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. 5) menjalin kerjasama dengan perusahaan sekitar atau pihak lain untuk membantu dana pendidikan melalui sponsorship atau beasiswa atau untuk mendukung pelaksanaan program. Berdasarkan uraian ini maka kemandirian sekolah dalam pendanaan dapat dilihat dari perolehan sumber dana sekolah dan upaya sekolah dalam memperoleh sumber pembiayaan.

b. Kerjasama/kemitraan sekolah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008), mitra adalah teman; sahabat; kawan kerja; pasangan kerja; rekan, sedangkan kemitraan adalah hubungan atau jalinan kerjasama. Kemitraan merupakan hubungan atau jalinan kerjasama dimana masing-masing orang yang memiliki keahlian berbeda bekerja bersama menjadi satu kelompok/tim.

Dalam pandangan manajemen, kerjasama dimaknai dengan istilah *collaboration* (Surya Darma, 2008: 5). Makna ini sering

digunakan dalam terminologi manajemen pemberdayaan staf yaitu kerjasama antara manajer dengan staf dalam mengelola organisasi. Sekolah merupakan organisasi, tidak ada organisasi tanpa kerjasama, sehingga dalam pengelolaan sekolah dibutuhkan kerjasama yang baik dari para pemangku kepentingan agar tujuan sekolah dapat tercapai.

Dalam pelaksanaan program sekolah diperlukan adanya masukan-masukan atau bantuan secara langsung dari para *stakeholder*. Namun demikian, adanya masukan atau bantuan dari para pemangku kepentingan tersebut tidak mengurangi prinsip dan makna kemandirian yang dibangun sekolah. Kemandirian dalam arti luas tetap menerima dan memerlukan kerjasama dengan pihak lain. Disamping itu, terdapat beberapa hal yang tidak bisa hanya ditangani oleh sekolah, sehingga kerjasama atau kemitraan tetap diperlukan.

Menurut Daryanto (2006: 71), dalam dunia pendidikan dikenal dua macam hubungan, yakni: (1) hubungan dalam penyelenggaraan program pendidikan dengan masyarakat sekolah, dan (2) Hubungan dengan masyarakat di luar sekolah. Hubungan dengan masyarakat sekolah dapat diartikan sebagai kerjasama antar warga sekolah (kerjasama internal). Hubungan dengan masyarakat di luar sekolah merupakan kerjasama antara sekolah dengan pihak luar sekolah (kerjasama eksternal). Kerjasama sekolah yang baik ditunjukkan oleh hubungan antar warga sekolah yang erat, hubungan sekolah dan

masyarakat erat, serta adanya kesadaran bersama bahwa *output* program sekolah merupakan hasil *teamwork* (Depdiknas, 2009: 63).

Kemitraan/kerjasama penting untuk dilakukan karena disadari sepenuhnya bahwa hasil pendidikan sekolah merupakan hasil kolektif dari unsur-unsur terkait atau para pemangku kepentingan (stakeholders). Kemitraan yang dapat menghasilkan *teamwork* yang kompak, cerdas, dan dinamis akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan sekolah. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk meningkatkan kemitraan perlu ditempuh melalui: (1) pembuatan pedoman mengenai tatacara kemitraan, penyediaan sarana kemitraan dan saluran komunikasi, (2) melakukan advokasi, publikasi, dan transparansi terhadap pemangku kepentingan, dan (3) melibatkan pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip relevansi, yurisdiksi, dan kompetensi serta kompatibilitas tujuan yang akan dicapai (Surya Darma, 2010: 45).

Di dalam sekolah, terdapat sejumlah orang yang bekerja pada posisi dan peran masing-masing. Dari sudut pandang ini, sekolah adalah sebuah tim kerja (*teamwork*), sehingga *output* pendidikan di sekolah merupakan hasil kerjasama warga sekolah, bukan hasil individual. Karena itu, budaya kerjasama antar fungsi dalam sekolah dan antar individu dalam sekolah harus merupakan kebiasaan hidup sehari-hari warga sekolah.

Selain kerjasama internal sekolah, dalam pelaksanaan program sekolah juga memerlukan kerjasama dengan pihak terkait. Bentuk

kerjasama dalam pelaksanaan program sekolah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah dan juga pihak terkait yang menjadi mitranya. Prinsip dasar dalam menjalin kemitraan ini antara lain: saling menguntungkan, saling percaya, kesejajaran, saling memberi dan menerima, dan berjangka.

Menurut Surya Darma (2010: 36), dalam MBS sekolah memiliki mitra yang mewakili masyarakat sekitarnya yang disebut komite sekolah. Tugas dan fungsi komite sekolah dalam pelaksanaan MBS adalah: (1) memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai kebijakan dan program pendidikan, RAPBS, kriteria kinerja sekolah, kriteria pendidik dan tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan; (2) mendorong orangtua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tinggi, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan/program/ penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, melakukan kerjasama dengan masyarakat, dan menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dibutuhkan kerjasama dengan dunia usaha dan industri. Hal ini

dikarenakan SMK adalah lembaga pendidikan kejuruan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan siswa memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang tertentu. Kerjasama antara SMK dengan dunia usaha dan industri dilaksanakan melalui model penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) yang dikembangkan untuk meningkatkan relevansi SMK dengan kebutuhan dunia kerja. Pelaksanaan PSG berdasarkan keputusan Mendikbud No. 0490/1992 tentang kerjasama SMK dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI) bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian program SMK dengan kebutuhan dunia kerja yang diusahakan dengan saling menguntungkan

Dalam Lampiran Permendiknas No. 19 Tahun 2007, disebutkan bahwa setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan. Kemitraan sekolah dapat dilakukan dengan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah seperti perguruan tinggi, sekolah yang setara, masyarakat, serta dunia usaha dan dunia industri di lingkungannya. Indikator keberhasilan sekolah dalam menjalin kerjasama/kemitraan antara lain ditunjukkan oleh: (1) terbentuknya tim khusus humas/atau tim kerjasama dengan tupoksi dan program dan mampu (berhasil) menggalang kemitraan, (2) terlaksananya kunjungan peninjauan kerjasama dengan pihak terkait untuk memperoleh masukan sebelum pelaksanaan program, (3) terealisasinya kontrak kerjasama yang dituangkan dalam MoU atau piagam kerjasama dengan

pihak terkait, dan (4) terealisasikannya berbagai kegiatan dalam kerangka mensukseskan pelaksanaan program, seperti (a) pertukaran pelajar, guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan pimpinan sekolah dalam upaya penambahan wawasan dan kompetensinya; (b) magang guru ke lembaga lain untuk meningkatkan kompetensi, dan sebagainya (Depdiknas, 2009: 64).

c. Bentuk partisipasi

Partisipasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu "*participation*" yang berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan (Echols dan Shadily, 2006: 419). Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008) partisipasi adalah turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Berdasarkan definisi ini maka partisipasi dapat diartikan sebagai peran serta atau dukungan dalam suatu kegiatan.

Depdiknas (2009: 43) menyatakan bahwa partisipasi adalah proses dimana *stakeholders* (warga sekolah dan masyarakat) terlibat aktif baik secara individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung, dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengevaluasian pendidikan di sekolah. Partisipasi yang dimaksud merupakan penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis di sekolah, dimana warga sekolah (kepala sekolah, guru, karyawan) dan masyarakat didorong untuk terlibat dalam memberikan dukungan secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan,

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa jika seseorang turut serta (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan pendidikan, maka akan memiliki rasa memiliki terhadap sekolah, sehingga akan bertanggung jawab dan berdedikasi untuk mencapai tujuan sekolah.

Penerapan MBS adalah untuk membuat kebijakan/keputusan sekolah lebih dekat dengan *stakeholders* sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan aspirasi *stakeholders*. Untuk itu, MBS mensyaratkan adanya partisipasi aktif dari semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah (*stakeholders*), baik warga sekolah seperti guru, kepala sekolah, siswa, dan tenaga-tenaga kependidikan lainnya, maupun warga di luar sekolah seperti orang tua siswa, akademisi, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak lain yang mewakili masyarakat yang diwadahi melalui komite sekolah.

Partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan sekolah telah diatur dalam suatu kelembagaan yang disebut dengan Komite Sekolah. Secara resmi keberadaan Komite Sekolah ditunjukkan melalui Surat Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Komite Sekolah diharapkan menjadi mitra sekolah yang dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah. Tugas dan fungsi Komite Sekolah antara lain

mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; dan menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Selain itu, Komite Sekolah juga dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah tentang kebijakan dan program pendidikan, rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah. Pendeknya, Komite Sekolah diharapkan berperan sebagai pendukung, pemberi pertimbangan, mediator dan pengontrol penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Tujuan utama peningkatan partisipasi adalah untuk:

- (1) meningkatkan dedikasi/kontribusi *stakeholders* terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik dalam bentuk jasa (pemikiran/intelektualitas, keterampilan), moral, finansial, dan material/barang; (2) memberdayakan kemampuan yang ada pada *stakeholders* bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; (3) meningkatkan peran *stakeholders* dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik sebagai *advisor*, *supporter*, *mediator*, *controller*, *resource linker*, and *education provider*, dan (4) menjamin agar setiap keputusan dan kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi *stakeholders* dan menjadikan aspirasi

stakeholders sebagai panglima bagi penyelenggaraan pendidikan di sekolah (Surya Darma, 2010: 68).

Bentuk partisipasi dapat berupa apa saja yang relevan dalam pelaksanaan program sekolah, baik berupa fisik maupun non fisik. Menurut Engkoswara (2010: 297), peningkatan partisipasi masyarakat dipilah dalam dua kategori, yaitu partisipasi dalam bentuk kontribusi pembiayaan, dan partisipasi dalam bentuk pemikiran dan tenaga. Sementara itu, Depdiknas (2009: 9) menyatakan bentuk-bentuk partisipasi *stakeholders* diantaranya adalah: a) berupa dukungan dana, (b) berupa dukungan tenaga, (c) berupa dukungan pemikiran, dan (d) berupa dukungan material/fasilitas.

d. Keterbukaan sekolah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008), transparan adalah tembus pandang; bening; jernih; jelas; terbuka tidak terbatas pada orang tertentu saja. Dalam ruang lingkup sekolah, transparansi berarti keadaan dimana setiap orang yang terkait dengan kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil kebijakan sekolah. Dengan kata lain, transparansi sama dengan polos, apa adanya, tidak bohong, tidak curang, jujur, dan terbuka terhadap publik tentang apa yang dikerjakan oleh sekolah. Keterbukaan ini ditunjukkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, penggunaan uang dan sebagainya, yang selalu melibatkan pihak-pihak terkait sebagai alat kontrol (Depdiknas, 2001: 16).

Sekolah adalah organisasi pelayanan yang diberi mandat oleh publik untuk menyelenggarakan pendidikan sebaik-baiknya. Mengingat sekolah adalah organisasi pelayanan publik, maka sekolah harus transparan kepada publik mengenai proses dan hasil pendidikan yang dicapai. Transparansi dicapai melalui kemudahan dan kebebasan publik untuk memperoleh informasi dari sekolah. Transparansi sekolah perlu ditingkatkan agar publik memahami situasi sekolah dan dengan demikian mempermudah publik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam kerangka meningkatkan transparansi sekolah kepada publik antara lain melalui pendayagunaan berbagai jalur komunikasi, baik secara langsung melalui temu wicara, maupun secara tidak langsung melalui jalur media tertulis (brosur, leaflet, newsletter, pengumuman melalui surat kabar) maupun media elektronik (Surya Dharma, 2010: 72).

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan sekolah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang dicapai. Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh sekolah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika sekolah tidak menangani kinerjanya dengan baik

kinerjanya. Manajemen kinerja sekolah yang baik adalah titik awal dari transparansi sekolah.

Keterbukaan sekolah ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan publik terhadap sekolah bahwa sekolah adalah organisasi pendidikan yang bersih dan berwibawa. Bersih dalam arti tidak KKN dan berwibawa dalam arti profesional. Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara sekolah dan publik melalui penyediaan informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keterbukaan sekolah ditunjukkan dengan selalu melibatkan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan sekolah sebagai alat kontrol. Sekolah yang terbuka merupakan sekolah yang memberikan kemudahan akses informasi kepada warga sekolah dan masyarakat terkait dengan apa saja yang dilakukan sekolah dengan mendayagunakan berbagai jalur komunikasi atau wadah informasi. Maka dari itu indikator keterbukaan sekolah dalam penelitian ini adalah : (1) keterlibatan warga sekolah dan komite sekolah dalam perumusan program dan keuangan sekolah, dan (2) kemudahan mengakses informasi melalui berbagai jalur informasi oleh warga sekolah dan masyarakat.

e. Akuntabilitas sekolah

Menurut Slamet PH (2006: 37) dikutip dari Bangun (2009: 22), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung-

jawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sementara itu, Depdiknas (2009: 45) menyampaikan bahwa akuntabilitas sekolah adalah pertanggungjawaban sekolah kepada warga sekolahnya, masyarakat, dan pemerintah melalui pelaporan dan pertemuan yang dilakukan secara terbuka. Dengan demikian, akuntabilitas sekolah adalah bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan sekolah terhadap keberhasilan program yang telah dilaksanakan.

Manajemen berbasis sekolah dengan desentralisasi kewenangan kepada sekolah bukan hanya memberikan kewenangan untuk mengambil keputusan yang lebih luas (daripada sebelumnya), tetapi juga sekaligus membebaskan pertanggungjawaban oleh sekolah atas apa-apa yang dikerjakan dan hasil kerjanya. Akuntabilitas pendidikan dan hasilnya diberikan bukan hanya kepada satu *stakeholder* (pusat/birokrasi), tetapi kepada berbagai pihak (*stakeholders*), termasuk di dalamnya orang tua, komite sekolah (masyarakat), dan pengguna lulusan, disamping secara internal kepada guru-guru dan warga sekolah (Umaedi, 2008: 4.10). Akuntabilitas kepada berbagai pihak ini pada gilirannya akan meningkatkan kepedulian yang kuat (komitmen) pihak-pihak terkait tersebut atas apa yang terjadi di sekolah.

Akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yakni akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal menyangkut hubungan antara pengelola sekolah dengan masyarakat (sekolah dengan orang tua siswa, dan sekolah dengan instansi di atasnya yaitu yayasan atau Dinas Pendidikan). Sedangkan akuntabilitas horisontal menyangkut hubungan antara sesama warga sekolah (antar kepala sekolah dengan komite, dan antara kepala sekolah dengan guru).

Akuntabilitas ini berbentuk laporan prestasi yang dicapai dan dilaporkan kepada pemerintah, warga sekolah, dan orang tua siswa (masyarakat). Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan program, pemerintah, warga sekolah, dan masyarakat dapat menilai apakah program sekolah telah mencapai tujuan yang dikehendaki atau tidak. Jika berhasil mencapai tujuan yang dikehendaki maka pemerintah, warga sekolah, dan masyarakat perlu memberikan penghargaan, semangat ataupun dorongan untuk peningkatan program yang akan datang. Namun apabila tidak mencapai tujuan yang dikehendaki, pemerintah, warga sekolah, dan masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban dan penjelasan sekolah atas kegagalan pelaksanaan program. Dengan cara ini, maka sekolah tidak akan main-main dalam melaksanakan program pada tahun mendatang.

Tujuan utama akuntabilitas sekolah terhadap pelaksanaan program dan hasilnya adalah untuk mewujudkan sekolah yang akuntabel dan terpercaya. Keberhasilan akuntabilitas sekolah adalah

ditandai dengan meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah (Depdiknas, 2009: 45). Dengan meningkatnya akuntabilitas sekolah, maka akan mewujudkan sekolah yang akuntabel dan terpercaya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas sekolah merupakan pertanggungjawaban sekolah kepada para pemangku kepentingan terkait dengan proses dan hasil pelaksanaan program dan keuangan sekolah dalam bentuk laporan tertulis. Akuntabilitas sekolah juga kewajiban sekolah untuk menjawab maupun menerangkan apa saja yang dilakukan sekolah guna membahas laporan pertanggungjawaban melalui pertemuan antara sekolah dengan pihak-pihak terkait. Penyampaian informasi pertanggungjawaban sekolah akan memberikan kepuasan kepada warga sekolah dan masyarakat karena warga sekolah dan masyarakat telah mengetahui apa saja yang dilakukan sekolah. Maka dari itu indikator akuntabilitas sekolah dalam penelitian ini adalah: (1) pelaporan proses dan hasil pelaksanaan program maupun keuangan sekolah, (2) pertemuan untuk membahas laporan pertanggungjawaban, dan (3) kepuasan warga sekolah dan komite sekolah terhadap pertanggungjawaban sekolah.

B. Penelitian Yang Relevan

Terdapat beberapa hasil penelitian yang relevan terkait dengan implementasi manajemen berbasis sekolah, diantaranya penelitian yang

dilakukan oleh Tamsir (2010) tentang Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMK Negeri 2 Wonosari Gunungkidul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) sekolah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menyiapkan input-input yang diperlukan untuk kesiapan pelaksanaan MBS di sekolah belum optimal, (2) transparansi manajemen telah dilaksanakan dengan baik di bidang program dan kebijakan maupun di bidang keuangan, namun secara teknis masih perlu disempurnakan. Sementara pada aspek pertanggungjawaban ketercapaian program dan pengelolaan keuangan, dalam rangka akuntabilitas telah dilakukan dengan baik dengan membuat laporan tertulis kepada komite sekolah, wali murid, dan warga sekolah, (3) kerjasama antara warga sekolah dan antara warga sekolah dengan masyarakat telah terjalin dengan baik, (4) sekolah memiliki kemandirian yang ditunjukkan dengan melakukan pengembangan struktur organisasi, mengembangkan uraian tugas personil, pengembangan kurikulum dan melaksanakan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan ICT dalam pembelajaran, (5) berkaitan dengan ketercapaian sasaran sekolah telah berhasil meningkatkan prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik, (6) masih banyak kendala yang dialami antara lain, sulit melakukan perubahan, kultur kerja keras belum sepenuhnya terbangun, kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan dan sebagian kurang peduli terhadap perubahan. Berdasarkan hasil penelitian ini dan implikasinya maka disarankan kepada sekolah agar melakukan sosialisasi visi, misi, dan program lebih intensif, peningkatan peran warga sekolah, peningkatan kerjasama internal dan eksternal.

Penelitian lain dilakukan oleh LPMP Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pelaksanaan MPMBS di SMK Propinsi DIY (2005: 31) yang dikutip dari Mujari (2007). Hasil penelitian ini merekomendasikan: 1) sosialisasi tentang prestasi sekolah, 2) sosialisasi visi dan misi sekolah kepada warga sekolah, 3) keterlibatan warga sekitar dengan lembaga (sekolah) sehingga melahirkan kerjasama yang baik, 4) perlu kerjasama dengan lembaga (pihak pengguna lulusan) untuk lebih mengembangkan lembaga (sekolah), 5) peninjauan kembali peraturan daerah yang berhubungan dengan lembaga sekolah, 6) pengangkatan guru lokal sesuai dengan keahliannya, sehingga muatan lokal dapat dikembangkan di sekolah, 7) dibentuknya ikatan alumni, sehingga menimbulkan keterkaitan antara lembaga dengan alumni, 8) meningkatkan sumber daya manusia warga sekolah baik melalui diklat/kursus, atau pendidikan khusus, 9) agar pelaksanaan MPMBS lebih optimal diperlukan diklat MPMBS, 10) agar pelaksanaan pembelajaran lebih optimal perlu pengembangan model-model pembelajaran, 11) untuk menimbulkan inovasi perlu adanya *in house training* untuk memberikan kemampuan pada team work sekolah yang handal.

Hasil penelitian Nurdin Hidayat (2010) tentang peran komite sekolah dalam implementasi manajemen pendidikan di SMK Negeri 4 Yogyakarta dan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta menyatakan bahwa: (1) Pelaksanaan peran komite sekolah SMK Negeri 4 Yogyakarta (a) sangat efektif pada perannya pada badan pertimbangan, (b) efektif pada perannya sebagai badan pendukung, (c) cukup efektif perannya sebagai badan pengontrol, (d) sangat

efektif perannya sebagai badan penghubung, (2) Pelaksanaan peran komite sekolah SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta (a) sangat efektif pada perannya sebagai badan pertimbangan, (b) cukup efektif perannya sebagai badan pendukung, (c) cukup efektif perannya sebagai badan pengontrol, (d) sangat efektif perannya sebagai badan penghubung.

C. Kerangka Pikir

Penyelenggaraan pendidikan nasional yang dilakukan secara sentralistik menempatkan sekolah sangat tergantung pada keputusan birokrasi pusat, yang terkadang kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kondisi sekolah. Hal inilah yang menyebabkan mutu pendidikan di Indonesia rendah dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu dilakukan perubahan pengelolaan sistem pendidikan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi yang disebut dengan manajemen berbasis sekolah (MBS).

Manajemen berbasis sekolah merupakan model manajemen pendidikan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah untuk mengatur dan mengurus sekolah menurut prakarsa sendiri melalui sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan potensi sekolah berdasarkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Model manajemen pendidikan dengan penerapan MBS harus dilaksanakan oleh sekolah sebagaimana tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, PP No. 19 tahun 2005 tentang SNP, dan PP No. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan. Dalam upaya manajemen sekolah yang baik dan sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku, maka dalam penyelenggaraan program sekolah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/evaluasi program sekolah ditunjukkan dengan prinsip-prinsip MBS yaitu kemandirian, kerjasama, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Program sekolah tersebut berisi delapan aspek standar nasional pendidikan (SNP) yang dikelola sekolah meliputi kurikulum, PBM, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan pembiayaan.

1. Kemandirian Sekolah

Sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut inisiatif/prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya yaitu kewenangan dalam pengembangan kurikulum dan program pembelajaran. Untuk menjadi mandiri, sekolah harus didukung oleh sumber daya yang sesuai dengan tuntutan program. Sehingga sekolah harus mampu memenuhi kebutuhan sumber dayanya yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana sekolah, serta pembiayaan/dana sekolah.

2. Kerjasama Sekolah

Dalam pelaksanaan program sekolah diperlukan adanya masukan-masukan atau bantuan pelaksanaan secara langsung dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik dari para pemangku kepentingan. Kerjasama ini dilakukan antar sesama warga sekolah (kerjasama internal) dan antara sekolah para pemangku

kepentingan dari luar sekolah (kerjasama eksternal). Kerjasama sekolah yang baik ditunjukkan oleh hubungan antar warga sekolah yang erat, hubungan sekolah dan masyarakat erat, serta adanya kesadaran bersama bahwa output program sekolah merupakan hasil kolektif *teamwork*.

3. Bentuk Partisipasi

Partisipasi *stakeholders* di sekolah dilandasi oleh keyakinan bahwa jika seseorang dilibatkan (berpartisipasi) dalam pelaksanaan program sekolah, maka yang bersangkutan akan memiliki rasa memiliki terhadap sekolah, sehingga yang bersangkutan juga akan bertanggungjawab dan berdedikasi sepenuhnya untuk mencapai tujuan sekolah. Partisipasi dari *stakeholders* mempertimbangkan keahlian, batas kewenangan, dan relevansinya dengan tujuan partisipasi dalam penyelenggaraan program sekolah. Bentuk partisipasi tersebut dapat berupa dukungan dana, dukungan pemikiran, dukungan material/fasilitas, dan dukungan tenaga.

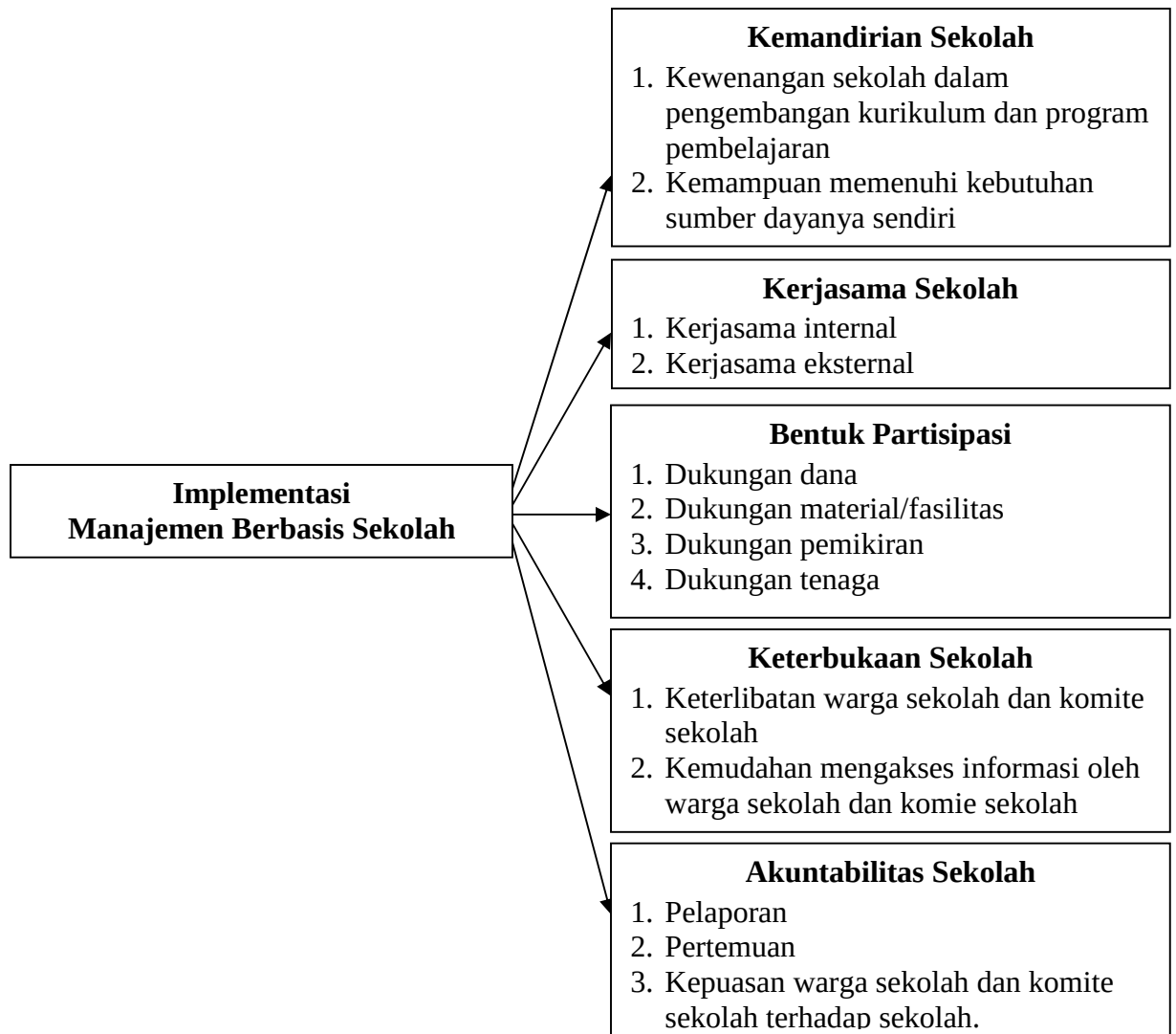
4. Keterbukaan Sekolah

Sekolah merupakan lembaga pelayanan publik di bidang pendidikan yang diberi mandat oleh masyarakat untuk mengelola pendidikan di sekolah, sehingga keterbukaan dalam penyelenggaraan program sekolah merupakan hak publik. Keterbukaan sekolah dalam penelitian ini ditunjukkan dengan keterlibatan warga sekolah dan komite sekolah dalam perumusan program dan keuangan sekolah dan kemudahan mengakses informasi oleh warga sekolah dan masyarakat melalui berbagai jalur komunikasi.

5. Akuntabilitas Sekolah

Sekolah diberi mandat oleh masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan sebaik-baiknya, sehingga penyelenggara sekolah bertanggung-jawab atas proses dan hasil kerjanya kepada masyarakat. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam pelaksanaan program sekolah berarti pertanggung-jawaban sekolah kepada warga sekolah, masyarakat, dan pemerintah atau yayasan melalui pelaporan dan pertemuan terhadap proses dan hasil pelaksanaan program maupun keuangan sekolah. Pertanggungjawaban proses dan hasil pelaksanaan program maupun keuangan sekolah pada gilirannya kan meningkatkan kepuasan warga sekolah dan masyarakat.

Salah satu upaya untuk mengetahui kondisi dan eksistensi implementasi MBS di sekolah, maka perlu dilakukan penelitian. Penelitian MBS ini lebih ditekankan kepada perolehan data dan informasi di lapangan berkaitan dengan implementasi prinsip-prinsip MBS di sekolah sekolah. Oleh karena itu, untuk menentukan arah dan tujuan penelitian maka dibuat kerangka berpikir seperti pada gambar berikut.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan atau otonomi sekolah dalam mengembangkan program kurikulum dan pembelajaran?
2. Bagaimana ketersediaan sumber daya sekolah yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana sekolah, dan pembiayaan/dana sekolah?

3. Bagaimana hubungan kerjasama internal antar warga sekolah?
4. Bagaimana hubungan kerjasama eksternal sekolah?
5. Apa saja bentuk partisipasi *stakeholders* dalam penyelenggaraan program sekolah?
6. Siapa saja yang terlibat dalam perumusan program dan keuangan sekolah?
7. Media apa saja yang digunakan sekolah dalam menyebarkan informasi program dan keuangan sekolah?
8. Kepada siapa saja sekolah mempertanggungjawabkan proses dan hasil pelaksanaan program maupun keuangan sekolah?
9. Apakah sekolah membuat laporan pertanggungjawaban program dan keuangan sekolah?
10. Apakah sekolah mengadakan pertemuan dengan para pemangku kepentingan untuk membahas laporan pertanggungjawaban?
11. Apakah warga sekolah dan komite sekolah merasa puas terhadap pertanggungjawaban sekolah?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat non-eksperimental dengan metode pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2009: 56). Dalam arti ini, penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa yang menjadi objek penelitian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap objek tersebut, dan tidak mencari hubungan atau menerangkan komparasi antar variabel, sehingga tidak memerlukan hipotesis. Sejalan dengan pengertian tersebut, maka penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi manajemen berbasis sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak yang dijadikan sumber data penelitian dengan memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti. Subjek penelitian ini diantaranya adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah ketenagaan, wakil kepala sekolah kurikulum, wakil kepala sekolah kesiswaan, wakil kepala sekolah hubungan masyarakat, wakil kepala

sekolah sarana prasarana, guru, kepala tata usaha, bendahara, dan komite sekolah seperti yang terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. Subjek Penelitian

No.	Subjek Penelitian	Jumlah
1	Kepala sekolah	1
2	Waka ketenagaan	1
3	Waka kurikulum	1
7	Waka kesiswaan	1
8	Waka humas	1
9	Waka sarana prasarana	1
10	Guru	96
11	Kepala tata usaha	1
12	Bendahara	1
13	Komite sekolah	1
Jumlah		105

Angket disebarakan kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru sebanyak 102 angket, namun yang kembali dan dapat dianalisis adalah 98 angket. Sedangkan untuk subjek penelitian yang lain adalah untuk mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan tabel penentuan jumlah sampel oleh *Isaac* dan *Michael* untuk tingkat kesalahan 1% pada jumlah populasi 110 responden adalah 94 responden (Sugiyono, 2009: 128). Maka dalam penentuan jumlah populasi angket penelitian ini masih memenuhi kriteria tingkat kesalahan 1%, sehingga data angket dapat dianalisis.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta Jl. Pramuka 62 Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta. Adapun waktu penelitian adalah dari bulan April s/d bulan Agustus 2010.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data penelitian yang dibutuhkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan multi-metode agar diperoleh data yang akurat dan lengkap. Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu dengan angket, wawancara, dan dokumentasi.

1. Angket

Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden dengan jumlah banyak untuk dijawab. Angket yang digunakan adalah angket tertutup (berstruktur), yaitu angket yang disajikan sedemikian rupa agar responden tinggal memilih salah satu jawaban. Pengukuran angket menggunakan skala *Likert* yang terdiri dari empat macam pilihan yaitu: sangat setuju (bernilai skor 4), setuju (bernilai skor 3), kurang setuju (bernilai skor 2), dan tidak setuju (bernilai skor 1).

2. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data guna memperoleh informasi secara langsung dari responden. Wawancara digunakan supaya peneliti mengetahui informasi yang lebih mendalam dari responden. Wawancara bertujuan agar data yang didapat menjadi akurat dan detail. Pedoman wawancara disusun secara sistematis, lengkap dan sesuai dengan angket agar proses wawancara berjalan lancar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, peraturan-peraturan dan dokumen lain yang relevan. Teknik ini dimaksudkan untuk untuk menguatkan data yang diperoleh dari angket dan wawancara yang telah terkumpul. Agar dokumentasi berjalan lancar, maka dibuat panduan dokumentasi.

E. Instrumen Penelitian

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008), instrumen dapat diartikan sebagai: (1) alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, dan (2) sarana penelitian (berupa seperangkat tes, angket, dan sebagainya) untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur objek penelitian atau nilai variabel yang diteliti (Sugiyono, 2009: 133). Instrumen penelitian disusun dengan menjabarkan variabel-variabel penelitian berdasarkan kajian teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Dari kajian

teori diperoleh beberapa indikator yang kemudian dijadikan butir-butir instrumen yang akan digunakan.

1. Penyusunan Instrumen Penelitian

Penyusunan angket pada penelitian ini menggunakan teknik yang dikembangkan oleh *Rensis Likert* atau biasa disebut dengan Model Skala *Likert*, yang memuat 4 (empat) pilihan jawaban, yaitu (SS) = Sangat Setuju, (S) = Setuju, (KS) = Kurang Setuju, dan (TB) = Tidak Setuju, dengan skor tertinggi 4 dan skor terendah 1. Panduan wawancara disusun menggunakan pertanyaan yang digunakan untuk menggali informasi terkait dengan indikator setiap variabel. Adapun panduan dokumentasi disusun berdasarkan dokumen apa saja yang hendak digali terkait dengan variabel penelitian. Untuk memudahkan penyusunan instrumen penelitian maka diperlukan kisi-kisi instrumen penelitian seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Angket

Variabel	Indikator	No. Item	Sumber Data
Kemandirian sekolah	Kewenangan dalam pengembangan kurikulum dan program pembelajaran	1,2,3,4,5,6,7,8,9	Kepala sekolah, waka ketenagaan, waka kurikulum, waka kesiswaan, waka sarana dan prasarana sekolah, waka humas, dan guru sebanyak 98 responden
	Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan	10 - 22	
	Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah	13 – 43	
	Pemenuhan pembiayaan	44 – 50	
Kerjasama sekolah	Kerjasama internal	1,2,3,4,5	
	Kerjasama eksternal	6,7,8,9,10,11,12	
Bentuk partitipasi	Dukungan dana	1,2,3	
	Dukungan material/fasilitas	4,5,6	
	Dukungan pemikiran	7,8,9	
	Dukungan tenaga	10,11,12	
Keterrbukaan sekolah	Keterlibatan warga sekolah dan komite sekolah	1,2,3,4	
	Kemudahan mengkases informasi	5,6,7,8	
Akuntabilitas sekolah	Pelaporan	1,2	
	Pertemuan	3,4	
	Kepuasan warga sekolah dan komite sekolah	5,6	

Tabel 4. Kisi-Kisi Instrumen Wawancara

Variabel	Indikator	No. Item	Sumber Data
Kemandirian sekolah	Kewenangan dalam pengembangan kurikulum dan program pembelajaran	1,2,3,4,5,6	Waka kurikulum
	Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan	7,8	Waka ketenagaan
	Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah	9,10	Waka sarana praasarana
	Pemenuhan pembiayaan	11,12,13,14	Waka ketenagaan dan bendahara
Kerjasama sekolah	Kerjasama internal	1	Waka humas
	Kerjasama eksternal	2 - 10	
Bentuk partitipasi	Dukungan dana	1,2,3	Waka humas dan komite sekolah
	Dukungan material/fasilitas	4,5,6	
	Dukungan pemikiran	7,8,9	
	Dukungan tenaga	10,11,12	
Keterrbukaan sekolah	Keterlibatan warga sekolah dan komite sekolah	1,2	Waka ketenagaan
	Kemudahan mengkases informasi	3,4,5	
Akuntabilitas sekolah	Pelaporan	1,2	Waka ketenagaan
	Pertemuan	3	
	Kepuasan warga sekolah dan komite sekolah	4	

Tabel 5. Kisi-Kisi Instrumen Dokumentasi

Variabel	Indikator	Sumber Data
Kemandirian sekolah	Kewenangan dalam pengembangan kurikulum dan program pembelajaran	Dokumen kurikulum/Buku I KTSP, silabus, RPP, lembar penilaian
	Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan	Data Pokok PSMK 2010, data guru dan karyawan,
	Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah	Data Pokok PSMK 2010, data sarana dan prasarana
	Pemenuhan pembiayaan	Data Pokok PSMK 2010, RAPBS
Kerjasama sekolah	Kerjasama internal	Surat perjanjian kerjasama (MoU), laporan kegiatan
	Kerjasama eksternal	
Bentuk partitipasi	Dukungan dana	Surat keputusan pengurus komite sekolah, laporan kegiatan
	Dukungan material/fasilitas	
	Dukungan pemikiran	
	Dukungan tenaga	
Keterrbukaan sekolah	Keterlibatan warga sekolah dan komite sekolah	Laporan kegiatan, papan pengumuman, website sekolah
	Kemudahan mengakses informasi	
Akuntabilitas sekolah	Pelaporan	Laporan program kegiatan dan keuangan, papan pengumuman, website sekolah
	Pertemuan	
	Kepuasan warga sekolah dan komite sekolah	

2. Uji Instrumen

Instrumen (berupa angket, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi) yang baik akan memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang valid, akurat dan dapat dipercaya. Instrumen penelitian akan diuji kelayakannya sebelum digunakan atau disebarkan kepada responden. Persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh suatu instrumen penelitian yaitu validitas dan reliabilitas.

Validitas berkenaan dengan ketepatan alat ukur terhadap konsep yang diukur, sehingga betul-betul mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara

tepat. Hal ini dipertegas oleh Sugiyono (2009: 173) yang menyatakan bahwa valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

Reliabilitas berkenaan dengan tingkat keajegan atau ketetapan hasil pengukuran. Sehubungan dengan reliabilitas, Suharsimi (2008: 87) menyatakan bahwa validitas lebih penting dan reliabilitas ini perlu, sebuah tes mungkin reliabel tetapi tidak valid, namun sebuah tes yang valid biasanya reliabel. Dengan berpedoman pemahaman tersebut, maka instrumen yang digunakan setelah diuji validitasnya dapat dikatakan valid dan reliabel.

Uji Validitas instrumen dilakukan dengan dua tahap yaitu dengan validitas konstrak (*construct validity*) dan validitas isi (*content validity*). Dalam validitas konstrak, instrumen dikonstruksi tentang indikator-indikator yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu. Validitas isi berkenaan dengan kesanggupan instrumen mengukur isi yang harus diukur. Uji validitas instrumen dilakukan dengan uji validitas konstrak dan isi, dengan alasan bahwa instrumen yang digunakan berbentuk non-tes. Alasan ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2009: 176), bahwa instrumen yang berbentuk non-tes cukup memenuhi validitas konstrak.

Uji validitas isi dan konstrak dilakukan dengan melakukan konsultasi kepada pembimbing dan para ahli (*judgement experts*) tentang butir-butir instrumen yang telah dibuat, untuk mendapatkan penilaian

apakah maksud dari kalimat dalam instrumen dapat dipahami oleh responden dan butir-butir tersebut dapat menggambarkan indikator-indikator variabel yang diteliti, sehingga instrumen valid dan dapat menjangkau data yang dibutuhkan. Berdasarkan uraian ini, maka instrumen penelitian ini dilakukan uji validitas konstruk dan isi dengan mengkonsultasikannya kepada para ahli (*Judgment Expert*) dalam bidang pendidikan, yaitu Dosen Kependidikan Teknik Otomotif FT UNY sebanyak 2 (dua) orang dan kepala sekolah SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan lanjutan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Data hasil penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil langsung dari responden, yaitu data angket dan wawancara, sedangkan data sekunder bersumber dari berbagai dokumen yang ada di sekolah.

Kegiatan analisis data meliputi: mengelompokkan data berdasarkan variabel, mentabulasikan data, melakukan perhitungan dan menyajikan data untuk menjawab rumusan masalah. Sesuai dengan bentuk penelitian ini yang menggunakan metode deskriptif maka analisis data angket menggunakan statistik deskriptif. Data hasil wawancara digunakan untuk membantu memperjelas data angket berupa kalimat narasi. Sedangkan data hasil dokumentasi adalah sebagai data pendukung/pembuktian dalam menjelaskan data utama.

1. Analisis data angket

Data yang dihasilkan dari angket adalah data interval. Penentuan skala pengkategorian data interval bersifat relatif, sehingga peneliti boleh menetapkan secara subyektif luasnya interval yang mencakup setiap kategori yang diinginkan selama penetapan tersebut berada dalam batas kewajaran dan dapat diterima akal (Saifuddin Azwar, 2008: 108). Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan menghitung *mean* (rerata) dan persentase. Dari perhitungan rerata skor yang diperoleh dapat diidentifikasi tingkat kecenderungan variabel penelitian berdasarkan pengkategorian kecenderungan dengan menggunakan kriteria pembanding rerata skor ideal (Anas Sudijono, 2009: 176). Adapun pengkategorian tersebut sebagai berikut:

Skor $(x) \geq M_i + 1,5 SD_i$ = Sangat Baik

$M_i + 0,5 SD_i$ s/d $M_i + 1,49 SD_i$ = Baik

$Mi - 0,49 SDi \leq Mi + 0,49 SDi$ = Cukup Baik

$Mi - 1,49 SDi \leq Mi - 0,5 SDi$ = Kurang Baik

$Skor \leq Mi - 1,5 SDi$ = Tidak baik

Dimana:

Mi (Rerata ideal) : $\frac{1}{2}$ (skor maksimal ideal + skor minimal ideal)

SDi (Standar deviasi ideal): $\frac{1}{6}$ (skor maksimal ideal - skor minimal ideal)

Selanjutnya dilakukan persentase terhadap skor yang diperoleh untuk memudahkan dalam menginterpretasikan data penelitian. Data ini disajikan dalam bentuk distribusi tabel frekuensi dan digram pie berdasarkan perhitungan persentase. Perhitungan persentase dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Ps = \frac{f}{p} 100\%$$

Dimana :

Ps : Persentase skor

f : frekuensi

p : jumlah populasi

2. Analisis data wawancara

Data wawancara merupakan data yang berupa kalimat-kalimat (data kualitatif) dimana data tersebut akan mendukung/memperjelas data yang diperoleh dari angket. Informasi yang terkumpul melalui wawancara bisa jadi sangat kompleks dan campur aduk, sehingga tidak mungkin disajikan apa adanya. Oleh karena itu data harus dianalisis dengan tiga alur

kegiatan yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion/verification*) seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugyono, 2009, 337).

a. Reduksi data

Data yang telah dikumpulkan umumnya berbentuk catatan lapangan dan belum tersusun secara baik sehingga akan sulit dianalisis jika tidak direduksi. Reduksi data diperlukan karena banyaknya data dari masing-masing *informan* yang dianggap tidak relevan dengan fokus penelitian, sehingga perlu dibuang atau dikurangi. Selanjutnya proses reduksi data dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Data wawancara yang panjang lebar menjadi data sederhana yang mengandung inti wawancara, kesimpulan dari hasil wawancara ditulis pada transkrip hasil wawancara.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data disajikan secara naratif yang fungsinya untuk menjelaskan, meringkas, menyederhanakan data yang kompleks agar data menjadi lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dengan demikian akan lebih memungkinkan bagi peneliti untuk menarik kesimpulan.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti mengadakan wawancara dengan

mengajukan pertanyaan pada para informan sesuai dengan pedoman wawancara. Informasi ini kemudian dicatat dan dipilih sesuai dengan fokus penelitian untuk ditarik menjadi kesimpulan.

3. Analisis data dokumen

Pengambilan data dengan teknik dokumentasi disebut dengan studi dokumen, artinya peneliti mempelajari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan pokok penelitian sebagai pelengkap hasil angket dan wawancara. Alasannya, hasil penelitian dari angket dan wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen terkait. Apabila ada perbedaan antara data angket maupun data wawancara maka yang akan dipakai adalah data dokumen karena lebih dapat dipercaya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Data penelitian diperoleh dari hasil angket, wawancara, dan diperkuat dengan dokumentasi yang dilakukan di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Subjek penelitian data angket terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru yang berjumlah 98 responden. Sedangkan subjek penelitian yang diwawancarai dan dimintai data dokumen yaitu, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang ketenagaan, wakil kepala sekolah hubungan masyarakat (humas), wakil kepala sekolah sarana prasarana, bendahara, kepala tata usaha dan komite sekolah. Data yang diambil merupakan informasi yang berkaitan dengan implementasi MBS di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang meliputi kemandirian, kerjasama, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas sekolah. Berikut ini deskripsi data hasil penelitian.

Tabel 6. Jumlah Skor Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

No	Variabel	Jumlah Item	Skor Min	Skor Maks	Skor
1	Kemandirian Sekolah	50	4.900	19.600	14.751
2	Kerjasama Sekolah	12	1.176	4.704	3.496
3	Bentuk Partisipasi	12	1.176	4.704	3.528
4	Keterbukaan Sekolah	8	784	3.136	2.456
5	Akuntabilitas Sekolah	6	588	2.352	1.753
Impelementasi MBS secara keseluruhan		88	8.624	34.496	25.984

Berdasarkan data Tabel 5, maka rata-rata ideal (Mi) dan standar deviasi ideal (sdi) dapat dihitung. Selanjutnya dibuat kategori penilaian masing-masing variabel sesuai dengan rumus pada bab III. Berikut ini hasil pengkategorian.

Tabel 7. Kategori Penilaian Jumlah Skor Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

No	Variabel	Rentang Nilai	Skor	Kategori
1	Kemandirian Sekolah	$x \geq 15.925$ = Sangat Baik $13.475 \text{ s/d } 15.901$ = Baik $11.049,5 \text{ s/d } 13.451$ = Cukup Baik $8.600 \text{ s/d } 11.025$ = Kurang Baik $x \leq 8.575$ = Tidak Baik	14.751	Baik
2	Kerjasama Sekolah	$x \geq 3.822$ = Sangat Baik $3.234 \text{ s/d } 3.816$ = Baik $2.652 \text{ s/d } 3.228$ = Cukup Baik $2.064 \text{ s/d } 2.646$ = Kurang Baik $x \leq 2.058$ = Tidak Baik	3.496	Baik
3	Bentuk Partisipasi	$x \geq 3.822$ = Sangat Baik $3.234 \text{ s/d } 3.816$ = Baik $2.652 \text{ s/d } 3.228$ = Cukup Baik $2.064 \text{ s/d } 2.646$ = Kurang Baik $x \leq 2.058$ = Tidak Baik	3.528	Baik
4	Keterbukaan Sekolah	$x \geq 2.548$ = Sangat Baik $2.156 \text{ s/d } 2.544$ = Baik $1.768 \text{ s/d } 2.152$ = Cukup Baik $1.376 \text{ s/d } 1.764$ = Kurang Baik $x \leq 1.372$ = Tidak Baik	2.456	Baik
5	Akuntabilitas Sekolah	$x \geq 1.911$ = Sangat Baik $1.617 \text{ s/d } 1.908$ = Baik $1.326 \text{ s/d } 1.614$ = Cukup Baik $1.032 \text{ s/d } 1.323$ = Kurang Baik $x \leq 1.029$ = Tidak Baik	1.753	Baik
Impelementasi MBS		$x \geq 28.028$ = Sangat Baik $13.475 \text{ s/d } 27.985$ = Baik $19.447 \text{ s/d } 23.716$ = Cukup Baik $15.135 \text{ s/d } 19.404$ = Kurang Baik $x \leq 15.092$ = Tidak Baik	25.984	Baik

Dari data Tabel 7 dapat diketahui perolehan jumlah skor implementasi manajemen berbasis sekolah pada kategori baik. Perolehan skor ini berasal dari perolehan jumlah skor tiap variabel. Variabel kemandirian sekolah, kerjasama sekolah, bentuk partisipasi, keterbukaan sekolah, dan akuntabilitas sekolah semuanya pada kategori baik. Berdasarkan hasil data ini maka dapat disimpulkan bahwa implelementasi manajemen berbasis sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dikategorikan baik. Untuk lebih jelasnya, berikut ini disajikan deskripsi data tiap variabel penelitian.

1. Deskripsi Data Kemandirian Sekolah

Kemandirian sekolah merupakan kewenangan sekolah dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kemandirian sekolah terlihat dari terpenuhinya kebutuhan sumber daya sekolah sesuai dengan tuntutan program. Kemandirian sekolah diukur melalui empat indikiator, yaitu: kewenangan sekolah dalam pengembangan kurikulum dan program pembelajaran, Pemenuhan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, pemenuhan sarana dan prasarana sekolah, dan pemenuhan pembiyaan/dana sekolah.

a. Kewenangan sekolah dalam pengembangan kurikulum dan program pembelajaran

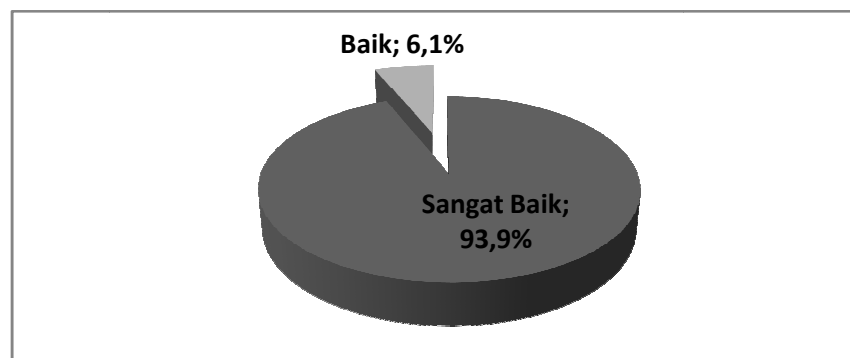
Pada indikator ini digunakan untuk mengetahui kemandirian sekolah dalam pengembangan dokumen Buku I KTSP, pengembangan silabus, pengembangan RPP, persiapan proses belajar mengajar, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan mekanisme penilaian hasil belajar. Data ini diperoleh melalui penyebaran angket dan wawancara

langsung dengan responden yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang didukung oleh dokumen terkait.

Data yang diperoleh dari angket terdiri dari 9 butir pertanyaan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh skor $M_i = 22,5$ dan $SD_i = 4,5$. Pengkategorian distribusi skor kewenangan sekolah dalam pengelolaan kurikulum dan program pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Kategori Skor Kewenangan Sekolah dalam Pengembangan Kurikulum dan Program Pembelajaran

No	Rentang Skor	Kategori	Frekuensi (F)	F (%)
1	$x \geq 29,3$	Sangat baik	92	93,9
2	24,8 s/d 29,2	Baik	6	6,1
3	20,3 s/d 24,7	Cukup baik	0	0,0
4	15,8 s/d 20,5	Kurang baik	0	0,0
5	$x \leq 15,7$	Tidak baik	0	0,0



Gambar 2. Diagram Pie Kewenangan Sekolah dalam Pengembangan Kurikulum dan Program Pembelajaran

Dari Gambar 2 diagram pie di atas diketahui bahwa kewenangan sekolah dalam pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran menurut 93,9% responden pada kategori sangat baik dan menurut 6,1% responden kategori baik. Melihat hal ini maka dapat disimpulkan bahwa

bahwa kewenangan sekolah dalam pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran dikategorikan sangat baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah bagian kurikulum dan disertai dengan dokumen terkait diperoleh informasi bahwa sekolah telah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 2006/2007. Kurikulum ini disusun melalui rapat kerja sekolah yang diikuti oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, guru mata pelajaran normative, adaptif, dan produktif serta pengurus komite sekolah. Pengembangan kurikulum ini mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Standar Kompetensi Kerja (SKKNI/SKK), Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Permendiknas No. 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan SI dan SKL.

Pengembangan dokumen Buku I KTSP di SMK Muhammadiyah 3 dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran dan komite sekolah. Dokumen kurikulum Buku I KTSP ini memuat tujuan pendidikan menengah kejuruan, visi dan misi sekolah, tujuan sekolah, tujuan program keahlian, standar kompetensi, diagram pencapaian kompetensi, struktur kurikulum program keahlian, dan kalender pendidikan. Masing-masing program keahlian memiliki dokumen kurikulum sendiri-sendiri, sehingga di

SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta memiliki enam dokumen kurikulum KTSP. Dokumen kurikulum tersebut meliputi kurikulum KTSP program keahlian teknik gambar bangunan, kurikulum KTSP program keahlian teknik instalasi tenaga listrik, kurikulum KTSP program keahlian teknik permesinan, kurikulum KTSP teknik kendaraan ringan, kurikulum KTSP teknik audio-video, dan kurikulum KTSP teknik komputer & jaringan.

Pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dilakukan oleh masing-masing guru mata pelajaran dan MGMP sekolah dengan koordinasi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Pengembangan silabus dan RPP yang disusun oleh para guru dilakukan pada awal tahun ajaran baru. Pengembangan silabus mengacu pada buku pedoman pengembangan silabus dari Depdiknas Tahun 2006. Guru mengembangkan silabus berdasarkan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan panduan pengembangan KTSP secara mandiri.

Persiapan pembelajaran oleh para guru dilakukan dengan menyiapkan perangkat pembelajaran yang meliputi silabus dan RPP. Persiapan perangkat pembelajaran ini berupa buku administrasi guru yang dibuat oleh setiap guru sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Pada pelaksanaan proses pembelajaran guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang meliputi metode ceramah, diskusi, tanya jawab, tugas

belajar, demonstrasi, dan latihan karena mempermudah dan mempercepat proses pembelajaran sehingga waktu yang digunakan lebih efektif dan efisien, serta mudah siswa dalam melakukan praktek dan memahami kompetensi yang diberikan. Selain itu, guru juga melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan fasilitas, media pembelajaran, dan alat bantu yang tersedia secara efektif dan efisien dengan menggunakan papan tulis, LCD proyektor, *training object*, bahkan ada beberapa mata pelajaran yang sudah menerapkan *e-learning* yang bahan ajarnya dapat dilihat atau diunduh di website sekolah.

Pada penilaian hasil belajar, guru menyusun instrumen evaluasi hasil belajar dan melaksanakan evaluasi hasil belajar setiap kegiatan pembelajaran (ulangan harian) secara mandiri sesuai dengan teknik dan metode penilaian kompetensi mata pelajaran. Guru juga menyusun instrumen evaluasi hasil belajar akhir semester/akhir tahun ajaran secara mandiri dan keterlaksanaan kegiatan penilaian/evaluasi hasil belajar akhir semester/akhir tahun ajaran yang dilaksanakan oleh sekolah berlangsung dengan baik. Adapun teknik penilaian yang digunakan yaitu berupa soal pilihan ganda, essay, dan ujian praktek

b. Pemenuhan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan

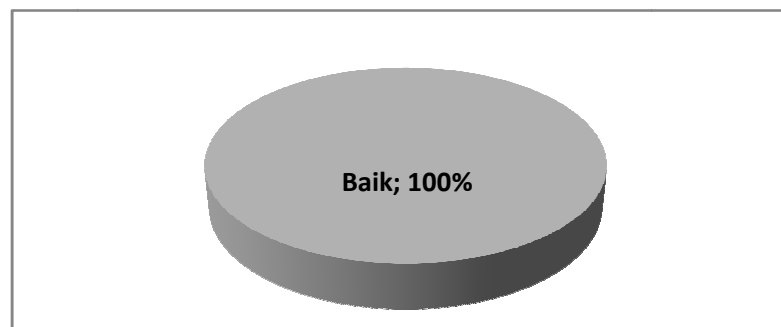
Pada indikator ini untuk mengetahui pemenuhan jumlah pendidik, kualifikasi akademik, dan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Data ini diperoleh melalui penyebaran angket dan wawancara langsung dengan responden yaitu

wakil kepala sekolah bidang ketenagaan yang didukung oleh dokumen terkait.

Data yang diperoleh dari angket terdiri dari 13 butir pertanyaan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh skor $M_i = 32,5$ dan $SD_i = 6,5$. Pengkategorian distribusi skor kewenangan sekolah dalam pengelolaan kurikulum dan pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Kategori Skor Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Rentang Skor	Kategori	Frekuensi (F)	F (%)
1	$x \geq 42,3$	Sangat baik	0	0
2	35,8 s/d 42,2	Baik	98	100
3	29,3 s/d 35,7	Cukup baik	0	0
4	22,8 s/d 29,2	Kurang baik	0	0
5	$x \leq 22,7$	Tidak baik	0	0



Gambar 3. Diagram Pie Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Berdasarkan Gambar 3 diketahui bahwa pemenuhan kebutuhan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan menurut 100% responden pada kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemenuhan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan dikategorikan baik.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden dengan didukung dokumen Data Pokok PSMK 2010 SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta, pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi jumlah, kualifikasi, dan kompetensi dapat dijelaskan sebagai berikut. Pendidik di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta berjumlah 102 guru, terdiri dari 25 guru PNS dan 77 guru non PNS. Sedangkan tenaga kependidikannya berjumlah 36 orang, dengan status kepegawaian non PNS. Jumlah keseluruhan pendidik dan tenaga kependidikan di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta adalah 138 orang.

Untuk kualifikasi pendidik di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dapat dirincikan sebagai berikut: guru program adaptif dengan kualifikasi S1 sebanyak 14 orang dan D III sebanyak 3 orang. Guru program normatif dengan kualifikasi S1 sebanyak 27 orang dan S2 sebanyak 1 orang. Sedangkan untuk guru program produktif dengan kualifikasi S1 sebanyak 42 orang dan S2 sebanyak 5 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Pendidik (Guru) SMK Muhammdiyah 3 Yogyakarta

Nama Mata Diklat/Pelajaran	Total	Pendidikan			Lulus Sertifikasi Profesi	Kebutuhan ideal
		Dip	S1/D4	S2		
ADAPTIF						
Matematika	7		7		1	7
Bahasa Inggris	8	1	7			8
KKPI	3	2	1			3
Kewirausahaan	3		3			3
Fisika	3		3		1	3
Kimia	3		3			3
NORMATIF						
Pendidikan Agama	10		9	1	4	10
PKn & Sejarah	5		5			5
Bahasa Indonesia	4		4		3	4
Pendidikan Jasmani & Olahraga	3		3		2	3
Seni & Budaya	1		1			1
Muatan Lokal	1		1			1
BK/BP	4		4		3	4
PRODUKTIF						
Teknik Gambar Bangunan	7	2	5		3	7
Teknik Instalasi Tenaga Listrik	3		2	1	1	3
Teknik Pemesinan	15		14	1	5	15
Teknik Kendaraan Ringan	12		11	1	1	12
Teknik Audio-Video	5	1	4		2	5
Teknik Komputer Dan Jaringan	5		4	1		5
Total	102	6	91	5	26	102

Tenaga kependidikan/karyawan di SMK Muhammadiyah 3 berjumlah 25 orang, terdiri dari pegawai tetap (PT) sebanyak 5 orang dan pegawai tidak tetap (PTT) sebanyak 31 orang. Dengan kualifikasi pendidikan SLTA sebanyak 30 orang, DIII sebanyak 3 orang, dan kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 3 orang. Masing-masing tenaga kependidikan bekerja sesuai dengan bidang pendidikannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Tenaga Kependidikan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta

Tenaga Kependidikan/ Karyawan	Total	Pendidikan			Kebutuhan Pegawai	
		SLTA	Dip	S1/D4	Ideal	Kurang
Kepala Tata Usaha	1		1		1	
Tenaga Teknis Keuangan	4	2	1	1	4	
Tenaga Perpustakaan	1		1		1	
Tenaga Laboratorium						
Tenaga Teknik Praktek Kejuruan	10	10			10	
Pesuruh/Penjaga Sekolah	14	13		1	14	
Tenaga Administrasi Lainnya	6	5		1	6	
Total	36	30	3	3	36	

Pada kompetensi pedagogik, guru mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Untuk kompetensi kepribadian, guru memiliki integritas kepribadian dan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pada kompetensi sosial, guru mampu berkomunikasi secara efektif dan santun dengan sesama guru, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat. Adapun pada kompetensi professional, guru menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.

Kompetensi karyawan terlihat dari tenaga perpustakaan yang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan sumber belajar di perpustakaan. Tenaga laboratorium/ tenaga teknik praktek kejuruan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran. Tenaga administrasi mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pelayanan administratif. Tenaga pesuruh dalam hal ini tenaga

kebersihan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan kebersihan lingkungan sekolah.

Peningkatan mutu SDM guru dan karyawan dilakukan dengan mengirimkan guru magang ke dunia usaha/industri dan diklat, mengikutsertakan karyawan diklat, mengadakan *In House Training* (IHT) di sekolah, memberikan kesempatan kepada guru untuk melanjutkan studi Akta IV atau S1, S2, dan S3, mengikuti seminar, maupun menjadi anggota MGMP antar sekolah. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan terjadi peningkatan kemampuan atau kompetensi guru dan karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya di sekolah.

c. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah

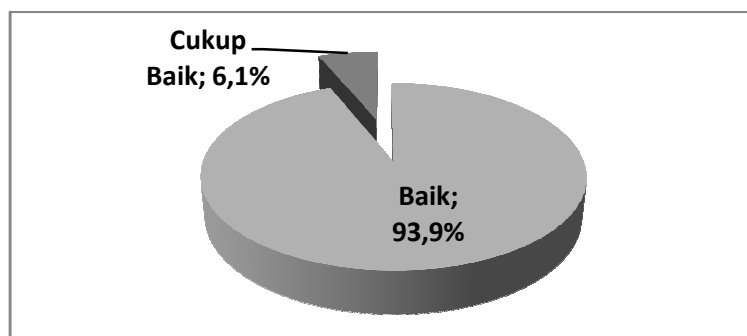
Pada indikator ini digunakan untuk mengetahui pemenuhan sarana dan prasarana sekolah yang meliputi bangunan sekolah, kelompok ruang pembelajaran umum, kelompok ruang penunjang, kelompok ruang khusus (ruang praktek), dan program pengembangan sarana prasarana sekolah. Data ini diperoleh melalui penyebaran angket dan wawancara langsung dengan responden yaitu wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana sekolah yang didukung oleh dokumen terkait.

Data yang diperoleh dari angket terdiri dari 21 butir pertanyaan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh skor $M_i = 52,5$ dan $SD_i = 10,5$. Pengkategorian distribusi skor kewenangan sekolah dalam

pengelolaan kurikulum dan pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12. Kategori Skor Pemenuhan Sarana Prasarana Sekolah

No	Rentang Skor	Kategori	Frekuensi (F)	F (%)
1	$x \geq 68,3$	Sangat baik	0	0,0
2	57,8 s/d 68,2	Baik	92	93,9
3	47,4 s/d 57,7	Cukup baik	6	6,1
4	36,9 s/d 47,3	Kurang baik	0	0,0
5	$x \leq 36,8$	Tidak baik	0	0,0



Gambar 4. Diagram Pie Pemenuhan Sarana Prasarana Sekolah

Dari Gambar 4 di atas diketahui bahwa pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sekolah menurut 93,9% responden pada kategori baik dan kategori cukup baik 6,1% responden. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa pemenuhan sarana prasarana sekolah dikategorikan baik.

Menurut hasil wawancara terhadap responden dengan didukung dokumen Data Pokok PSMK 2010 SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta serta hasil pengamatan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut. SMK muhammadiyah 3 Yogyakarta memiliki lahan seluas 21.810 m² yang meliputi luas lahan bangunan 9010 m², luas taman 800m², luas lapangan olah raga 2500 m², luas

lahan praktek 2000 m², dan luas lahan lainnya 7500 m². Status kepemilikan lahan ini merupakan milik sendiri yayasan muhammadiyah.

Bangunan sekolah berada di lokasi yang aman dan nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara serta memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan. Bangunan sekolah juga memiliki sanitas di dalam dan di luar bangunan yang dapat memenuhi kebutuhan air bersih, saluran air kotor atau air limbah, dan tempat sampah. Kenyamanan bangunan sekolah juga terlihat dari adanya ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai di setiap bangunan. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung proses pendidikan selain keberadaan lahan bangunan juga ditunjang oleh ketersediaan ruang pembelajaran umum, ruang khusus (praktek), dan ruang penunjang sekolah seperti yagn terlihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Pemenuhan Ruang Pembelajaran Umum

Nama Ruang/ Area Kerja	Saat Ini		Kebutuhan Ruang	
	Jml Ruang	Luas (m ²)	Jml Ruang	Luas (m ²)
Ruang kelas	31	72	36	72
Ruang lab.fisika	1	72	2	72
Ruang lab. kimia	1	72	2	72
Ruang lab. bahasa	2	60	2	60
Ruang lab. komputer	2	72	3	72
Ruang lab. multimedia	1	72	2	72
Ruang praktek gambar teknik	1	72	2	72
Perpustakaan konvensional	1	225	1	225
Perpustakaan Multimedia	-	-	1	72
Total	40	717	51	789

Sekolah memiliki 40 ruang pembelajaran umum yang meliputi 31 ruang kelas, 7 ruang laboratorium (fisika, kimia, bahasa, komputer, multimedia), 1 ruang praktek gambar teknik, dan 1 ruang perpustakaan konvensional. Sedangkan untuk perpustakaan multimedia sekolah belum memilikinya, dan masih ada beberapa ruangan yang masih kurang seperti terlihat pada tabel di atas. Secara keseluruhan kebutuhan ruang pembelajaran umum adalah 51 ruang, namun yang ada di sekolah sebanyak 40 ruang, sehingga pemenuhan ruang pembelajaran umum di sekolah mencapai 78,4%.

Tabel 14. Pemenuhan Ruang Khusus (Praktek)

Nama Ruang/ Area Kerja	Saat Ini		Kebutuhan Ruang	
	Jml Ruang	Luas (m ²)	Jml Ruang	Luas (m ²)
Teknik gambar bangunan	3	72	4	72
Teknik instalasi tenaga listrik	2	72	3	72
Teknik pemesian	3	225	3	225
Teknik kendaraan ringan	3	150	4	150
Teknik audio-video	3	72	3	72
Teknik komputer & jaringan	4	72	5	72
Total	18	663	22	663

Untuk ruang khusus (praktek) sekolah memiliki sebanyak 18 ruang praktek yang meliputi 3 ruang praktek teknik gambar bangunan, 2 ruang praktek teknik instalasi tenaga listrik, 3 ruang praktek teknik permesinan, 3 ruang praktek teknik kendaraan ringan, 3 ruang praktek teknik audio-video, dan 4 ruang praktek teknik computer dan jaringan. Masih ada beberapa ruang praktek yang kurang dari kebutuhan, diantaranya ruang praktek teknik gambar bangunan, ruang praktek

teknik instalasi tenaga listrik, ruang praktek teknik kendaraan ringan, dan ruang praktek teknik komputer & jaringan. Secara keseluruhan kebutuhan ruang khusus (praktek) adalah 22 ruang, namun yang ada di sekolah sebanyak 18 ruang, sehingga pemenuhan ruang khusus (praktek) di sekolah mencapai 81,8%.

Tabel 15. Pemenuhan Ruang Penunjang Sekolah

Nama Ruang/ Area Kerja	Saat Ini		Kebutuhan Ruang	
	Jml Ruang	Luas (m2)	Jml Ruang	Luas (m2)
Ruang kepala sekolah & wakil	1	120	1	120
Ruang guru	1	144	1	144
Ruang pelayanan administrasi	1	104	1	104
BP/BK	1	72	1	72
Ruang OSIS	1	20	1	20
Ruang pramuka	1	20	1	20
Koperasi	1	40	1	40
UKS	1	25	2	25
Ruang ibadah	1	450	1	450
Ruang bersama (aula)	1	160	1	160
Ruang kantin sekolah	1	180	1	180
Ruang toilet	5	24	10	24
Ruang gudang	1	40	2	40
Ruang penjaga sekolah	1	12	2	40
Ruang unit produksi	1	40	1	40
Total	20	1491	28	1519

Sekolah memiliki 20 ruang penunjang yang meliputi ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang pelayanan administrasi dan lainnya seperti yang terlihat pada tabel di atas. Sebagian besar kebutuhan ruang penunjang sekolah sudah terpenuhi, hanya sedikit ruangan yang masih kurang yaitu ruang UKS, gudang, ruang penjaga sekolah, dan toilet. Secara keseluruhan kebutuhan ruang penunjang sekolah

sebanyak 28 ruang, namun yang ada di sekolah sebanyak 20 ruang, sehingga pemenuhan ruang penunjang sekolah mencapai 71,4%.

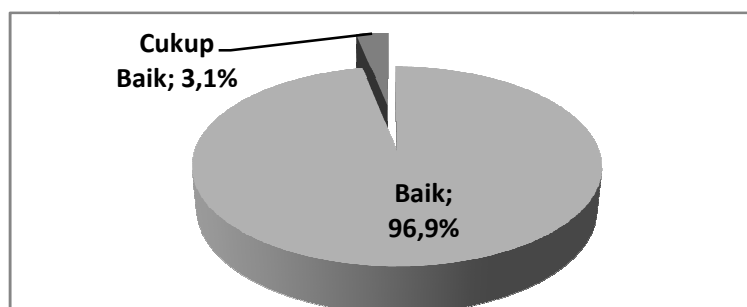
d. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan/dana sekolah

Kemandirian sekolah dilihat dari pemenuhan kebutuhan pembiayaan/dana sekolah digunakan untuk mengetahui perolehan sumber dana sekolah dan upaya sekolah untuk mendapatkan dana. Data ini diperoleh melalui penyebaran angket dan wawancara langsung dengan responden yaitu wakil kepala sekolah bidang ketenagaan dan bendahara yang didukung oleh dokumen terkait.

Data yang diperoleh dari angket terdiri dari 7 butir pertanyaan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh skor $M_i = 17,5$ dan $SD_i = 3,5$. Pengkategorian distribusi skor kewenangan sekolah dalam pengelolaan kurikulum dan pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16. Kategori Skor Pemenuhan Pembiayaan/Dana Sekolah

No	Rentang Skor	Kategori	Frekuensi (F)	F (%)
1	$x \geq 22,8$	Sangat baik	0	0
2	19,3 s/d 22,7	Baik	95	96,9
3	15,8 s/d 19,2	Cukup baik	3	3,1
4	12,3 s/d 15,7	Kurang baik	0	0,0
5	$x \leq 12,2$	Tidak baik	0	0,0



Gambar 5. Diagram Pie Pemenuhan Pembiayaan/Dana Sekolah

Berdasarkan Gambar 5 diketahui bahwa pemenuhan kebutuhan pembiayaan/dana sekolah menurut 96,9% responden pada kategori baik dan kategori cukup baik 3,1% responden. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan pembiayaan/dana sekolah dikategorikan baik.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden dengan didukung dokumen RAPBS SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 2009/2010 dan Data Pokok PSMK 2010 SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta, perolehan sumber dana sekolah berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, komite sekolah, orang tua siswa dan amal usaha sekolah. Sumber dana sekolah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17. Sumber Dana Sekolah

No	Sumber Dana	Jenis	Jumlah (Rp)
1	Pemerintah pusat	RSBI	700.000.000
		RKK	75.000.000
		<i>School Business Center (SBC)</i>	400.000.000
2	Pemerintah provinsi	BOMM	190.080.000
		Beasiswa Siswa Miskin (SMK)/BKM	186.420.000
		Beasiswa RAPUS	19.200.000
		Beasiswa RETRIEVAL	2.400.000
3	Komite sekolah	Dana pendamping RSBI	199.000.000
		Dana penamping RKK	15.000.000
		Dana pendamping SBC	40.000.000
		Dana Pendamping BOMM	250.000.000
4	Orang tua siswa	Uang pendaftaran	20.064.000
		Uang pendidikan	6.148.106.000
5	Sekolah	Amal usaha/unit produksi	20.000.000

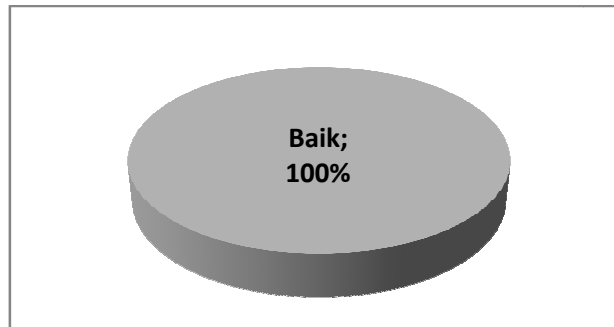
Upaya yang dilakukan sekolah dalam penggalan dana selain mengandalkan bantuan dari pemerintah yaitu melalui melalui unit

produksi dan jasa (UPJ) sekolah. Unit produksi sekolah tersebut diantaranya warnet dan fotocopy, jual beli computer dan peripheral, setir mobil, bengkel mobil dan motor, bengkel las dan bubut, service TV dan audia, instalasi listrik rumah tangga dan industry, serta konsultan bangunan dan gambar rencana bangunan. Sekolah mampu mengoptimasikan potensi sumber daya sekolah (SDM, sarpras, lingkungan fisik dan lainnya) dan masyarakat sekitarnya untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Namun, sekolah belum mampu menjalin kerjasama dengan perusahaan sekitar atau pihak lain untuk membantu dana pendidikan melalui beasiswa atau lainnya

Selanjutnya variabel kemandirian sekolah dianalisis secara keseluruhan. Pada variabel ini terdapat 50 butir item pertanyaan dan berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh data skor $M_i = 125$ dan $SD_i = 25$. Hasil perhitungan angket menunjukkan bahwa kemandirian sekolah menurut 100% responden pada kategori baik. Pengkategorian variabel kemandirian sekolah dapat dilihat pada tabel dan diagram pie di bawah.

Tabel 18. Kategori Skor Kemandirian Sekolah

No	Rentang skor	Kategori	Frekuensi (F)	F (%)
1	$x \geq 162,5$	Sangat baik	0	0
2	137,5 s/d 162,3	Baik	98	100
3	112,8 s/d 137,3	Cukup baik	0	0
4	87,8 s/d 112,5	Kurang baik	0	0
5	$x \leq 87,5$	Tidak baik	0	0



Gambar 6. Diagram Pie Kemandirian Sekolah

2. Deskripsi Data Kerjasama Sekolah

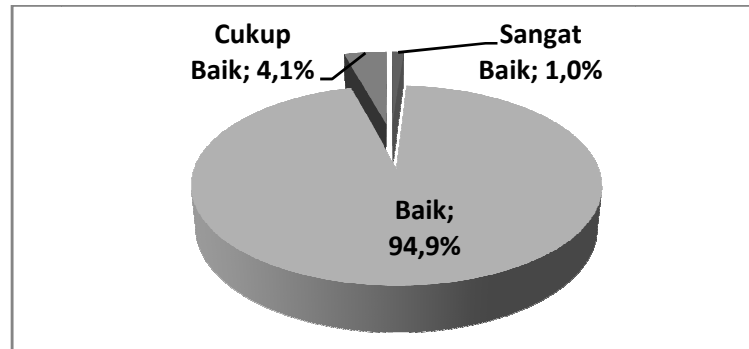
Pada variabel ini indikator yang diukur adalah kerjasama antar warga sekolah (kerjasama internal) dan kerjasama antara sekolah dengan pihak terkait yang relevan luar sekolah (kerjasama eksternal). Data ini diperoleh melalui penyebaran angket dan wawancara langsung dengan responden yaitu wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat (humas) yang didukung oleh dokumen terkait. Berikut ini deskripsi data hasil penelitiannya.

a. Kerjasama internal

Pada indikator ini ditujukan untuk mengetahui iklim kerjasama atau hubungan antar warga sekolah dalam pelaksanaan program sekolah. Data yang diperoleh dari angket terdiri dari 5 butir pertanyaan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh skor $M_i = 12,5$ dan $SD_i = 2,5$. Pengkategorian distribusi skor kerjasama internal sekolah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19. Kategori Skor Kerjasama Internal Sekolah

No	Rentang Skor	Kategori	Frekuensi (F)	F (%)
1	$x \geq 16,3$	Sangat baik	1	1,0
2	13,8 s/d 16,2	Baik	93	94,9
3	11,3 s/d 13,7	Cukup baik	4	4,1
4	8,8 s/d 11,2	Kurang baik	0	0,0
5	$x \leq 8,7$	Tidak baik	0	0,0



Gambar 7. Diagram Pie Kerjasama Internal Sekolah

Dari Gambar 7 diketahui bahwa kerjasama internal antar warga sekolah menurut 1,0% responden pada kategori sangat baik, kategori baik 94,9% responden dan kategori cukup baik 4,1% responden. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa kerjasama internal antar warga sekolah dikategorikan baik.

Kerjasama warga internal sekolah ditunjukkan dengan sekolah memiliki *team work* (kelompok kerja) yang kompak, cerdas, dan dinamis dalam setiap pelaksanaan program yang terbagi ke dalam unit kelompok kerja sehingga antar warga sekolah dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan sekolah. Kegiatan piket warga sekolah yang dapat dilaksanakan dengan disiplin dan tertib. Kegiatan rapat yang dilaksanakan oleh sekolah dapat berlangsung dengan baik. Hubungan antar warga sekolah yang baik telah menciptakan iklim kerja dan

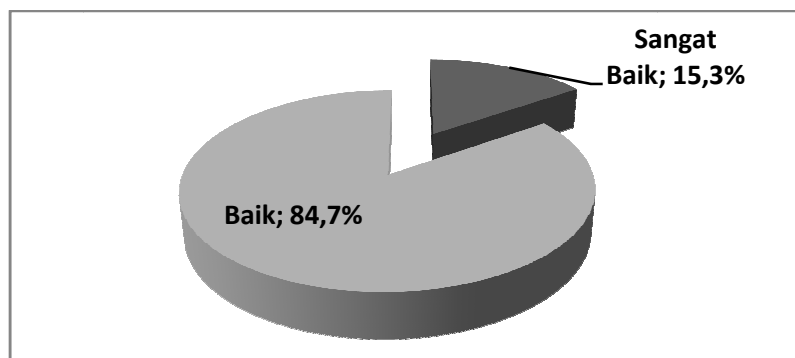
suasana belajar yang kondusif di sekolah. Disamping itu juga didukung oleh kesadaran warga sekolah bahwa keluaran (*out put*) program sekolah merupakan hasil kerja kolektif warga sekolah.

b. Kerjasama eksternal

Pada indikator ini ditujukan untuk mengetahui iklim kerjasama atau hubungan antara sekolah dengan pihak terkait yang relevan dalam pelaksanaan program sekolah. Kerjasama ini berkaitan dengan input sekolah, proses pembelajaran, output sekolah, dan pemanfaatan lulusan. Data yang diperoleh dari angket terdiri dari 7 butir pertanyaan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh skor $M_i = 17,5$ dan $SD_i = 3,5$. Pengkategorian distribusi skor kerjasama eksternal sekolah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 20. Kategori Skor Kerjasama Eksternal

No	Rentang Skor	Kategori	Frekuensi (F)	F (%)
1	$x \geq 22,8$	Sangat baik	15	15,3
2	19,3 s/d 22,7	Baik	83	84,7
3	15,8 s/d 19,2	Cukup baik	0	0,0
4	12,3 s/d 15,7	Kurang baik	0	0,0
5	$x \leq 12,2$	Tidak baik	0	0,0



Gambar 8. Diagram Pie Kerjasama Eksternal Sekolah

Dari Gambar 8 diketahui bahwa kerjasama eksternal sekolah menurut 15,3% responden pada kategori sangat baik dan kategori baik 84,7% responden. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa kerjasama eksternal sekolah dikategorikan baik.

Sekolah menjalin kerjasama dengan pihak terkait lainnya untuk membantu pelaksanaan program-program sekolah. Kerjasama eksternal sekolah diantaranya dengan pemerintah, masyarakat/komite sekolah, dan dunia usaha/industri. Hubungan kerjasama antara sekolah dengan pihak terkait tersebut terjalin dengan baik.

Kerjasama antara sekolah dengan pemerintah terutama dengan dinas pendidikan diantaranya dilaksanakan dengan pertemuan rutin rapat dinas, sekolah mengikuti berbagai lomba yang diadakan pemerintah, dan berbagai kegiatan pelatihan lainnya. Dikutip dari situs SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta (www.smk-muhga.sch.id) diperoleh informasi bahwa kerjasama antara sekolah dengan dinas pendidikan juga dilaksanakan pada kegiatan *in house training* (IHT) dimana dari pihak dinas pendidikan kota Yogyakarta menjadi penyaji dalam kegiatan tersebut. Selain itu juga dilaksanakannya pelatihan media pembelajaran berbasis TIK yang di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang merupakan bentuk kerjasama antara JIS dan Dinas Pendidikan.

Kerjasama antara sekolah dengan masyarakat di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dibentuk dalam wadah komite sekolah

yang dikukuhkan dengan SK No. 89/III.4/KEP/2007 tentang Susunan Pengurus Komite Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Yogyakarta Periode 2007-2010. Kegiatan kerjasama antara sekolah dengan komite sekolah terlihat dari pertemuan rutin yang diadakan di sekolah setiap bulan dan adanya program kerja komite sekolah yang dilaksanakan untuk pengembangan sekolah.

Kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha dan industri dilaksanakan untuk membantu pelaksanaan program sekolah berupa pengembangan kurikulum dan pada pengembangan proses pembelajaran berupa kegiatan praktek kerja industri atau magang, uji kompetensi siswa, dan pemasaran lulusan. Jalinan kerjasama tersebut diikat dalam nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/Mo*) yang telah disepakati bersama. Beberapa dunia usaha/industri yang telah kerjasama dengan sekolah menjalin berdasarkan Data Pokok PSMK 2010 SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta adalah sebagai berikut.

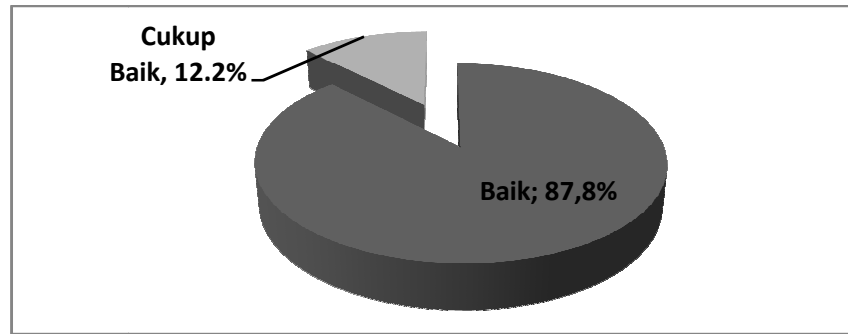
Tabel 21. Daftar Kerjasama dengan Dunia Usaha/Industri

Nama DU/DI	Tahun MoU	No. MoU	Masa Berlaku	Bentuk Kerjasama	Kompetensi Keahlian Terkait
PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA	2010			DIKLAT, UKP, BKK	Tek. Mesin, TKR
PT. PORTER	2010			PRAKERIN, MAGANG	Tek. Mesin, TKR
PT. HINO	2008		2013	PRAKERIN, MAGANG	TKR
PT. CIPTANING WIRAHARJA	2006	01/HUMAS/05	2011	PRAKERIN, BKK	Tek. Mesin
PT. IRG GLOBAL SEARCH (M)	2009	E-6/264/a.20/WKS4/VI/09	2014	BKK	Tek. Mesin, TKR
ammadiyahPT. MAK	2009	E-2//a.20/XII/09	2012		Tek. Mesin
CV. UTILINDO PERKASA	2009	E-2//a.20/XII/09	2012	PRAKERIN, UKP	Listrik
CV. KUSUMA BAJA INDO KLATEN	2008	E-2/047/WKS4/a.20		PRAKERIN	Tek. Mesin
PT. JARI ALAM SAPUTRA	2008	E-6/264/a.20/III/08		PRAKERIN	Tek. Mesin
BINA ANTAR BUADAYA	2008	E-6/315/a.20/WKS4/IX/09	2013	PERTUKARAN BUDAYA	Umum

Selanjutnya variabel kerjasama sekolah dianalisis secara keseluruhan. Pada variabel ini terdapat 12 butir item pertanyaan dan berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh data skor $M_i = 30$ dan $SD_i = 6$. Pengkategorian variabel kerjasama sekolah dapat dilihat pada tabel dan diagram pie berikut ini.

Tabel 22. Kategori Skor Kerjasama Sekolah

No	Rentang skor	Kategori	Frekuensi (F)	F (%)
1	$x \geq 48$	Sangat baik	0	0,0
2	36 s/d 47,9	Baik	86	87,8
3	24,1 s/d 35,9	Cukup baik	12	12,2
4	12,1 s/d 24	Kurang baik	0	0,0
5	$x \leq 12$	Tidak baik	0	0,0



Gambar 9. Diagram Pie Kerjasama Sekolah

Dari diagram pie diatas, diketahui bahwa kerjasama sekolah menurut 16,7% responden pada kategori sangat baik, dan 83,3% responden pada kategori baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kerjasama sekolah dikategorikan baik.

3. Deskripsi Data Bentuk Partisipasi

Data bentuk partisipasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) digunakan untuk mengetahui apa saja bentuk dukungan dari pemerintah, warga sekolah, dan masyarakat (komite sekolah, DUDI, atau lainnya) dalam membantu penyelenggaraan program pendidikan di sekolah. Indikator bentuk partisipasi *stakeholders* yang diukur yaitu berupa dukungan dana, dukungan material/fasilitas, dukungan pemikiran, dan dukungan tenaga. Data ini diperoleh melalui penyebaran angket dan wawancara langsung dengan responden yaitu wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat (humas) dan komite sekolah yang didukung oleh dokumen terkait.

Masing-masing indikator terdiri dari 3 butir pertanyaan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif untuk masing-masing indikator

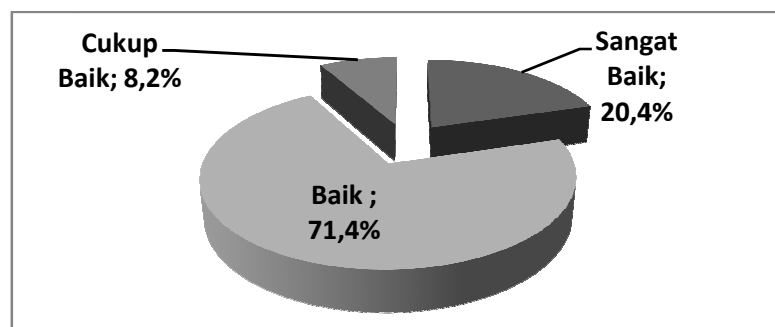
diperoleh skor $M_i = 7,5$ dan $SD_i = 1,5$. Berikut ini deskripsi data hasil penelitiannya.

a. Dukungan dana

Pada indikator ini ditujukan untuk mengetahui dukungan dana dari para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program sekolah. Pengkategorian distribusi skor dukungan dana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 23. Kategori Skor Dukungan Dana

No	Rentang Skor	Kategori	Frekuensi (F)	F (%)
1	$x \geq 9.8$	Sangat baik	20	20,4%
2	8.3 s/d 9.7	Baik	70	71,4%
3	6.8 s/d 8.2	Cukup baik	8	8,2%
4	5.3 s/d 6.7	Kurang baik	0	0,0%
5	$x \leq 5.2$	Tidak baik	0	0,0%



Gambar 10. Diagram Pie Dukungan Dana

Dari Gambar 10 diketahui bahwa bentuk partisipasi *stakeholders* berupa dukungan dana menurut 20,4% responden pada kategori sangat baik, kategori baik 71,4% responden dan kategori cukup baik 8,2% responden. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi berupa dukungan dana dikategorikan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan data dokumen Data Pokok PSMK 2010 dan RAPBS 2009/2010 SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta bentuk partisipasi *stakeholder* yang berupa dana berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran komite sekolah, orang tua siswa, dan amal usaha sekolah/unit produksi sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24. Dukungan Dana *Stakeholders*

No	Sumber Dana	Jenis	Jumlah (Rp)
1	Pemerintah pusat	RSBI	700.000.000
		RKK	75.000.000
		School Business Center (SBC)	400.000.000
Total			1.175.000.000
2	Pemerintah provinsi	BOMM	190.080.000
		Beasiswa Siswa Miskin/BKM	186.420.000
		Beasiswa RAPUS	19.200.000
		Beasiswa RETRIEVAL	2.400.000
			398.100.000
3	Komite sekolah	Dana pendamping RSBI	199.000.000
		Dana penamping RKK	15.000.000
		Dana pendamping SBC	40.000.000
		Dana Pendamping BOMM	250.000.000
Total			504.000.000
4	Orang tua siswa	Uang pendaftaran	20.064.000
		Uang pendidikan	6.148.106.000
Total			6.168.170.000
5	Sekolah	Amal usaha/unit produksi	20.000.000

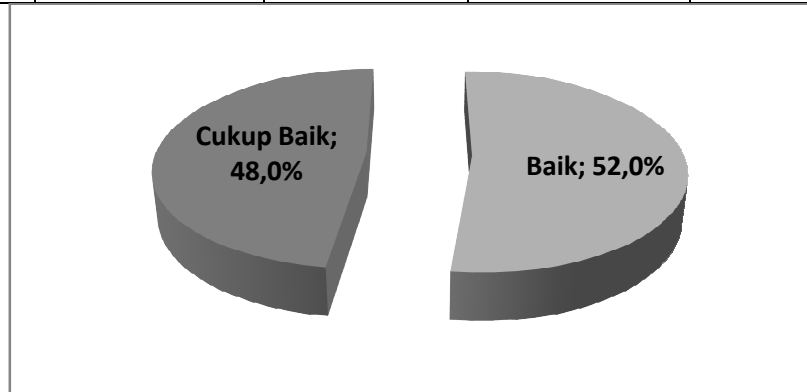
b. Dukungan material/fasilitas

Pada indikator ini ditujukan untuk mengetahui apa saja dukungan material/fasilitas yang diberikan oleh para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program sekolah. Pengkategorian

distribusi skor dukungan material/fasilitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 25. Kategori Skor Dukungan Material/Fasilitas

No	Rentang Skor	Kategori	Frekuensi (F)	F (%)
1	$x \geq 9.8$	Sangat baik	0	0,0
2	8.3 s/d 9.7	Baik	51	52,0
3	6.8 s/d 8.2	Cukup baik	47	48,0
4	5.3 s/d 6.7	Kurang baik	0	0,0
5	$x \leq 5.2$	Tidak baik	0	0,0



Gambar 11. Diagram Pie Dukungan Material/Fasilitas

Dari Gambar 11 diketahui bahwa bentuk partisipasi *stakeholders* berupa dukungan material/fasilitas menurut 52,0% responden pada kategori baik dan kategori baik 48,0% responden. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi berupa dukungan material/fasilitas dikategorikan baik.

Menurut hasil wawancara terkait dengan dukungan material/fasilitas yang berasal dari pemerintah yaitu berupa buku-buku untuk melengkapi koleksi perpustakaan, alat dan bahan untuk menunjang proses pembelajaran. Dari warga sekolah sendiri terutama dari para guru adalah sarana belajar untuk siswa yang meliputi modul bahan ajar dan dari siswa juga kelengkapan alat tulis. Kemudian

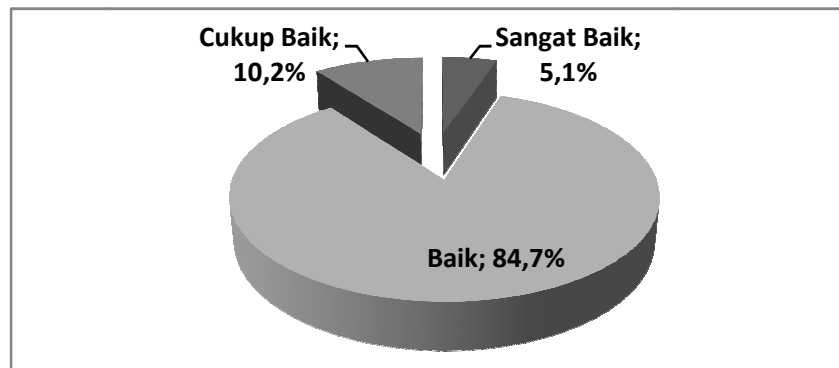
partisipasi dari masyarakat yaitu dari dunia usaha dan industri dengan memberikan fasilitas tempat praktek kepada para siswa maupun guru untuk melaksanakan praktek kerja industri atau magang.

c. Dukungan pemikiran

Pada indikator ini ditujukan untuk mengetahui apa saja dukungan pemikiran yang diberikan oleh para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program sekolah. Pengkategorian distribusi skor dukungan pemikiran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 26. Kategori Skor Dukungan Pemikiran

No	Rentang Skor	Kategori	Frekuensi (F)	F (%)
1	$x \geq 9.8$	Sangat baik	5	5,1
2	8.3 s/d 9.7	Baik	83	84,7
3	6.8 s/d 8.2	Cukup baik	10	10,2
4	5.3 s/d 6.7	Kurang baik	0	0,0
5	$x \leq 5.2$	Tidak baik	0	0,0



Gambar 12. Digram Pie Dukugan Pemikiran

Dari Gambar 12 diketahui bahwa bentuk partisipasi *stekeholders* berupa dukungan pemikiran menurut 5,1% responden pada kategori sangat baik, kategori baik 84,7% responden dan kategori cukup baik

10,2% responden. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi berupa dukungan pemikiran dikategorikan baik.

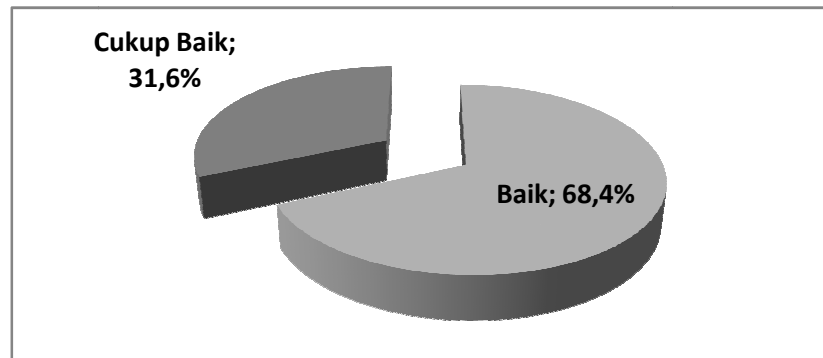
Bentuk partisipasi berupa pemikiran dari pemerintah, warga sekolah, dan masyarakat di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dalam bentuk saran, usul, pembinaan, dan kritik. Sumbangan pemikiran dari pemerintah berupa pembinaan yang dilaksanakan untuk memperbaiki kekurangan-kerkurangan yang ada di sekolah. Sumbangan pemikiran dari warga sekolah berupa saran, usul, dan kritik untuk meningkatkan mutu pendidikan. Demikian juga sumbangan pemikiran dari masyarakat berupa saran, usul, dan kritik untuk kepentingan sekolah. Materi/isi sumbangan pemikiran dari *stakeholders* tentang pelaksanaan kurikulum, pengembangan PBM, media pembelajaran, kedisiplinan, dan lainnya. Penyampaian pemikiran oleh *stakeholders* untuk kepentingan sekolah disampaikan melalui rapat maupun komunikasi secara langsung.

d. Dukungan tenaga

Pada indikator ini ditujukan untuk mengetahui apa saja dukungan tenaga yang diberikan oleh para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program sekolah. Pengkategorian distribusi skor dukungan tenaga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 27. Kategori Skor Dukungan Tenaga

No	Rentang Skor	Kategori	Frekuensi (F)	F (%)
1	$x \geq 9.8$	Sangat baik	0	0,0
2	8.3 s/d 9.7	Baik	67	68,4
3	6.8 s/d 8.2	Cukup baik	31	31,6
4	5.3 s/d 6.7	Kurang baik	0	0,0
5	$x \leq 5.2$	Tidak baik	0	0,0



Gambar 13. Digram Pie Dukungan Tenaga

Dari Gambar 13 diketahui bahwa bentuk partisipasi *stakeholders* berupa dukungan tenaga menurut 68,4% responden pada kategori baik dan kategori cukup baik 31,6% responden. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi berupa dukungan tenaga dikategorikan baik.

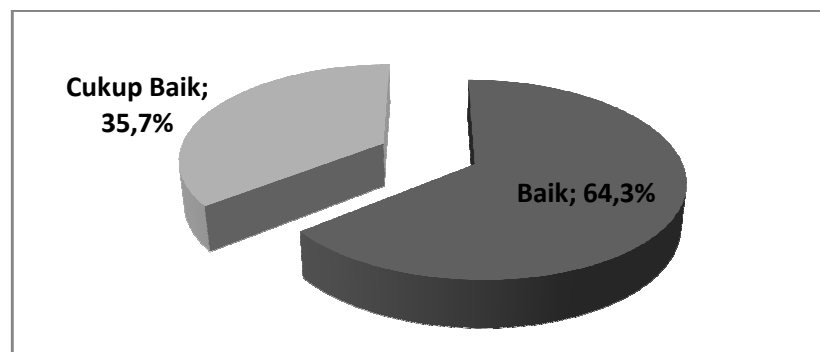
Partisipasi dari pemerintah berupa dukungan tenaga yaitu dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dengan menjadi penyaji dalam acara *In House Training* (IHT) di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta pada tanggal 14 Juli 2009. Partisipasi dari warga sekolah berupa dukungan tenaga yaitu dilaksanakannya tugas masing-masing warga sekolah sesuai dengan program-program sekolah yang dilaksanakan. Partisipasi dari masyarakat yaitu dengan ikut serta dalam kegiatan bakti sosial, menghadiri undangan sekolah, dan ikut serta dalam kunjungan

industri dengan para guru. Kemudian partisipasi dari dunia usaha dan industri yaitu menjadi penguji di SMK Muhammdiyah 3 Yogyakarta dalam pelaksanaan uji kompetensi siswa.

Selanjutnya variabel bentuk partisipasi *stakeholders* dalam penyelenggaraan program sekolah dianalisis secara keseluruhan. Pada variabel ini terdapat 12 butir pertanyaan dan berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh data skor $M_i = 30$ dan $SD_i = 6$. Pengkategorian bentuk partisipasi dapat dilihat pada tabel dan diagram pie berikut ini.

Tabel 28. Kategori Skor Bentuk Partisipasi *Stakeholders*

No	Rentang skor	Kategori	Frekuensi (F)	F (%)
1	$x \geq 48$	Sangat baik	0	0,0
2	36 s/d 47,9	Baik	63	64,3
3	24,1 s/d 35,9	Cukup baik	35	35,7
4	12,1 s/d 24	Kurang baik	0	0,0
5	$x \leq 12$	Tidak baik	0	0,0



Gambar 14. Diagram Pie Bentuk Partisipasi *Stakeholders*

Berdasarkan Gambar 14 diketahui bentuk partisipasi *stakeholders* dalam penyelenggaraan program sekolah menurut 64,3% responden pada kategori baik dan 35,7% responden pada kategori cukup baik. Dari data ini maka dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi *stakeholders* dalam penyelenggaraan program sekolah dikategorikan baik.

4. Deskripsi Data Keterbukaan Sekolah

Pada variabel keterbukaan sekolah indikator yang diukur yaitu keterlibatan pihak terkait dalam pengembangan program dan dana sekolah, kemudahan mengakses informasi oleh para pemangku kepentingan, dan kepercayaan/keyakinan para pemangku kepentingan kepada sekolah. Data ini diperoleh melalui penyebaran angket dan wawancara langsung dengan responden yaitu wakil kepala sekolah bidang ketenagaan yang didukung oleh dokumen terkait.

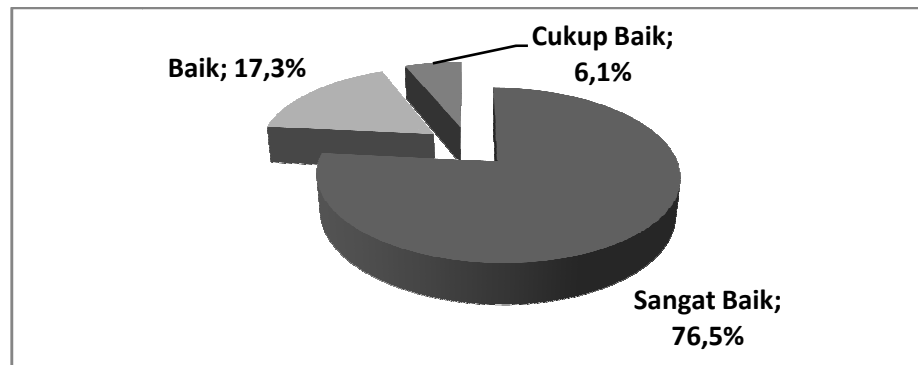
Masing-masing indikator terdiri dari 4 butir pertanyaan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif untuk masing-masing indikator diperoleh data skor $M_i = 10$ dan $SD_i = 2$. Berikut ini deskripsi data hasil penelitiannya.

a. Keterlibatan para pemangku kepentingan

Pada indikator ini ditujukan untuk mengetahui keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengembangan program dan anggaran sekolah. Pengkategorian distribusi skor keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengembangan program dan anggaran sekolah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 29. Kategori Skor Keterlibatan Warga Sekolah dan Komite Sekolah

No	Rentang Skor	Kategori	Frekuensi (F)	F (%)
1	$x \geq 13$	Sangat baik	75	76,5
2	11 s/d 12,9	Baik	17	17,3
3	9,1 s/d 10,9	Cukup baik	6	6,1
4	7,1 s/d 9	Kurang baik	0	0,0
5	$x \leq 7$	Tidak baik	0	0,0



Gambar 15. Diagram Pie Keterlibatan Warga Sekolah dan Komite Sekolah

Dari Gambar 15 diketahui bahwa keterlibatan warga sekolah dan komite sekolah dalam menyusun program dan keuangan sekolah menurut 76,5% responden pada kategori sangat baik, kategori baik 17,3% responden dan kategori cukup baik 6,1% responden. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa keterbukaan sekolah dengan cara melibatkan warga sekolah dan komite sekolah dalam penyusunan program dan keuangan sekolah sekolah dikategorikan sangat baik.

Menurut hasil wawancara diketahui bahwa sekolah telah melibatkan warga sekolah dan komite sekolah terkait dengan perumusan program dan keuangan sekolah. Perumusan program dan keuangan sekolah tidak hanya dilakukan oleh kepala sekolah dan salah satu orang kepercayaannya. Namun diputuskan bersama dalam suatu rapat yang dihadiri oleh kepala sekolah, guru, dan karyawan.

Warga sekolah yang dilibatkan dalam perumusan program dan keuangan sekolah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan aspirasi warga sekolah dan kondisi sekolah. Pihak-pihak tersebut meliputi semua wakil kepala sekolah yang mengurus masing-

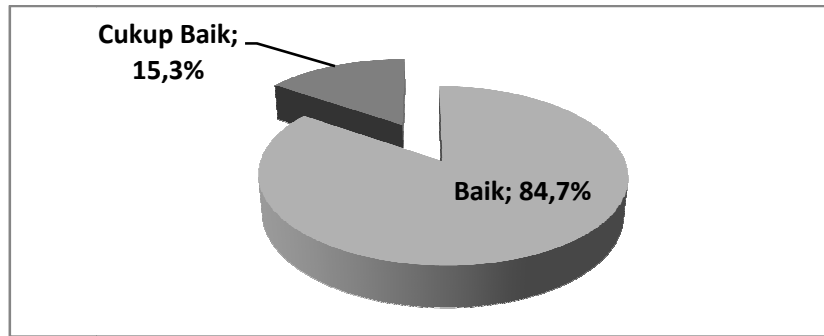
masing bidangnya, kepala TU yang mengurus administrasi, dan semua ketua program keahlian. Masing-masing pihak penanggung jawab program merumuskan program dan keuangan, kemudian dirumuskan bersama dalam suatu rapat kerja, sehingga dihasilkan keputusan bersama terkait program dan keuangan sekolah dengan persetujuan komite sekolah. Rencana anggaran dan program sekolah ini kemudian dituangkan dalam Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Program Kerja Sekolah.

b. Kemudahan mengakses informasi oleh warga sekolah dan masyarakat

Pada indikator ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana sekolah memberikan kemudahan kepada warga sekolah dan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai program dan keuangan sekolah. Pengkategorian distribusi skor kemudahan mengakses informasi oleh para pemangku kepentingan mengenai program dan anggaran sekolah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 30. Kategori Skor Kemudahan Mengakses Informasi Oleh Warga Sekolah dan Masyarakat

No	Rentang Skor	Kategori	Frekuensi (F)	F (%)
1	$x \geq 13$	Sangat baik	0	0
2	11 s/d 12,9	Baik	83	84,7
3	9,1 s/d 10,9	Cukup baik	15	15,3
4	7,1 s/d 9	Kurang baik	0	0,0
5	$x \leq 7$	Tidak baik	0	0,0



Gambar 16. Diagram Pie Kemudahan Mengakses Informasi

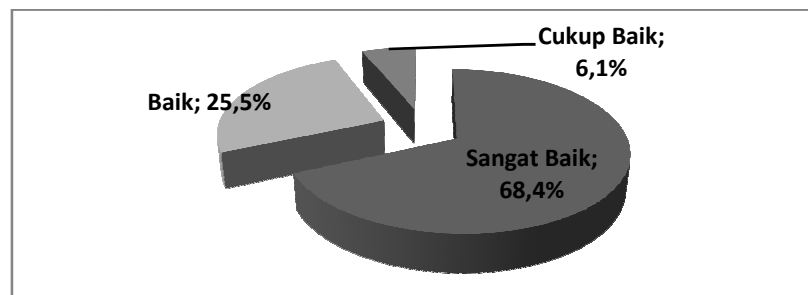
Dari Gambar 16 diketahui bahwa kemudahan mengakses informasi terkait dengan program dan keuangan sekolah oleh warga sekolah dan komite sekolah menurut 84,7% responden pada kategori baik dan kategori cukup baik 15,3% responden. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa kemudahan mengakses informasi oleh warga sekolah dan masyarakat melalui berbagai jalur komunikasi dikategorikan baik.

Program dan keuangan sekolah disosialisasikan kepada warga sekolah dan masyarakat dalam suatu pertemuan. Informasi terkait dengan program dan keuangan sekolah dapat diakses oleh warga sekolah dan masyarakat melalui komunikasi langsung dengan kepala sekolah maupun penanggungjawab program maupun melalui layanan informasi sekolah yang dijaga oleh petugas piket. Selain itu penyebaran informasi program-program sekolah dilakukan dalam bentuk papan pengumuman, laporan, dan website sekolah. Sedangkan untuk informasi tentang keuangan sekolah hanya dapat diakses melalui komunikasi langsung dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan bendahara dengan adanya laporan keuangan.

Selanjutnya variabel keterbukaan sekolah dianalisis secara keseluruhan. Pada variabel ini terdapat 8 butir pertanyaan dan berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh data skor $M_i = 20$ dan $SD_i = 4$. Pengkategorian keterbukaan sekolah dapat dilihat pada tabel dan diagram pie berikut ini.

Tabel 31. Kategori Skor Keterbukaan Sekolah

No	Rentang skor	Kategori	Frekuensi (F)	F (%)
1	$x \geq 26$	Sangat baik	67	68,4
2	22 s/d 25,9	Baik	25	25,5
3	18,1 s/d 21,9	Cukup baik	6	6,1
4	14,1 s/d 18	Kurang baik	0	0
5	$x \leq 14$	Tidak baik	0	0



Gambar 17. Diagram Pie Keterbukaan Sekolah

Pada gambar diagram pie di atas tampak bahwa keterbukaan sekolah menurut sebagian besar 84,7% responden pada kategori baik, dan kategori cukup baik 15,3% responden. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa keterbukaan sekolah dikategorikan baik.

5. Deskripsi Data Akuntabilitas Sekolah

Pada variabel akuntabilitas sekolah digunakan untuk mengetahui pertanggungjawaban program dan keuangan sekolah kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang meliputi pelaporan program dan keuangan sekolah, pertemuan untuk membahas pertanggungjawaban

program dan keuangan sekolah, serta kepuasan warga sekolah dan komite sekolah terhadap pertanggungjawaban program dan keuangan sekolah. Data ini diperoleh melalui penyebaran angket dan wawancara langsung dengan responden yaitu wakil kepala sekolah bidang ketenagaan yang didukung oleh dokumen terkait. Berikut ini disajikan deskripsi hasil penelitian.

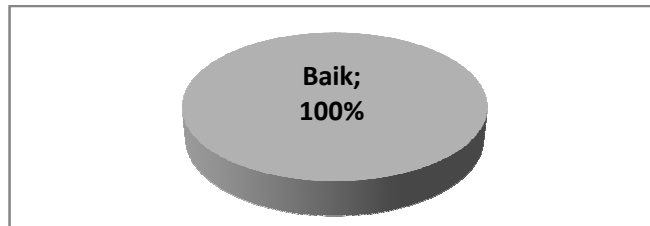
Masing-masing indikator terdiri dari 2 butir pertanyaan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif untuk masing-masing indikator diperoleh data skor $M_i = 5$ dan $SD_i = 1$. Berikut ini deskripsi data hasil penelitiannya.

a. Pelaporan program dan keuangan sekolah

Pada indikator ini ditujukan untuk mengetahui pertanggungjawaban sekolah dengan membuat pelaporan proses dan hasil pelaksanaan program maupun keuangan sekolah. Pengkategorian distribusi skor pelaporan program dan keuangan sekolah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 32. Kategori Skor Pelaporan Program dan Keuangan Sekolah

No	Rentang Skor	Kategori	Frekuensi (F)	F (%)
1	$x \geq 6,5$	Sangat baik	0	0,0
2	5,5 s/d 6,4	Baik	98	100,0
3	4,6 s/d 5,4	Cukup baik	0	0,0
4	3,6 s/d 4,5	Kurang baik	0	0,0
5	$x \leq 3,5$	Tidak baik	0	0,0



Gambar 18. Diagram Pie Pelaporan

Dari Gambar 18 diketahui bahwa pelaporan program dan keuangan sekolah menurut 100% responden pada kategori baik. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa pelaporan program dan keuangan sekolah dikategorikan baik.

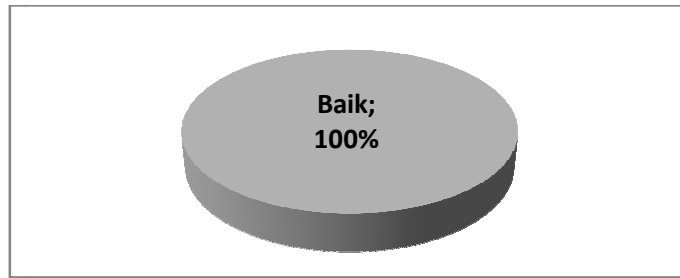
Masing-masing penanggungjawab program membuat laporan pertanggungjawaban proses dan hasil pelaksanaan program maupun keuangan sekolah dalam bentuk laporan tertulis. Pelaporan pertanggungjawaban diberikan kepada warga sekolah, masyarakat, komite sekolah, yayasan, dan pemerintah.

b. Pertemuan untuk membahas laporan pertanggungjawaban

Pada indikator ini ditujukan untuk mengetahui adanya aktivitas pertemuan dengan para pemangku kepentingan untuk membahas pertanggungjawaban proses dan hasil pelaksanaan program maupun sekolah. Pengkategorian distribusi skor pertemuan untuk membahas laporan pertanggungjawaban dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 33. Kategori Skor Pertemuan

No	Rentang Skor	Kategori	Frekuensi (F)	F (%)
1	$x \geq 6,5$	Sangat baik	0	0,0
2	5,5 s/d 6,4	Baik	98	100,0
3	4,6 s/d 5,4	Cukup baik	0	0,0
4	3,6 s/d 4,5	Kurang baik	0	0,0
5	$x \leq 3,5$	Tidak baik	0	0,0



Gambar 19. Diagram Pie Pertemuan

Dari Gambar 19 diketahui akuntabilitas sekolah melalui pertemuan dengan para pemangku kepentingan untuk membahas laporan pertanggungjawaban proses dan hasil pelaksanaan program maupun keuangan sekolah menurut 100% responden pada kategori baik. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas sekolah melalui pertemuan dengan para pemangku kepentingan untuk membahas laporan pertanggung-jawaban proses dan hasil pelaksanaan program maupun keuangan sekolah dikategorikan baik.

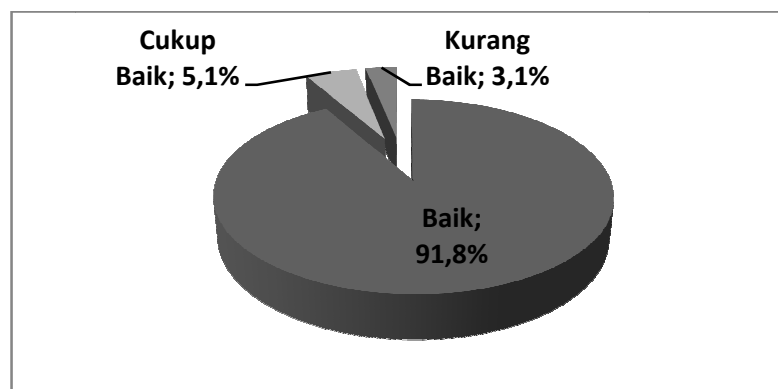
Masing-masing penanggung jawab program memberikan pertanggungjawaban kepada kepala sekolah dan komite sekolah melalui pertemuan untuk dibahas hasil pelaksanaan program yang telah dicapai dan penggunaan uang. Kemudian pada akhir tahun ajaran dilakukan pertemuan dengan pihak dinas pendidikan, yayasan, dan orang tua siswa untuk mempertanggungjawabkan semua hasil pelaksanaan program dan penggunaan keuangan sekolah.

c. Kepuasan warga sekolah dan komite sekolah terhadap pertanggung-jawaban sekolah

Pada indikator ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana kepuasan warga sekolah dan komite sekolah terhadap pertanggungjawaban proses dan hasil pelaksanaan program maupun keuangan sekolah. Pengkategorian distribusi skor kepuasan warga sekolah dan komite sekolah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 34. Kategori Skor Kepuasan Warga Sekolah dan Komite Sekolah

No	Rentang Skor	Kategori	Frekuensi (F)	F (%)
1	$x \geq 6,5$	Sangat baik	0	0,0
2	5,5 s/d 6,4	Baik	90	91,8
3	4,6 s/d 5,4	Cukup baik	5	5,1
4	3,6 s/d 4,5	Kurang baik	3	3,1
5	$x \leq 3,5$	Tidak baik	0	0,0



Gambar 20. Diagram Pie Kepuasan Warga Sekolah dan Komite Sekolah

Dari Gambar 20 diketahui bahwa kepuasan warga sekolah dan komite sekolah terhadap pertanggungjawaban proses dan hasil pelaksanaan program maupun keuangan sekolah menurut 76,5% responden pada kategori baik dan kategori cukup baik 23,5% responden. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa kepuasan warga

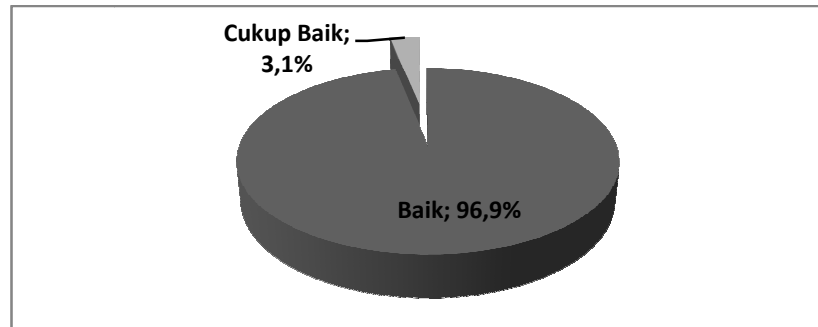
sekolah dan komite sekolah terhadap pertanggungjawaban proses dan hasil pelaksanaan program maupun keuangan sekolah dikategorikan baik.

Dalam perumusan program dan keuangan sekolah melibatkan warga sekolah dan komite sekolah dengan persetujuan pihak yayasan. Sehingga sekolah memberikan pertanggungjawaban proses dan hasil pelaksanaan program maupun keuangan sekolah kepada para pemangku kepentingan tersebut. Baik warga sekolah maupun komite sekolah merasa puas dengan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh sekolah. Hal ini terbukti dengan tidak adanya protes/komplain dari warga sekolah dan komite sekolah.

Selanjutnya variabel akuntabilitas sekolah dianalisis secara keseluruhan. Pada variabel ini terdapat 6 butir pertanyaan dan berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh data skor $M_i = 15$ dan $SD_i = 3$. Pengkategorian bentuk partisipasi dapat dilihat pada tabel dan diagram pie berikut ini.

Tabel 35. Kategori Skor Akuntabilitas Sekolah

No	Rentang skor	Kategori	Frekuensi (f)	F (%)
1	$x \geq 19,5$	Sangat baik	0	0,0
2	16,5 s/d 19,4	Baik	95	96,9
3	13,5 s/d 16,4	Cukup baik	3	3,1
4	10,5 s/d 13,4	Kurang baik	0	0,0
5	$x \leq 14$	Tidak baik	0	0,0



Gambar 6. Diagram Pie Akuntabilitas Sekolah

Tampak pada Gambar 07, akuntabilitas sekolah menurut 96,9% responden pada kategori baik dan kategori cukup baik 3,1% responden. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam pelaksanaan program sekolah pada kategori baik.

B. Pembahasan

1. Pembahasan Kemandirian Sekolah

Penerapan manajemen berbasis sekolah menuntut sekolah agar lebih mandiri dalam pengembangan program-program sekolah. Sekolah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola program-programnya dengan tidak selalu bergantung kepada atasannya. Oleh karena itu sekolah harus memiliki sumber daya yang sesuai dengan tuntutan program sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian sekolah yang ditunjukkan dengan kewenangan sekolah dan pemenuhan kebutuhan sumber daya sekolah termasuk dalam kategori baik. Adapun indikator-indikator kemandirian sekolah dijelaskan sebagai berikut.

a. Kewenangan sekolah dalam pengembangan kurikulum dan program pembelajaran

Sekolah diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulumnya dan program pembelajaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.. Pengembangan kurikulum dan program pembelajaran meliputi pengembangan Buku I KTSP, pengembangan silabus, pengembangan RPP, persiapan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan sekolah dalam pengembangan kurikulum dan program pembelajaran menurut 93,9% responden pada kategori sangat baik dan kategori baik 6,1% responden

Pengembangan dokumen kurikulum yang berupa Buku I KTSP dilakukan oleh tim pengembang kurikulum. Seperti yang diketahui bahwa tim pengembang kurikulum SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, guru mata pelajaran normative, adaptif, dan produktif serta pengurus komite sekolah yang mewakili pihak dunia usaha dan industri. Untuk pengembangan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan perangkat persiapan pembelajaran dikembangkan oleh masing-masing guru mata pelajaran atau MGMP sekolah dengan koordinasi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Panduan pengembangan kurikulum sekolah yang digunakan terdiri dari: UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan, Standar Kompetensi Kerja (SKKNI/SKK), Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Permendiknas No. 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan SI dan SKL.

Ditinjau dari tim pengembang kurikulum dalam pengembangan dokumen kurikulum atau Buku I KTSP menunjukan sekolah sudah mandiri dalam mengembangkan kurikulum sekolahnya sendiri dengan melibatkan para guru dan komite sekolah sebagai perwakilan dunia usaha dan industri. Hal ini sesuai dengan PP No. 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar isi dan standar kompetensi lulusan, serta panduan pengembangan kurikulum yang dibuat oleh BSNP dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Dokumen yang digunakan sudah tepat yaitu Permendiknas No. 22 tahun 2006 mengenai Standar Isi (SI), No. 23 tahun 2006 mengenai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan No. 24 tahun 2006 mengenai Pelaksanaan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Hal ini sesuai dengan Depdiknas (2006), dimana Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) menjadi acuan dalam pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Pengembangan silabus, RPP, dan perangkat persiapan pembelajaran yang dikembangkan oleh para guru atau MGMP sekolah.

Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam panduan pengembangan KTSP (Depdiknas, 2006: 15), pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) pada atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan. Dalam pengembangan RPP juga sejalan dengan Permendiknas No. 41 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan kegiatan utama sekolah. Sekolah diberikan kebebasan memilih strategi, metode dan teknik pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dan kondisi sumber daya yang tersedia di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan menggunakan fasilitas atau media pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan Permendiknas No 41 tahun 2007 yang menyatakan bahwa kegiatan inti pelaksanaan proses pembelajaran

menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran.

Pada proses penilaian, hasil penelitian menunjukkan bahwa guru telah menyusun instrumen penilaian hasil belajar secara mandiri. Instrumen penilaian hasil belajar yang dikembangkan sesuai dengan teknik dan metode penilaian mata pelajaran. Instrumen penilaian hasil belajar ini berbentuk tes pilihan ganda, tes essay, dan tes praktek. Sedangkan waktu penilaian dilaksanakan pada setiap pencapaian kompetensi dasar mata pelajaran (ulangan harian), ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Penilaian hasil belajar sudah sesuai dengan Permendiknas No. 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian terkait dengan mekanisme dan prosedur penilaian melalui ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. Sedangkan untuk teknik dan instrumen penilaian melalui tes tulis dan tes praktek.

b. Pemenuhan kebutuhan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia penting yang diperlukan untuk berlangsungnya proses pendidikan di sekolah. Tanpa sumber daya yang memadai, proses pendidikan di sekolah tidak akan berlangsung secara baik, dan pada gilirannya tujuan sekolah tidak akan tercapai. Sekolah yang mandiri harus memiliki tingkat kesiapan sumber daya yang memadai untuk menjalankan proses pendidikan. Artinya, segala sumber daya yang

diperlukan untuk menjalankan proses pendidikan harus tersedia dan dalam keadaan siap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan menurut 100% responden pada kategori baik.

Secara kuantitas, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta sudah mencukupi dari kebutuhan sekolah. Jumlah pendidik sebanyak 102 orang, sedangkan tenaga kependidikan berjumlah 36 orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan didukung dokumen Data Pokok PSMK 2010 pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di SMK Muhammadiyah sudah terpenuhi.

Pada kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, tingkat pendidikan guru terdiri dari Diploma sebanyak 6 orang, S1/DIV sebanyak 91 orang, dan S2 sebanyak 5 orang. Untuk tingkat pendidikan karyawan terdiri dari SLTA sebanyak 30 orang, Diploma sebanyak 3 orang, dan S1/DIV sebanyak 3 orang. Dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan kompetensi guru mendeskripsikan kualifikasi guru SMK dan yang sederajat minimal adalah S1 atau DIV. Melihat hal ini maka pemenuhan kualifikasi guru di SMK Muhammadiyah 3 belum semuanya terpenuhi. Sedangkan pemenuhan kualifikasi maupun kompetensi karyawan berdasarkan hasil wawancara adalah sudah terpenuhi dikarenakan kualifikasi pendidikannya sesuai dengan bidang pekerjaan di sekolah.

Untuk kompetensi guru SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dari data yang terkumpul menyatakan bahwa kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional guru adalah baik. Hal ini berarti pada kompetensi pedagogik, guru mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Pada kompetensi kepribadian, guru memiliki integritas kepribadian dan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pada kompetensi sosial, guru mampu berkomunikasi secara efektif dan santun dengan sesama guru, tenaga kependidikan, dan orang tua siswa dan masyarakat. Adapun pada kompetensi profesional, guru menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Dari penjelasan ini terlihat kebutuhan kompetensi guru telah dipenuhi oleh sekolah.

Untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dilaksanakan melalui kegiatan diklat, magang, dan pembinaan guru serta karyawan oleh kepala sekolah. Dengan kegiatan ini diharapkan kualitas kinerja pendidik dan tenaga kependidikan semakin membaik. Sehingga pelayanan pembelajaran dan administrasi sekolah dapat berlangsung dengan baik.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di MK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dilihat dari

jumlah, kualifikasi, kompetensi sudah terpenuhi disertai dengan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan yang merupakan sumber daya sekolah harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh sekolah, sehingga sekolah dapat mandiri dalam melaksanakan programnya secara profesional. Hal ini sejalan dengan pernyataan Depdiknas (2009: 59) yang menyatakan bahwa suatu sekolah dapat mandiri dalam pelaksanaan program jika didukung oleh sejumlah kemampuan SDM sekolah sesuai dengan tuntutan program

c. Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah

Sarana dan prasarana sekolah merupakan masukan penting dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Data yang diperoleh terkait sarana dan prasarana sekolah menyatakan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana sekolah menurut 93,9% responden pada kategori baik dan kategori cukup baik 6,1% responden. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah meliputi kondisi bangunan sekolah, kelengkapan kelompok ruang pembelajaran umum, kelengkapan kelompok ruang penunjang, dan kelompok ruang pembelajaran khusus yakni ruang praktek yang disesuaikan dengan program keahlian di sekolah. Hal ini sesuai dengan Permendiknas No. 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK, disebutkan standar sarana prasarana sekolah mencakup: bangunan, kelengkapan sarana prasarana ruang pembelajaran umum, kelengkapan sarana prasarana

ruang penunjang, dan kelengkapan sarana prasarana ruang pembelajaran khusus. Sekolah disimpulkan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana berarti harus memiliki minimal kebutuhan sarana dan prasarana yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kebutuhan kelengkapan sarana prasarana ruang pembelajaran umum secara keseluruhan adalah 51 ruang, tetapi sekolah baru memiliki 40 ruang. Hal ini berarti kebutuhan kelengkapan sarana prasarana ruang pembelajaran umum di SMK Muhammdiyah masih belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah karena pemenuhannya baru mencapai 78%.

Kebutuhan kelengkapan sarana prasarana ruang khusus (praktek) secara keseluruhan adalah 22 ruang, tetapi sekolah baru memiliki 18 ruang. Hal ini berarti kebutuhan kelengkapan sarana prasarana ruang khusus (praktek) di SMK Muhammdiyah masih belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah karena pemenuhannya baru mencapai 82%.

Kebutuhan kelengkapan sarana prasarana ruang penunjang sekolah secara keseluruhan adalah 28 ruang, tetapi sekolah baru memiliki 20 ruang. Hal ini berarti kelengkapan sarana prasarana ruang penunjang sekolah umum di SMK Muhammdiyah masih belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah karena pemenuhannya baru mencapai 71%.

Program pengembangan sarana dan prasarana di SMK Muh
Failitas sarana dan prasarana sekolah di SMK Muhammadiyah 3
Yogyakarta telah memadai dalam pelaksanaan berbagai program
kegiatan pendidikan di sekolah, baik untuk kegiatan teori maupun
kegiatan praktek. Namun demikian, masih ditemukan fasilitas sekolah
yang kurang dan membutuhkan pemugaran. Mengatasi berbagai hal
tersebut sekolah melakukan pengadaan dan pemeliharaan melalui dana
sumbangan dari masyarakat dan mengajukan proposal ke instansi
terkait. Strategi ini merupakan langkah penting yang telah dilakukan
dan perlu terus dipertahankan. Sarana dan prasarana sekolah secara
umum sudah mendukung untuk melaksanakan program-program
sekolah, namun seiring dengan perkembangan sekolah, sarana dan
prasarana sekolah masih perlu terus ditingkatkan baik secara kuantitas
maupun kualitas.

d. Pemenuhan pembiayaan/dana sekolah

Sumber daya sekolah selanjutnya yang juga sangat penting
dalam penyelenggaraan program pendidikan di sekolah adalah
pembiayaan/dana sekolah. Kemandirian sekolah pada aspek pemenuhan
dana sekolah dapat dilihat dari perolehan sumber dana dan upaya
sekolah untuk menghasilkan pemasukan dana. Data penelitian terkait
dengan pemenuhan pembiayaan/dana sekolah menurut 96,9%
responden pada kategori baik dan kategori cukup baik 3,1% responden.

Sumber dana yang diperoleh dalam penyelenggaraan pendidikan di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta diperoleh dari: pemerintah pusat, pemerintah daerah, komite sekolah, orang tua siswa dan amal usaha sekolah. Perolehan sumber dana tersebut secara komposisi sudah lengkap untuk memenuhi kebutuhan dana pelaksanaan program sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat Harsono (2007: 9), bahwa biaya pendidikan berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi 4 jenis, (1) biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah, (2) biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat orang tua/wali siswa, (3) biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua/wali siswa, misalnya sponsor dari lembaga keuangan dan perusahaan, dan (4) lembaga pendidikan itu sendiri. Hal ini juga ditegaskan dalam PP No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, disebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Berdasarkan studi dokumentasi, sumber dana sekolah pada tahun 2009 yang berasal dari masyarakat/orang tua siswa berupa uang pendaftaran dan uang pendidikan, bantuan dari pemerintah pusat berupa dana RSBI, RKK, dan *School Business Center*, bantuan dari pemerintah daerah berupa Bantuan Operasional Manajemen mutu (BOMM), dan dana pendamping masing-masing bantuan dari pemerintah tersebut berasal dari komite sekolah. Selain itu juga,

sekolah mendapatkan dana beasiswa yang diperuntukan bagi siswa dari pemerintah daerah provinsi, yaitu Beasiswa Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah (SMK)/Bantuan Khusus Murid (BKM), RAPUS, dan RETRIEVAL.

Selain sumber dana dari masyarakat dan pemerintah tersebut, sekolah juga memiliki amal usaha berupa unit produksi sekolah. Unit produksi sekolah tersebut diantaranya koperasi sekolah, warnet dan fotocopy, jual beli komputer dan peripheral, servis/upgrade, web design, konsultan bangunan, gambar rencana bangunan, setir mobil, bengkel mobil dan motor, bengkel las dan bubut, servis TV dan audio, serta instalasi listrik rumah tangga dan industri. Unit usaha ini menunjukkan kemandirian sekolah dalam pembiayaan sekolah yang ditunjukkan oleh adanya usaha sekolah yang mengarah pada pemasukan dana melalui pemanfaatan dan optimalisasi sumber daya sekolah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Depdiknas (2009: 61) bahwa kemandirian sekolah ditinjau dari pendanaan dapat dilihat dari upaya sekolah dalam mengembangkan unit usaha/*income generating* untuk menghasilkan pemasukan dana, baik berupa usaha jasa maupun produk dalam upaya untuk mendukung pelaksanaan program. Melalui manajemen berbasis sekolah diberikan keleluasaan kepada sekolah untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah guna mendapatkan dana untuk keperluan pelaksanaan program sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemandirian sekolah ditinjau dari sumber dana dan pendahanaan sudah berhasil menurut Depdiknas (2009: 63) yaitu:

- 1) sekolah telah berupaya dalam mengembangkan unit-unit usaha/*income generating* untuk menghasilkan pemasukan dana, baik berupa usaha jasa maupun produk;
- 2) Mengupayakan dapat bantuan dana secara kontinyu dari daerahnya untuk mendukung pelaksanaan program yaitu dianggarkan melalui APBD daerah, agar tidak tergantung dari pemerintah pusat;
- 3) meningkatkan peran dan fungsi komite sekolah untuk mendukung pelaksanaan program khususnya dalam bidang pendanaan/keuangan.
- 4) mengoptimasikan potensi sumber daya sekolah (SDM, sarpras, lingkungan fisik/social, dan lainnya) dan masyarakat sekitarnya untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Namun, sekolah belum mampu menjalin kerjasama dengan perusahaan sekitar atau pihak lain untuk membantu dana pendidikan melalui sponsorship atau beasiswa atau untuk mendukung pelaksanaan program.

2. Pembahasan Kerjasama Sekolah

Kerjasama sekolah merupakan kerjasama internal antar warga sekolah dan kerjasama eksternal antara sekolah dengan pihak terkait lainnya guna mendukung pelaksanaan program sekolah. Dari hasil perhitungan data diketahui bahwa kerjasama dalam pelaksanaan program sekolah pada kategori baik. Hal ini menunjukkan kerjasama internal dan

eksternal sekolah telah terjalin dengan baik. Indikator kerjasama sekolah akan dijelaskan berikut ini.

a. Kerjasama internal

Hasil perhitungan data angket diketahui bahwa kerjasama internal sekolah pada kategori baik. Data ini dikuatkan dengan keterangan dari wakil kepala sekolah yang mengatakan bahwa kerjasama internal sekolah berjalan dengan baik. Kerjasama internal ini terlihat dari adanya *team work* berupa unit-unit kelompok kerja yang kompak, cerdas, dan dinamis dalam pelaksanaan program sekolah, pelaksanaan kegiatan piket dan kegiatan rapat antar warga sekolah yang baik. Selain itu juga terjalinnya hubungan warga sekolah yang harmonis telah menciptakan iklim kerja dan suasana belajar yang kondusif diantara warga sekolah.

Kerjasama antara kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa yang terjalin di sekolah harus dipelihara untuk menciptakan sekolah yang kondusif dan harmonis sehingga pelaksanaan program sekolah dapat terlaksana dengan baik. Kerjasama antara pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah terlihat dari kegiatan rapat rutin, koordinasi antar unit kerja yang baik, dan masing-masing unit kerja bekerja dengan kompak dan sesuai dengan tanggungjawabnya demi mencapai tujuan bersama. Dengan demikian program-program sekolah akan dapat terlaksana dengan baik. Kerjasama antara sesama guru juga harus dipelihara dengan baik, sehingga kegiatan belajar mengajar yang

dilakukan oleh para guru dapat berjalan dengan baik. Hubungan yang baik antar guru akan berakibat pada kondisi suasana kerja yang kondusif di sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyasa (2005: 57) yang menyatakan bahwa hubungan baik antar guru perlu diciptakan agar terjalin iklim dan suasana kerja yang kondusif dan menyenangkan.

b. Kerjasama eksternal

Dari data yang diperoleh diketahui kerjasama eksternal sekolah pada kategori baik. Hal ini menandakan kerjasama antara sekolah dengan pihak terkait lainnya telah berlangsung dengan baik. Kerjasama dalam pelaksanaan program sekolah dilakukan dengan pemerintah dan masyarakat.

Kerjasama antara sekolah dengan pemerintah atau dinas pendidikan melalui berbagai kegiatan rapat dinas dan sinkronisasi program dinas dengan program sekolah. Hal ini untuk menjalin komunikasi antara sekolah dengan dinas, sehingga program-program dinas tidak mengganggu program sekolah dan juga sebaliknya. Dengan demikian, sekolah dapat melaksanakan program sekolahnya sesuai dengan kebijakan dinas pendidikan setempat.

Kerjasama yang dilakukan antara SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dengan orang tua siswa atau masyarakat sekitar dibentuk dalam wadah komite sekolah, kemudian sekolah juga bekerjasama dengan dunia usaha dan industri dalam program pendidikan sistem ganda untuk membantu pelaksanaan program sekolah. Kegiatan

kerjasama ini menunjukkan bahwa hubungan antara sekolah dengan masyarakat dan dunia usaha/industri telah terjalin dengan baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Depdiknas (2009: 63) bahwa kerjasama sekolah yang baik ditunjukkan oleh hubungan sekolah dan masyarakat yang erat.

Kerjasama antara sekolah dan masyarakat merupakan kegiatan sekolah yang melibatkan masyarakat baik secara individual maupun secara organisasi dengan prinsip sukarela, saling menguntungkan dan memiliki kepentingan bersama dalam suatu wadah dalam rangka membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan mendayagunakan potensi masyarakat dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Kerjasama antara sekolah dengan masyarakat di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta terbentuk dalam wadah komite sekolah yang dikukuhkan dengan SK No. 89/III.4/KEP/2007 tentang Susunan Pengurus Komite Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Yogyakarta Periode 2007-2010.

Selain itu, sekolah juga menjaring kerjasama dengan dunia usaha dan industri. Jaringan kerjasama sekolah dengan dunia usaha dan industri dilaksanakan untuk membantu pelaksanaan program sekolah berupa pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran berupa kegiatan praktek kerja industri atau magang, uji kompetensi

siswa, dan pemasaran lulusan. Pihak dunia usaha dan industri yang menjadi mitra sekolah diantaranya PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA, PT. PORTER. PT HINO, CV UTILINDO PERKASA, dan lain sebagainya. Jalinan kerjasama tersebut merupakan realisasi pelaksanaan program sekolah dari nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding, MoU*) yang telah disepakati berasama, salah satunya yaitu *Mou* dengan CV UTILINDO PERKASA dengan No. *MoU* E-2//a.20/XII/09 yang dilaksanakan mulai tahun 2009 sampai dengan 2010 berupa praktek kerja industri dan uji kompetensi siswa. Hal ini ditegaskan oleh Depdiknas (2009: 64) bahwa keberhasilan sekolah menjalin kemitraan atau kerjasama dalam pelaksanaan program sekolah ditunjukkan oleh terealisasinya kontrak kerjasama yang dituangkan dalam MoU dengan pihak terkait.

Kerjasama antara sekolah dengan pihak terkait lainnya sudah sejalan dengan Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan mengenai peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah disebutkan bahwa setiap sekolah/madrasah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan. Kemitraan sekolah/madrasah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah. Sistem kemitraan sekolah/madrasah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis. Strategi yang dilakukan sekolah untuk membina hubungan kerjasama dengan pemerintah, masyarakat, maupun dunia

usaha/industri dilakukan dengan pertemuan-pertemuan antar kedua belah pihak maupun kunjungan industri.

3. Pembahasan Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi merupakan bentuk dukungan dari para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program sekolah. Bentuk partisipasi dari *stakeholders* tersebut berupa dukungan dana, dukungan material/fasilitas, dukungan pemikiran, dan dukungan tenaga. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Rohmat (2007: ii) yang menyatakan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di SMAN 1 Pajangan Bantul DIY dalam bentuk dana, barang/materi, tenaga, dan sumbangan pemikiran. Hal ini juga di tegaskan oleh Depdiknas (2009: 9) bahwa bentuk-bentuk partisipasi *stakeholders* diantaranya adalah: a) berupa dukungan dana, (b) berupa dukungan material/fasilitas, (c) berupa dukungan pemikiran, dan (d) berupa dukungan tenaga.

a. Dukungan dana

Partisipasi *stakeholders* dalam penyelenggaraan program sekolah berupa dukungan dana pada kategori baik. Dari hasil perhitungan rata-rata diketahui dukungan dana dari pemerintah pada kategori besar, dukungan dari warga sekolah pada kategori rendah, dan dukungan dari masyarakat pada kategori sangat besar. Hal ini menunjukkan dukungan dana yang paling tinggi berasal dari masyarakat.

Hasil di atas didukung dari hasil wawancara dan data dokumentasi yang menyatakan sumbangan dana sekolah yang paling besar berasal dari wali siswa. Berdasarkan data dokumentasi anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) pada neraca tahun 2009 dan data pokok sekolah diketahui dukungan dana pada tahun 2009 dari para *stakeholder* sebagai berikut.

Tabel 36. Dukungan Dana *Stakeholders* Pada Tahun Ajaran 2009/2010

No	<i>Stakeholder</i>	Jumlah Dana (Rp)
1	Pemerintah pusat	850.000.000
2	Pemerintah daerah	398.128.000
3	Masyarakat	6.422.170.000

Data tabel 41 menunjukkan dukungan dana dari para *stakeholder* yang paling tinggi berasal dari masyarakat/orang tua siswa berupa uang pendaftaran Rp 20.064.000, uang pendidikan Rp 6.148.106.000, dan dana komite sekolah Rp 254.000.000 dengan jumlah total Rp 6.422.170. Bantuan dana dari pemerintah pusat berupa dana RSBI Rp 700.000.000, RKK Rp 75.000.000, dan *school business center* Rp 75.000.000 dengan jumlah total Rp 750.000.000. Bantuan dana dari pemerintah daerah provinsi berupa dana BOMM Rp 190.108.000, Beasiswa Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah (SMK)/Bantuan Khusus Murid (BKM) Rp 186.420.000, RAPUS Rp 192.000.000, dan RETRIEVAL Rp 2.400.000 dengan jumlah total Rp 398.128.000.

b. Dukungan material/fasilitas

Partisipasi *stakeholders* dalam penyelenggaraan program sekolah berupa dukungan material/fasilitas pada kategori cukup baik. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata diketahui dukungan material/fasilitas dari pemerintah pada kategori rendah, dukungan dari warga sekolah dan masyarakat pada kategori cukup besar. Namun demikian, partisipasi *stakeholders* berupa dukungan material/fasilitas yang paling tinggi berasal dari masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam berupa dukungan material/fasilitas di SMK Muhammadiyah 3 pada kategori rendah. Hal ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Rohmat (2007: iii) yang mengungkapkan partisipasi masyarakat di SMAN 1 Pajangan Bantul dalam bidang pendidikan yang berbentuk barang/materi (<1%) atau sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta telah berhasil melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk material/fasilitas guna mendukung penyelenggaraan program sekolah.

Partisipasi *stakeholder* di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dalam bentuk material/fasilitas yang berasal dari pemerintah yaitu buku-buku untuk melengkapi koleksi perpustakaan. Dari warga sekolah sendiri terutama dari para guru adalah sarana belajar untuk siswa yang meliputi modul bahan ajar. Kemudian partisipasi dari masyarakat terutama orang tua siswa yakni pemberian sarana belajar

kepada anak-anaknya yang digunakan untuk belajar di sekolah maupun di rumah. Partisipasi dari masyarakat yang lain yaitu dari dunia usaha dan industri yang memberikan fasilitas tempat praktek kepada para siswa maupun guru untuk melaksanakan praktek kerja industri dan magang.

c. Dukungan pemikiran

Partisipasi *stakeholders* dalam penyelenggaraan program sekolah berupa dukungan pemikiran pada kategori baik. Dari hasil perhitungan rata-rata diketahui dukungan pemikiran dari pemerintah adalah cukup besar, dukungan dari warga sekolah sangat besar dan dukungan dari masyarakat rendah. Hal ini menunjukkan partisipasi *stakeholders* berupa dukungan pemikiran yang paling tinggi adalah dari warga sekolah sekolah.

Partisipasi *stakeholders* dalam bentuk pemikiran di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta berupa pemikiran-pemikiran/masukan-masukan, aspirasi, maupun kritik pada saat pertemuan dan dialog untuk kemajuan sekolah. Partisipasi *stakeholders* dalam bentuk pemikiran melalui pertemuan dan dialog dengan komite sekolah maupun rapat dinas dengan dinas pendidikan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sugiyatno (2007: 19) yang menyatakan untuk menampung aspirasi warga intern sekolah dan ekstern sekolah diadakan pertemuan rutin dengan komite sekolah.

d. Dukungan tenaga

Partisipasi *stakeholders* dalam penyelenggaraan program sekolah berupa dukungan tenaga pada kategori cukup baik. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata diketahui dukungan tenaga dari pemerintah dan masyarakat adalah cukup besar, sedangkan dukungan dari warga sekolah adalah sangat besar. Data ini menunjukkan partisipasi dalam bentuk tenaga yang paling tinggi berasal dari warga sekolah.

Partisipasi dari pemerintah berupa dukungan tenaga yaitu dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dengan menjadi penyaji dalam acara *In House Training* (IHT) di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta pada tanggal 14 Juli 2009. Partisipasi dari warga sekolah berupa dukungan tenaga yaitu dilaksanakannya tugas masing-masing warga sekolah sesuai dengan program-program sekolah yang dilaksanakan. Partisipasi dari masyarakat salah satunya dari mahasiswa UNY dalam kegiatan KKN-PPL yang ikut menjadi guru dan memberikan bantuan tenaga kepada sekolah dalam melaksanakan program-programnya. Kemudian partisipasi dari dunia usaha dan industri yaitu menjadi penguji di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dalam pelaksanaan uji kompetensi siswa.

4. Pembahasan Keterbukaan Sekolah

Dengan implementasi MBS diharapkan sekolah lebih terbuka kepada para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan sekolah baik

program maupun keuangan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan kecenderungan responden menyatakan keterbukaan sekolah pada kategori baik. Hal ini menunjukkan keterbukaan di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta mengenai program dan dana sekolah menurut responden telah dilakukan dengan baik. Hasil ini sama dengan penelitian Tamsir (2010:ii) di SMKN 2 Wonosari, disimpulkan transparansi manajemen telah dilakukan dengan baik di bidang program dan kebijakan maupun di bidang keuangan.

Keterbukaan dalam pengelolaan program dan dana sekolah sangat penting. Pengelolaan program dan dana sekolah yang terbuka dapat meningkatkan kepercayaan di antara warga sekolah dengan pihak eksternal sekolah seperti komite sekolah, masyarakat, dan orang tua siswa. Selain itu, pengelolaan dana yang transparan dapat menghindari rasa saling curiga yang berpotensi menimbulkan konflik baik diantara warga sekolah maupun dengan masyarakat.

a. Keterlibatan warga sekolah dan komite sekolah

Keterlibatan warga sekolah dan komite sekolah dalam perumusan program dan keuangan sekolah menurut responden pada kategori baik. Keterlibatan warga sekolah ini terlihat dalam pengambilan keputusan bersama dengan kepala sekolah dalam perumusan program dan keuangan sekolah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Surya Dharma (2010: 498) bahwa keterbukaan/transparansi ini ditunjukkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan, penggunaan uang, dan sebagainya, yang selalu melibatkan pihak-pihak terkait sebagai alat kontrol.

Keterbukaan sekolah tidak hanya dilakukan melalui laporan-laporan keuangan saja, akan tetapi keterbukaan sekolah dapat ditunjukkan dalam pengambilan keputusan, penggunaan uang dan sebagainya yang selalu melibatkan pihak-pihak terkait sebagai kontrol. Hal ini sejalan dengan pernyataan Depdiknas (2001: 16) bahwa keterbukaan sekolah ditunjukkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, penggunaan uang dan sebagainya, yang selalu melibatkan pihak-pihak terkait sebagai alat kontrol dalam hal ini yaitu keterlibatan warga sekolah dan komite sekolah dalam perumusan program dan keuangan sekolah

b. Kemudahan mengakses informasi oleh warga sekolah dan masyarakat

Dalam hal kemudahan mengakses informasi oleh publik terkait dengan pengelolaan sekolah pada kategori baik. Hal ini menunjukkan sekolah terbuka kepada semua pihak yang berkepentingan dengan sekolah dalam mengakses informasi mengenai program dan keuangan sekolah. Siapa saja yang ingin mengetahui apa yang dikerjakan sekolah, sekolah memberikan kemudahan untuk mengakses informasi melalui wadah informasi yang ada. Hal ini ditegaskan oleh Nurkolis (2006: 44) yang menyatakan bahwa segala informasi tentang sekolah harus disebarluaskan ke segala penjuru, baik itu terhadap para guru, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, penjaga

sekolah, orang tua siswa, dewan sekolah, siswa sendiri dan masyarakat luas.

Program dan keuangan sekolah disosialisasikan kepada warga sekolah dan masyarakat dalam suatu pertemuan. Informasi terkait dengan program dan keuangan sekolah dapat diakses oleh warga sekolah dan masyarakat melalui komunikasi langsung dengan kepala sekolah maupun penanggungjawab program maupun melalui layanan informasi sekolah yang dijaga oleh petugas piket. Selain itu penyebaran informasi program-program sekolah dilakukan dalam bentuk papan pengumuman, laporan, dan website sekolah. Sedangkan untuk informasi tentang keuangan sekolah hanya dapat diakses melalui komunikasi langsung dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan bendahara dengan adanya laporan keuangan.

5. Akuntabilitas Sekolah

Akuntabilitas sekolah erat kaitannya dengan kepercayaan para pemangku kepentingan. Dari data yang terkumpul diketahui bahwa akuntabilitas sekolah pada kategori baik. Hal ini menunjukkan pertanggungjawaban sekolah kepada para pemangku kepentingan telah dilaksanakan dengan baik.

Kepala sekolah dan guru merupakan pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program sekolah, sedangkan masyarakat merupakan pihak yang dibebani biaya, sehingga pengelola sekolah harus memberikan kejelasan terkait dengan keuangan dan program sekolah. Akuntabilitas

dapat disimpulkan baik jika pihak tersebut telah mengetahui kondisi keuangan dan program sekolah baik secara tertulis maupun lisan, dan juga terlihat dari kepuasan warga sekolah dan komite sekolah terhadap sekolah.

Akuntabilitas proses dan hasil pelaksanaan program sekolah berupa pelaporan pada kategori baik. Hal ini menunjukkan sekolah telah membuat laporan terkait dengan pelaksanaan program sekolah dan keuangan sekolah untuk dilaporkan kepada pihak terkait. Pelaporan pelaksanaan program sekolah dalam bentuk laporan tertulis diberikan kepada pihak pemerintah, yayasan, komite sekolah, dan warga sekolah. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Saiful Sagala (2006: 108) bahwa akuntabilitas ditunjukkan dengan adanya mekanisme pertanggungjawaban, laporan secara berkala maupun laporan pertanggungjawaban. Pendapat ini juga sejalan dengan hasil penelitian Tamsir (2010: ii) yaitu pada aspek pertanggungjawaban ketercapaian program dan pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan baik melalui pembuatan laporan tertulis kepada komite sekolah, wali murid, dan warga sekolah.

Adapun akuntabilitas dalam bentuk pertemuan menurut responden pada kategori baik. Hal ini didukung hasil wawancara yang menyatakan bahwa masing-masing penanggungjawab program memberikan pertanggungjawaban kepada kepala sekolah dan komite sekolah melalui pertemuan untuk dibahas hasil pelaksanaan yang telah dicapai. Kemudian pada akhir tahun dilakukan pertemuan dengan pihak dinas pendidikan,

yayasan, dan orang tua siswa untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program sekolah.

Baik warga sekolah maupun komite sekolah merasa puas dengan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh sekolah. Hal ini terbukti dengan tidak adanya protes/komplain dari warga sekolah dan komite sekolah. Hal ini menandakan bahwa akuntabilitas sekolah telah berjalan dengan baik dengan adanya kepuasan dari warga sekolah dan komite sekolah sesuai dengan pernyataan Depdiknas (2009: 45) bahwa keberhasilan akuntabilitas sekolah adalah ditandai dengan meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi data hasil peneitian dan pembahasan mengenai implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemandirian sekolah ditunjukkan dengan kewenangan sekolah dalam mengembangkan kurikulum dan program pembelajaran menurut inisiatif warga sekolah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pada pemenuhan sumber daya pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah belum memenuhi standar minimal sesuai dengan tuntutan program, namun terdapat inisatif sekolah untuk meningkat kualitas sumber daya manusia dan peralatan melalui diklat, memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi akademik, dan membangun sarana prasarana sekolah yang belum terpenuhi. Terdapat usaha dan kegiatan sekolah dalam penggalian dana dengan memanfaatkan potensi sumber daya sekolah dengan mendirikan unit produksi dan jasa sekolah.
2. Kerjasama internal sekolah telah terbangun secara baik dengan sinerginya antar unit kegiatan sekolah yang merupakan team work sekolah atau antar individu warga sekolah. Kerjasama eksternal sekolah telah dilakukan dengan pemerintah, masyarakat dalam wadah komite sekolah dan dunia usaha/ industri. Kerjasama telah berjalan dengan baik dan memiliki kontribusi nyata terhadap kemajuan sekolah, antara lain dalam pengembangan kurikulum,

pemenuhan dana, sarana praasana, pelaksanaan prakerin, uji kompetensi, dan penyaluran tenaga kerja.

3. Partisipasi dalam penyelenggaraan program sekolah berupa dukungan dana/uang, dukungan material/fasilitas, dukungan pemikiran, dan dana dukungan. Partisipasi *stakeholders* yang paling tinggi berupa dukungan dana. Secara keseluruhan, partisipasi dalam penyelenggaraan program sekolah pada kategori baik.
4. Keterbukaan sekolah terkait dengan program dan dana sekolah termasuk kategori baik. Program dan dana sekolah dirumuskan bersama dengan melibatkan warga sekolah dan komite sekolah. Sekolah membuat media/wadah komunikasi dan informasi terhadap program dan keuangan sekolah dalam bentuk komunikasi langsung, papan pengumuman, website sekolah, maupun laporan kegiatan.
5. Akuntabilitas sekolah pada kategori baik, yaitu sekolah telah memberikan pertanggungjawaban proses dan hasil pelaksanaan program maupun keuangan sekolah kepada warga sekolah, komite sekolah, yayasan, dan pemerintah. Sekolah membentuk mekanisme pertanggungjawaban proses dan hasil pelaksanaan program melalui pelaporan yang disampaikan dalam pertemuan rapat dengan warga sekolah, komite sekolah, yayasan, dan pemerintah. Warga sekolah dan komite sekolah merasa puas terhadap pertanggungjawaban yang disampaikan sekolah dengan tidak adanya protes.

Secara keseluruhan implementasi manajemen berbasis sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta pada kategori baik. Implementasi manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian sekolah, kerjasama sekolah, bentuk partisipasi, keterbukaan sekolah, dan akuntabilitas sekolah telah berjalan dengan baik.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini antara lain:

1. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan secara luas karena penelitian ini studi kasus dilakukan di satu tempat saja yaitu SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta, tetapi hasil penelitian ini dapat juga berlaku pada SMK yang lain.
2. Dalam penelitian ini hanya membahas lima prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah, masih ada prinsip MBS yang lain yaitu suistainabilitas (keberlangsungan) program dan pendanaan sekolah yang tidak diteliti.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka ada beberapa pandangan peneliti yang sekiranya dapat diangkat sebagai saran bagi pihak sekolah, dan peneliti yang akan datang.

1. Bagi sekolah hendaknya untuk meningkatkan kualifikasi akademik guru yang belum sesuai dengan tuntutan program dan melengkapi kekurangan sarana

prasarana sekolah. Selain itu, kerjasama dengan pihak terkait agar lebih diintensifkan sehingga sekolah bisa mendapatkan bantuan dana dari perusahaan atau lembaga selain pemerintah dan orang tua siswa.

2. Bagi pembaca diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dengan tinjauan yang berbeda yaitu tentang sustainabilitas program dan pendanaan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Irawan, dkk. (2004). *Mendagangkan Sekolah: Studi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di DKI Jakarta*. Jakarta: ICW.
- Anas Sudijono. (2009). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bangun Ferdinand. (2009). Survei tentang MBS Berdasarkan Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik di SMAN 1 Barumun. *Laporan Penelitian*. Universitas Sumatera Utara.
- Daryanto. (2006). *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Depdiknas. (2001). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Buku I Konsep dan Pelaksanaan*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen Depdiknas.
- _____. (2009). *Manajemen Berbasis Sekolah dalam Kerangka Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Direktorat Mandikdasmen.
- _____. (2006). *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan.
- Echols M. John & Hasan Shadily. (2006). *Kamus Indonesia Inggris*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Engkoswara & Aan Komariah. (2010). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Lolowang. (2008). Implementasi MPMBS di SD Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Bolaang Mongondow. *Jurnal Varia Pendidikan*. (Vol. 20/No. 1). Hlm. 15-28.
- Harsono. (2007). *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Ibrahim Bafadal. (2003). *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id> pada tanggal 20 Maret 2009, Jam 14.15 WIB.

- Malang Corruption Watch. 2006. *Hasil Riset MCW: Tentang Pelayanan Publik (Kesehatan, Pendidikan, Administrasi dasar) Di Kota Malang*. Diakses dari <http://www.mcw-malang.org/HASIL%20RISET%20MCW.doc> pada tanggal 20 Maret 2009, Jam 14.30 WIB.
- Mulyasa. (2003). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mujari. (2007). Evaluasi Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMPN 1 Sewon, SMPN 3 Pleret, dan SMP Muhammadiyah Bantul. *Tesis*. PPS-UNY.
- Nurdin Hidayat. (2010). Peran Komite Sekolah dalam Implementasi Manajemen Pendidikan di SMKN 4 Yogyakarta dan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. *Tesis*. PPS-UNY.
- Nurkolis. (2006). *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model, dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Rohiat. (2009). *Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik*. Bandung: Rafika Aditama.
- Rohmat. (2007). Upaya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan di SMAN 1 Pajangan Bantul DIY. *Tesis*. PPS-UNY.
- Saifuddin Azwar. (2008). *Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saiful Sagala. (2006). *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat*. Jakarta: PT Nimas Multima.
- Sallis, Edward. (2006). *Total Quality Management in Education*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Sugiyatno. (2007). Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah SMKN 1 Boyolali. *Prosiding*. Boyolali: SMKN 1 Boyolali.
- Suharsimi Arikunto. (2008). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Surya Darma. (2008). *Menumbuhkan Semangat Kerjasama*. Jakarta: Depdiknas.
- _____. (2010). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.

- Suparlan. (2007). *Kemitraan Sejkolah dalam MBS*. Diakses dari <http://www.suparlan.com> pada tanggal 17 Desember 2009, Jam 11.00 WIB.
- Suwati. (2010). *Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat di SMK Brawijaya*. Tesis. PPS-UNY.
- Tamsir. (2010). *Implementasi MBS di SMKN 2 Wonosari Gunungkidul*. Tesis. PPS-UNY.
- Tim UNY. (2011). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Umaedi. (1999). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Diakses dari <http://www.ssep.net/director.html> pada tanggal 20 Maret 2009, Jam 14.00 WIB
- Umaedi, dkk. (2008). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Yuliana. (2007). *Problematisa Sistem Pendidikan Indonesia*. Diakses dari <http://www.blogster.com/yuliana> pada tanggal tanggal 20 Maret 2009, Jam 14.10 WIB
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0490/1992 tentang Kerjasama SMK dengan Dunia Usaha dan Industri.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK

KARTU BIMBINGAN PROYEK AKHIR/ULAS AKHIR SKRIPSI

PRM/OTG/11-05

27 MARET 2008

Nama Mahasiswa M. Alfan Afarisi
No. Mahasiswa 05504244041
Judul Skripsi Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah
di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta
Dosen Pembimbing Kiz Haryana, M.Pd

Bimb. Ke	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Catatan Dosen Pembimbing	Tanda tangan Dosen Pemb.
1	Jum'at 15 Maret 09	Konsultasi judul	Cari Referensi Pendukung	
2	Kamis 8 April 09	Pengertian skripsi	Menyusun ke Petalok	
3	Jum'at 10 Februari 10	BAB I - BAB II	Bab I - Bab II Revisi	
4	Kamis 4 Maret 10	BAB I - BAB II	Revisi - Buat Instrumen	
5	Kamis 18 Maret 10	BAB I - BAB II	Revisi - Perbaiki Instrumen	
6	Jum'at 2 April 10	BAB II	Validasi Instrumen	
7	Jum'at 9 April 10	BAB III	Kont Validasi Instrumen OK Instrumen Bisa di terapkan	
8	Sabtu 29 April 10	BAB IV	BAB IV Revisi	

Keterangan:

1. Mahasiswa wajib bimbingan minimal 8 kali
bila lebih dari 8 kali, kartu ini boleh dicopy
2. Kartu Wajib Dilampirkan pada laporan PBTXII



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK

KARTU BIMBINGAN PROYEK AKHIR TUGAS AKHIR SKRIPSI

FRM/CTG/11-05
27 MARET 2008

Nama Mahasiswa: M. Allan Alfarid
No. Mahasiswa: 05504244041
Judul Skripsi: Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah
di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta
Dosen Pembimbing: Idr Haryono, M.Pd.

Bimb. Ka	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Catatan Dosen Pembimbing	Tanda tangan Dosen Pemb.
9	Kamis 17 Juli 10	Bab 9 - Bab 10	Bab 9 - Bab 10 Revisi	✓
10	Kamis 24 Desember 10	Bab 9 - Bab 10	Bab 9 - Bab 10 Revisi	✓
11	Kamis 17 Januari 11	Bab 9 - Bab 10	Bab 9 - Bab 10 Revisi	✓
12	Jumat 21 Januari 11		Acc. Ujian	✓
13	Jumat 25 Juli 12		Major Ujian	✓

Keterangan:

1. Mahasiswa wajib bimbingan minimal 5 kali
Jika lebih dari 5 kali, kartu ini boleh dicopy
2. Kartu Wajib Diampirkan pada laporan PAFTAS

LAMPIRAN 2

SURAT IJIN PENELITIAN



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK

Jalan: Kampus Balarong, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 848.588 psw. (0274) 848.582 (0274) 848.134 Fax. (0274) 848.134
website: <http://www.uny.ac.id> e-mail: admis@uny.ac.id info@uny.ac.id



Nomor : 2746/1034.15/PL/2009

08 Desember 2009

Hal : Permohonan Ijin Observasi/Survey/Penelitian

Yth. Kepala SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta
Jl. Prastika No. 62
Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Mata Kuliah Tugas Akhir Skripsi, kami mohon dengan hormat bantuan Saudara memberikan Ijin Observasi/Survey/Penelitian dengan fokus permasalahan **Observasi/Survey dalam rangka Penyusunan Proposal Penelitian**, bagi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta sebagai berikut:

No.	Nama	NIM	Jurusan/Program Studi
1	M Alfin Alfarisi	05504244041	Pend. Teknik Otomotif - S1

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya yang baik selama ini, kami mengucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Sudji Muradi

NIP 19530310 197803 1 003

Tembusan:

1. Ketua Jurusan ybs.
2. Ketua Program Studi ybs.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK

Jalan: Kampus Karangmalang Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 560-088 ext. 270, 288, 332, 3373; Faksimil: (0274) 560-088
Website: www.uniyog.ac.id Email: info@uniyog.ac.id webmaster@uniyog.ac.id



Surabaya, 19 April 2019

Nomor: 903/1034.13/PL/2019
Lamp: 1 (satu) lembar
Hal: Persembahan Ijin Penelitian

19 April 2019

Yth

1. Gubernur Provinsi DIY c.q. Ka. Biro Administrasi Pemerintahan Senda Provinsi DIY
Wakilnya Yogyakarta c.q. Kepala Dinas Perijinan Kota Yogyakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta
4. Kepala SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Mata Kuliah Tugas Akhir Skripsi kami mohon dengan hormat bantuan Saudara memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian dengan judul "Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta", bagi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta terdapat di bawah ini:

No.	Nama	NIM	Jurusan/Prodi	Lokasi Penelitian
1	M. Alhan Alfarid	05034244041	Ford. Teknik Otomotif - S1	SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta

Adapun pelaksanaan penelitian dilakukan mulai tanggal 19 April 2019 sampai dengan selesai.

Dengan permohonan ini, atas bantuan dan kerjasama yang baik selama ini, kami mengucapkan terima kasih.

Ditetapkan,
di Yogyakarta, 19 April 2019.



Dr. Sudji Mulyadi
NIP. 19520310-197803-1-001

Penelitian

1. Ketua Jurusan jbr.
2. Ketua Program Studi jbr.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK

Kampus: Kampus Sekeloa Gunung, Yogyakarta 55081
Telp. (0271) 525 101 ext. 174, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000



Nomor: 1034/15/PL/2018
21 April 2018
Hal: Permisihan (tanpa Observasi/Survey/Pembelajaran)

Yth. Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Yogyakarta
Jl. Sultan Agung No. 14
Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Mata Kuliah Tugas Akhir Skripsi, kami mohon dengan hormat
Istiqomah Saadiah memberikan ijin Observasi/Survey/Pembelajaran dengan fokus permasalahan
"Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di SMK Muhammadiyah 1
Yogyakarta" bagi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta sebagai
berikut:

No	Nama	NIM	Jurusan/Program Studi
1.	M. Alhas Alhasul	03504244041	Psnd Teknik Otomotif - Si

Dengan permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya yang baik sehingga ini, kami
mengucapkan terima kasih.

Dekas,

a.h. Pembantu Dekan I.



Dr. Kadek Mulya
NIP. 19530319 197803 1 003

Penyusunan

1. Ketua Jurusan yth.
2. Ketua Program Studi yth.

**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA**

Jalan Sekeloa Agung No. 54, Tembung 55136 (TPO) - Yogyakarta 55136 (TPO) - Yogyakarta 55136

LEMB. PENELITIAN/KEHIMPUNAN/DIRIGENTABU

No. 134.BEK.024.4/2009

Surat undangan untuk diri : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
No. 1746/US4.15/P1/2009 Tgl. 08 Desember 2009
Perihal : Surat Izin Penelitian

- Mengingat :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
 2. Surat Keputusan PP Muhammadiyah No. 47/SK-PP/02-4/14/1997 tentang Tata cara Penelitian Dasar dan Menengah Muhammadiyah
 3. Surat Keputusan PP Muhammadiyah No. 118/KEP1.0/2008 tentang Pedoman Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah
 4. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PDM Kota Yogyakarta No. 1192.492/2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian Kerja Praktek Observasi & Lapangan Majelis dan Perguruan Dasar & Menengah Muhammadiyah Kota Yogyakarta

Mengpertalikan : Laporan perencanaan proposal berupa angket/daftar observasi/daftar wawancara peneliti kerja oleh pembantu dan penyerta dari penelitian/praktek kerja observasi oleh Sekretaris U Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PDM Kota Yogyakarta

Berdasarkan Petunjuk Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PDM Kota Yogyakarta, hari SENIN tanggal 08 Desember 1431 H, bertepatan tanggal 21 Desember 2009 M, yang telah ada agenda sebagai berikut penelitian ini penelitian/praktek kerja observasi, maka bersama ini

memberikan izin kepada :

Nama Terang : M. Alfa Ahsad No. NIS : 0556-C-60041
Pekerjaan : Mahasiswa pada Jurusan Pendidikan Teknik Onsite
Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
Alamat Kampus Karangmalang Yogyakarta
Pembimbing : -

untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi :

Judul : OBSERVASI SURVEY DALAM RANGKA PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN

Lokasi : SMK Mah. 3 Yogyakarta, Jl. Pramuka Yogyakarta

BERHAK PASTI DAN BERHAK BERTUTU

1. Mendapatkan jaminan surat izin penelitian yang benar
2. Right to work the work of others (menghormati hak-hak & kebebasan)
3. Right to work the work of others (menghormati hak-hak & kebebasan)
4. Right to work the work of others (menghormati hak-hak & kebebasan)
5. Right to work the work of others (menghormati hak-hak & kebebasan)
6. Right to work the work of others (menghormati hak-hak & kebebasan)
7. Right to work the work of others (menghormati hak-hak & kebebasan)
8. Right to work the work of others (menghormati hak-hak & kebebasan)
9. Right to work the work of others (menghormati hak-hak & kebebasan)
10. Right to work the work of others (menghormati hak-hak & kebebasan)

MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

12-13-2009 tanggal 22-02-2010

Tanda tangan Penyerta Juri

M. Alfa Ahsad

Tanda tangan

No. 134.BEK.024.4/2009
Jalan Sekeloa Agung No. 54, Tembung 55136 (TPO) - Yogyakarta 55136 (TPO) - Yogyakarta 55136

DR. HJ. GHOPIA LILY
NPS. 07.003

DR. HJ. GHOPIA LILY
NPS. 07.003



UNDANG PERIZINAN

di Nomor No. 30 Yogyakarta 2014 Tahun 2014
 2. Nomor No. 30 Yogyakarta 2014 Tahun 2014
 3. Nomor No. 30 Yogyakarta 2014 Tahun 2014

SURAT INI

ALAMAT

Dikirim

Mengingat

Surat ini. Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
 Nomor 1000/2014/2014 Tanggal 10/04/2014

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Struktur dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perumahan Kota Yogyakarta
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Yogyakarta
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pelembagaan Pokok Kerja Lapangan dan Kajian Kerja Negeri di Wilayah Kota Yogyakarta
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 361/2004 tentang Pembentukan dan Rekomendasi Penetapan dan Pelaksanaan Survei dan PIR di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dikirim Kepada

Nama

M. ALFAN ALFARIZ

KD 885 / NIS 000404041

Pekerjaan

Mahasiswa Fak. Teknik LPT

Jam

Kampus Karangmasang, Yogyakarta

Pemangku

Dr. Haryono, M. Pd

Kepuasan

Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DI SMK MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA

Lokasi/Responden

Kota Yogyakarta

Waktu

10/04/2014 sampai 10/07/2014

Lampiran

Proposal dan Daftar Pertanyaan

Dengan ketentuan

1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Dik. Dinas Perumahan Kota Yogyakarta)
 2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
 3. ini ini tidak dapat digunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
 4. Surat ini ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila tidak dipertahankan ketentuan-ketentuan tersebut diatas
- Pemohon diarahkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat membuat surat-surat lainnya

Tanda tangan
 Petanggung Jari

M. ALFAN ALFARIZ

Ditandatangani Yogyakarta

10/04/2014

20/04/2014

20/04/2014

20/04/2014

20/04/2014

20/04/2014

20/04/2014

20/04/2014

20/04/2014

20/04/2014

Terselenggara

1. Walikota Yogyakarta sebagai Responden

2. Ka. Bina Administrasi Pembangunan Sekeloa Prop. DIY

3. Ka. Dinas Perumahan Kota Yogyakarta



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BERKERTAHAT DARAH

Kepolisian - Kesehatan - Yogyakarta - 82213

SURAT KETERANGAN LULUS / REKOMENDASI

Nomor : 1001/240/2014

Memoranda Surat
Tanggal Surat

Dinas Kepolisian Tersebut Lahir
15 April 2014

Surat : 1001/240/2014
Perihal : LULUS / REKOMENDASI

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008, tentang Peraturan लग्न Pelayanan Publik yang Lemah, Penelitian dan Pengembangan yang dalam rangka Asas dan Yang yang akan melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Peraturan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2008, tentang Peraturan Tata dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Seluruhnya Departemen Pelayanan Rakyat Daerah

Dipetik untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan penelitian/pengembangan yang akan dilakukan di masa depan

N o 1/2

M. ALFAN ALFARIZ

NPWP : 8700042340049

Nama
Jabatan

Koramil Karangwarung Yogyakarta

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta

Jarak

Kota Yogyakarta

Waktu

1 (satu) Bulan

Mula Tanggal : 15 April s.d 15 Juli 2014

Keterangan

1. Menunjukkan surat keterangan ini kepada pejabat berwenang di instansi melalui surat yang berwenang mengeluarkan ini di wilayah kerja pelaksanaan kegiatan di atas
2. Keterangan (keterangan) ini hanya dipergunakan untuk keperluan studi dan/atau dalam rangka kegiatan penelitian
3. Penelitian keterangan (keterangan) ini wajib membuat laporan yang berlaku di instansi kegiatan
4. Hasil penelitian surat keterangan dengan cara mengajukan surat keterangan ini ke instansi
5. Keterangan (keterangan) yang diberikan dapat digunakan sebagai salah satu bukti pelaksanaan kegiatan sebagai salah satu pemegang (keterangan) ini tidak memiliki tanggung jawab yang berlaku
6. Keterangan ini hanya berlaku untuk kegiatan di atas di bawah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan, dan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah (SP) dalam bentuk perintah (SP) beserta surat perintah kegiatan tersebut (keterangan ini)

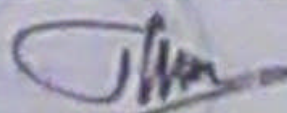
Diketahui di Yogyakarta

Pada tanggal 10 April 2014

Atas Sekretaris Daerah

Juana (Pria) dan/atau Perempuan

dan Kepala Dinas/Instansi Pemerintahan


J. SURAT KETERANGAN
TDP 1001/240/2014

Penyidik dan/atau pejabat yang

1. Kepala Yogyakarta ng. No. Dinas Penelitian
2. Kepala Dinas Penelitian, Pemuda dan Olahraga Pemuda DTY
3. Dinas Penelitian Pemuda Lahir
4. Yang Berwenang



SURAT KETERANGAN

NUMER : D-3 / 433 / 420 / XI / 2010

Yang bertanda tangan di bawah ini :

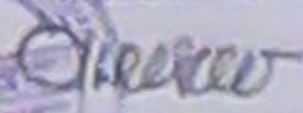
Nama	Drs. Sutirna, M.M.
NIP	19460207 199103 1 010
Jabatan	Kepala Sekolah
Unit Kerja	SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswa di bawah ini

Nama	M. Allan Afendi
No. Mahasiswa	03504244041
Program Studi	Pendidikan Teknik Otomotif
Fakultas	Teknik
Lembaga	Universitas Negeri Yogyakarta

Telah mengadakan Penelitian pada bulan April s.d. Agustus 2010 di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta untuk penelitian skripsi dengan judul :
"IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DI SMK MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 November 2010
Kepala Sekolah

Drs. Sutirna, M.M.
NIP. 19460207 199103 1 010

LAMPIRAN 3
SURAT KETERANGAN VALIDASI

PERSYATAAN JUDUL MENIT

Setelah membaca instrumen dan penelitian yang berjudul "Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta" yang disusun oleh

Nama M. Alfian Alfirdi
NIM 05504244041
Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif
Fakultas Teknik - Universitas Negeri Yogyakarta

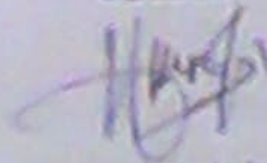
Dengan ini saya

Nama Martah, M.Pd., M.T.
NIP 19570906 198502 1 001
Jabatan Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif

Menyatakan bahwa instrumen tersebut valid dan memberikan saran untuk pembetulan:

Secara garis besar jika memang
mempunyai sedikit perbedaan indikator
dan dapat mengungkap data yg. diharapkan
Instrumen ini dapat digunakan

Yogyakarta, 12 April 2019
Validasi



Martah, M.Pd., M.T.
NIP 19570906 198502 1 001

PERNYATAAN JUDGEMENT

Setelah membaca instrumen dari penelitian yang berjudul "Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta" yang disusun oleh :

Nama : M. Alfin Alfariz
NIM : 05504244641
Program Studi : Pendidikan Teknik Otomotif
Fakultas : Teknik – Universitas Negeri Yogyakarta

Dengan ini saya :

Nama : Prof. Dr. Hermianto Sofyan
NIP. : 19540809 197803 1 005
Jabatan : Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif

Mengatakan bahwa instrumen tersebut valid dan memberikan sumbu untuk penelitian:

[Handwritten signature]

Yogyakarta, 23 April 2019
Validator

[Handwritten signature]
Prof. Dr. Hermianto Sofyan
NIP. 19540809 197803 1 005

PERNYATAAN JUDGEMENT

Sesudah membaca instrumen dari penelitian yang berjudul "Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta" yang disusun oleh

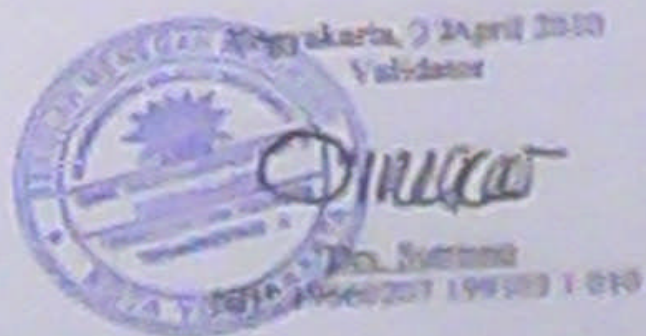
Nama M. Affan Affarini
NIM 05504244041
Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif
Fakultas Teknik – Universitas Negeri Yogyakarta

Dengan ini saya

Nama Drs. Sutrisno
NIP 19660207 199103 1 010
Jabatan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta

Menyatakan bahwa instrumen tersebut valid dan memberikan saran untuk penelitiannya.

Silakan di uji cobakan.



LAMPIRAN 4

INSTRUMEN PENELITIAN

**INSRTUMEN PENELITIAN
IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
DI SMK MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA**



Oleh
M. Alfian Alfarisi
NIM. 05504244041

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF
JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2012**

**ANGKET PENELITIAN
IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH**

Nama responden :

Jabatan :

Petunjuk pengisian

1. Bacalah pernyataan/pertanyaan yang ada dengan cermat dan teliti
2. Berilah tanggapan terhadap pernyataan/pertanyaan tersebut dengan memberi tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan fakta

A. KEMANDIRIAN SEKOLAH

1. Pelaksanaan pengembangan Buku-1 KTSP (Dokumen kurikulum yang meliputi visi sekolah, misi sekolah, dan tujuan sekolah) oleh sekolah
 - a. Mengembangkan Buku-1 KTSP oleh sekolah sendiri
 - b. Mengembangkan Buku-1 KTSP oleh sekolah bersama sekolah lain
 - c. Menerapkan langsung Buku-1 KTSP contoh pusat
 - d. Meniru/ mencopy Buku-1 KTSP sekolah lain
2. Pelaksanaan pengembangan/penyusunan silabus berdasarkan standar isi (SI) dan standar kompetensi lulusan (SKL) oleh sekolah
 - a. Mengembangkan/menyusun silabus oleh guru-guru atau MGMP sekolah sendiri
 - b. Mengembangkan/menyusun silabus oleh MGMP Kabupaten/Kota
 - c. Mengembangkan/menyusun silabus dengan meniru sekolah lain
 - d. Belum//tidak mengembangkan/menyusun silabus
3. Pelaksanaan pengembangan/penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan oleh sekolah
 - a. Mengembangkan/menyusun RPP oleh guru-guru atau MGMP sekolah sendiri
 - b. Mengembangkan/menyusun RPP oleh MGMP Kabupaten/Kota
 - c. Mengembangkan/menyusun RPP dengan meniru sekolah lain
 - d. Belum/tidak mengembangkan/menyusun RPP
4. Guru/saya menyiapkan perangkat pembelajaran (silabus, RPP, dan bahan ajar) sebelum mengajar
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju

5. Guru/saya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
6. Guru/saya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan fasilitas, media pembelajaran, dan alat bantu yang tersedia secara efektif dan efisien
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
7. Guru menyusun instrumen evaluasi hasil belajar dan melaksanakan evaluasi hasil belajar setiap kegiatan pembelajaran (ulangan harian) secara mandiri sesuai dengan teknik dan metode penilaian kompetensi mata pelajaran
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
8. Guru menyusun instrumen penilaian ulangan tengah semester dan melaksanakan ulangan tengah semester yang dikoordinasi oleh sekolah
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
9. Guru menyusun instrumen penilaian ulangan akhir semester/akhir tahun ajaran dan melaksanakan ulangan akhir semester/akhir tahun ajaran yang dikoordinasi oleh sekolah
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
10. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga pendidik/guru yang dilakukan sekolah
 - a. Sangat mencukupi
 - b. Mencukupi
 - c. Kurang mencukupi
 - d. Tidak mencukupi
11. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga kependidikan/karyawan yang dilakukan sekolah
 - a. Sangat mencukupi
 - b. Mencukupi
 - c. Kurang mencukupi
 - d. Tidak mencukupi

12. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga pendidik/guru yang kualifikasinya minimal S1/D4 yang dilakukan sekolah
- a. Sangat mencukupi
 - b. Mencukupi
 - c. Kurang mencukupi
 - d. Tidak mencukupi
13. Sebanyak 76%-100% guru mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
14. Sebanyak 76%-100% guru memiliki integritas kepribadian dan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
15. Sebanyak 76%-100% guru berkomunikasi secara efektif dan santun dengan sesama guru, tenaga kependidikan, dan orang tua siswa
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
16. Sebanyak 76%-100% guru menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
17. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga kependidikan/karyawan yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan bidang pekerjaan di sekolah
- a. Sangat mencukupi
 - b. Mencukupi
 - c. Kurang mencukupi
 - d. Tidak mencukupi
18. Kepala sekolah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan pengelolaan sekolah/madrasah dengan baik
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
19. Tenaga administrasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi dengan baik
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju

20. Tenaga perpustakaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan sumber belajar di perpustakaan
- Sangat setuju
 - Setuju
 - Kurang setuju
 - Tidak setuju
21. Tenaga bengkel/laboratorium melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membantu guru mengelola kegiatan praktekum di bengkel/laboratorium dengan baik
- Sangat setuju
 - Setuju
 - Kurang setuju
 - Tidak setuju
22. Keterlaksanaan kegiatan program peningkatan kompetensi pendidik/guru dan tenaga kependidikan/karyawan yang dilakukan sekolah
- Sangat baik
 - Baik
 - Kurang baik
 - Tidak baik
23. Sekolah berada di lokasi yang aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
- Sangat setuju
 - Setuju
 - Kurang setuju
 - Tidak setuju
24. Sekolah berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara serta memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan
- Sangat setuju
 - Setuju
 - Kurang setuju
 - Tidak setuju
25. Bangunan sekolah memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang mencukupi
- Sangat setuju
 - Setuju
 - Kurang setuju
 - Tidak setuju
26. Bangunan sekolah memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan yang dapat memenuhi kebutuhan: (1) air bersih, (2) saluran air kotor dan/atau air limbah, (3) tempat sampah, dan (4) saluran air hujan
- Sangat setuju
 - Setuju
 - Kurang setuju
 - Tidak setuju

27. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ruang kelas
- Sangat mencukupi
 - Mencukupi
 - Kurang mencukupi
 - Tidak mencukupi
28. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perpustakaan
- Sangat mencukupi
 - Mencukupi
 - Kurang mencukupi
 - Tidak mencukupi
29. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium fisika
- Sangat mencukupi
 - Mencukupi
 - Kurang mencukupi
 - Tidak mencukupi
30. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium kimia
- Sangat mencukupi
 - Mencukupi
 - Kurang mencukupi
 - Tidak mencukupi
31. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium komputer
- Sangat mencukupi
 - Mencukupi
 - Kurang mencukupi
 - Tidak mencukupi
32. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium bahasa
- Sangat mencukupi
 - Mencukupi
 - Kurang mencukupi
 - Tidak mencukupi
33. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ruang praktek gambar teknik
- Sangat mencukupi
 - Mencukupi
 - Kurang mencukupi
 - Tidak mencukupi
34. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ruang penunjang yang meliputi ruang kepala sekolah, ruang guru, dan ruang tata usaha
- Sangat mencukupi
 - Mencukupi
 - Kurang mencukupi
 - Tidak mencukupi
35. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ruang penunjang yang meliputi ruang konseling, UKS, organisasi kesiswaan, dan lainnya
- Sangat mencukupi
 - Mencukupi
 - Kurang mencukupi
 - Tidak mencukupi

36. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan olahraga
- a. Sangat mencukupi
 - b. Mencukupi
 - c. Kurang mencukupi
 - d. Tidak mencukupi
37. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ruang praktek program keahlian teknik gambar bangunan
- a. Sangat mencukupi
 - b. Mencukupi
 - c. Kurang mencukupi
 - d. Tidak mencukupi
38. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ruang praktek program keahlian teknik komputer dan jaringan
- a. Sangat mencukupi
 - b. Mencukupi
 - c. Kurang mencukupi
 - d. Tidak mencukupi
39. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ruang praktek program keahlian teknik permesinan
- a. Sangat mencukupi
 - b. Mencukupi
 - c. Kurang mencukupi
 - d. Tidak mencukupi
40. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ruang praktek teknik kendaraan ringan
- a. Sangat mencukupi
 - b. Mencukupi
 - c. Kurang mencukupi
 - d. Tidak mencukupi
41. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ruang praktek program keahlian teknik audio video
- a. Sangat mencukupi
 - b. Mencukupi
 - c. Kurang mencukupi
 - d. Tidak mencukupi
42. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ruang praktek program keahlian teknik instalasi tenaga listrik
- a. Sangat mencukupi
 - b. Mencukupi
 - c. Kurang mencukupi
 - d. Tidak mencukupi
43. Keterlaksanaan kegiatan program perawatan/pemeliharaan sarana prasarana sekolah yang dilakukan oleh sekolah
- a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik

44. Perolehan sumber dana sekolah untuk keterlaksanaan program sekolah berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan usaha lain yang sah
- a. Berasal dari 4 sumber atau lebih
 - b. Berasal dari 3 sumber
 - c. Berasal dari 2 sumber
 - d. Berasal dari 1 sumber
45. Sekolah mampu mendanai program sekolah tanpa bergantung kepada bantuan dana dari pemerintah pusat
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
46. Sekolah memiliki unit usaha/*income generating* untuk penggalan dana, baik berupa usaha jasa maupun produk
- a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
47. Sekolah mampu mengoptimalkan potensi sumber daya sekolah (SDM, sarpras, lingkungan fisik dan lainnya) dan masyarakat sekitarnya untuk menghasilkan keuntungan ekonomi
- a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
48. Sekolah mendapatkan bantuan dana secara kontinyu dari daerahnya untuk mendukung pelaksanaan program, yaitu dianggarkan melalui APBD daerah
- a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
49. Sekolah mampu meningkatkan peran dan fungsi komite sekolah untuk mendukung pelaksanaan program khususnya dalam bidang pendanaan/keuangan
- a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
50. Sekolah mampu menjalin kerjasama dengan perusahaan sekitar atau pihak lain untuk membantu dana pendidikan melalui beasiswa atau lainnya
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju

B. KERJASAMA SEKOLAH

1. Sekolah memiliki *team work* (kelompok kerja) yang kompak, cerdas, dan dinamis dalam pelaksanaan program sekolah
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
2. Pelaksanaan kegiatan piket warga sekolah (siswa, guru, dan karyawan)
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
3. Pelaksanaan kegiatan rapat warga sekolah (siswa, guru, dan karyawan)
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
4. Terciptanya iklim kerja dan suasana belajar yang kondusif di sekolah
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
5. Keluaran (*out put*) program sekolah merupakan hasil kerja kolektif warga sekolah
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
6. Hubungan kerjasama antara sekolah dengan pemerintah (dinas pendidikan atau lembaga yang lainnya) dalam pelaksanaan program sekolah
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
7. Hubungan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat (komite sekolah, Du/Di atau lembaga yang relevan lainnya) dalam pelaksanaan program sekolah
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
8. Terjalannya kerjasama dengan dunia usaha/industri (DUDI) atau lembaga yang relevan lainnya dalam penyiapan input sekolah (pengembangan kurikulum, dana, sarana prasarana, guru dan karyawan)
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik

9. Terjalinnnya kerjasama dengan dunia usaha/industri (DUDI) atau lembaga yang relevan lainnya dalam proses pembelajaran (melalui prakerin atau lainnya)
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
10. Terjalinnnya kerjasama dengan dunia usaha/industri (DUDI) atau lembaga yang relevan lainnya dalam uji kompetensi siswa
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
11. Terjalinnnya kerjasama dengan dunia usaha/industri (DUDI) atau lembaga yang relevan lainnya dalam pemanfaatan lulusan/penyaluran tenaga kerja
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
12. Tindak lanjut sekolah terhadap nota kesepahaman/*memorandum of understanding* (MOU) dengan dunia usaha/industri (DUDI) dalam pelaksanaan program sekolah
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik

C. BENTUK PARTISPASI

Dukungan dana

1. Partisipasi dari pemerintah berupa dukungan dana dalam penyelenggaraan program sekolah
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
2. Partisipasi dari masyarakat (orang tua siswa, komite sekolah, DUDI, atau lainnya) berupa dukungan dana dalam penyelenggaraan program sekolah
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
3. Partisipasi dari warga sekolah/sekolah berupa dukungan dana dalam penyelenggaraan program sekolah
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik

Dukungan material/fasilitas (sarana prasarana sekolah, tempat praktek atau lainnya)

4. Partisipasi dari pemerintah berupa dukungan material/fasilitas dalam penyelenggaraan program sekolah
- | | |
|----------------|----------------|
| a. Sangat baik | c. Kurang baik |
| b. Baik | d. Tidak baik |
5. Partisipasi dari masyarakat (orang tua siswa, komite sekolah, DUDI, atau lainnya) berupa dukungan material/fasilitas dalam penyelenggaraan program sekolah
- | | |
|----------------|----------------|
| a. Sangat baik | c. Kurang baik |
| b. Baik | d. Tidak baik |
6. Partisipasi dari warga sekolah/sekolah berupa dukungan material/fasilitas dalam penyelenggaraan program sekolah
- | | |
|----------------|----------------|
| a. Sangat baik | c. Kurang baik |
| b. Baik | d. Tidak baik |

Dukungan pemikiran (saran,usul, kritik atau lainnya)
--

7. Partisipasi dari pemerintah berupa dukungan pemikiran dalam penyelenggaraan program sekolah
- | | |
|----------------|----------------|
| a. Sangat baik | c. Kurang baik |
| b. Baik | d. Tidak baik |
8. Partisipasi dari masyarakat (orang tua siswa, komite sekolah, DUDI, atau lainnya) berupa dukungan pemikiran dalam penyelenggaraan program sekolah
- | | |
|----------------|----------------|
| a. Sangat baik | c. Kurang baik |
| b. Baik | d. Tidak baik |
9. Partisipasi dari warga sekolah/sekolah berupa dukungan pemikiran dalam penyelenggaraan program sekolah
- | | |
|----------------|----------------|
| a. Sangat baik | c. Kurang baik |
| b. Baik | d. Tidak baik |

Dukungan tenaga (narasumber, penguji atau lainnya)
--

10. Partisipasi dari pemerintah berupa dukungan tenaga dalam penyelenggaraan program sekolah
- | | |
|----------------|----------------|
| a. Sangat baik | c. Kurang baik |
| b. Baik | d. Tidak baik |

11. Partisipasi dari masyarakat (orang tua siswa, komite sekolah, DUDI, atau lainnya) berupa dukungan tenaga dalam penyelenggaraan program sekolah
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
12. Partisipasi dari warga sekolah berupa dukungan tenaga dalam penyelenggaraan program sekolah
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik

D. KETERBUKAAN SEKOLAH

1. Pelaksanaan perumusan program sekolah
 - a. Dirumuskan bersama guru, karyawan, dan komite sekolah
 - b. Dirumuskan bersama dari salah satu unsur guru, karyawan, dan komite sekolah
 - c. Dirumuskan oleh kepala sekolah dan salah satu unsur guru
 - d. Hanya dirumuskan oleh kepala sekolah
2. Kepala sekolah selalu melibatkan warga sekolah dan masyarakat (komite sekolah) dalam pengambilan keputusan terkait dengan perumusan program sekolah
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
3. Pelaksanaan perumusan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS)
 - a. Dirumuskan bersama guru, karyawan, dan komite sekolah
 - b. Dirumuskan bersama dari salah satu unsur guru, karyawan, dan komite sekolah
 - c. Dirumuskan oleh kepala sekolah dan salah satu unsur guru
 - d. Hanya dirumuskan oleh kepala sekolah
4. Kepala sekolah selalu melibatkan warga sekolah dan masyarakat (komite sekolah) dalam pengambilan keputusan terkait dengan perumusan RAPBS
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
5. Keterbukaan sekolah dalam menginformasikan program-program sekolah kepada warga sekolah dan masyarakat (komite sekolah)
 - a. Sangat terbuka
 - b. Terbuka
 - c. Kurang terbuka
 - d. Tidak terbuka

6. Keterbukaan sekolah dalam menginformasikan keuangan sekolah kepada warga sekolah dan masyarakat (komite sekolah)
 - a. Sangat terbuka
 - b. Terbuka
 - c. Kurang terbuka
 - d. Tidak terbuka
7. Sekolah membuat media/wadah komunikasi dan informasi untuk memberikan informasi mengenai program-program sekolah kepada warga sekolah dan masyarakat dalam bentuk papan pengumuman, website, komunikasi langsung atau lainnya)
 - a. Sangat terbuka
 - b. Terbuka
 - c. Kurang terbuka
 - d. Tidak terbuka
8. Sekolah membuat media/wadah komunikasi dan informasi untuk memberikan informasi mengenai keuangan sekolah kepada warga sekolah dan masyarakat dalam bentuk papan pengumuman, website, komunikasi langsung atau lainnya)
 - a. Sangat terbuka
 - b. Terbuka
 - c. Kurang terbuka
 - d. Tidak terbuka

E. AKUNTABILITAS SEKOLAH

1. Sekolah membuat laporan tertulis pertanggungjawaban proses dan hasil pelaksanaan program yang dilaporkan kepada warga sekolah, masyarakat/komite sekolah, dan pemerintah
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
2. Sekolah membuat laporan tertulis pertanggungjawaban keuangan sekolah yang dilaporkan kepada warga sekolah, masyarakat/komite sekolah, dan pemerintah
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
3. Sekolah mengadakan pertemuan dengan warga sekolah, masyarakat/komite sekolah, dan pemerintah untuk membahas pertanggungjawaban proses dan hasil pelaksanaan program
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju

4. Sekolah mengadakan pertemuan dengan warga sekolah, masyarakat/komite sekolah, dan pemerintah untuk membahas pertanggungjawaban keuangan sekolah
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
5. Warga sekolah dan masyarakat/komite sekolah merasa puas terhadap pertanggungjawaban proses dan hasil pelaksanaan program yang disampaikan sekolah (tidak terjadi protes/komplain)
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
6. Warga sekolah dan masyarakat/komite sekolah merasa puas terhadap pertanggungjawaban keuangan sekolah yang disampaikan sekolah (tidak terjadi protes /komplain)
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju

Pedoman Wawancara Kemandirian Sekolah

1. Bagaimana pengembangan dokumen kurikulum/Buku 1 KTSP sekolah ?
2. Bagaimana pengembangan silabus dan RPP oleh para guru?
3. Apakah guru menyiapkan perangkat pembelajaran (silabus, RPP, dan bahan ajar) sebelum mengajar?
4. Apakah guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran?
5. Apakah guru menggunakan fasilitas, media pembelajaran, dan alat bantu yang tersedia secara efektif dan efisien?
6. Apakah guru menyusun instrumen sendiri secara mandiri sesuai dengan teknik dan metode penilaian kompetensi mata pelajaran pada ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester?
7. Bagaimana ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dilihat dari jumlah, kualifikasi dan kompetensinya?
8. Bagaimana peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan sekolah?
9. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana sekolah?
10. Bagaimana program pengembangan sarana dan prasarana sekolah?
11. Dari mana saja sumber pendanaan sekolah?
12. Bagaimana pemanfaatan sumber daya sekolah dalam upaya menambah pendapatan dana sekolah?
13. Apa saja unit-unit usaha yang ada di sekolah?
14. Apakah sekolah mampu menjalin kerjasama dengan pihak perusahaan atau pihak lainnya untuk membantu pendanaan sekolah?

Pedoman Wawancara Kerjasama Sekolah

1. Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antar warga sekolah?
2. Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antara sekolah dengan pemerintah?
3. Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antara sekolah dengan masyarakat?
4. Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antara sekolah dengan dunia usaha/ industri (DUDI)?
5. Apakah sekolah menjalin kerjasama dengan pihak lain yang relevan berkaitan dengan input sekolah?
6. Apakah sekolah menjalin kerjasama dengan pihak lain yang relevan berkaitan dengan proses belajar mengajar sekolah?
7. Apakah sekolah menjalin kerjasama dengan pihak lain yang relevan berkaitan dengan output sekolah?
8. Apakah sekolah menjalin kerjasama dengan pihak lain yang relevan berkaitan dengan pemanfaatan lulusan sekolah?
9. Apakah kerjasama antara sekolah dengan pihak lain yang relevan memiliki nota kesepahaman (MoU)?
10. Upaya apa saja yang dilakukan oleh sekolah untuk menjaga hubungan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang relevan lainnya?

Pedoman Wawancara Bentuk Partisipasi

1. Apakah ada dukungan dana dari warga sekolah dalam penyelenggaraan program sekolah?
2. Apakah ada dukungan dana dari masyarakat (orang tua siswa/komite sekolah, Du/Di, atau lainnya) dalam penyelenggaraan program sekolah?
3. Apakah ada dukungan dana dari pemerintah dalam penyelenggaraan program sekolah?
4. Apakah ada dukungan material/fasilitas dari warga sekolah dalam penyelenggaraan program sekolah?
5. Apakah ada dukungan material/fasilitas dari masyarakat (orang tua siswa/komite sekolah, Du/Di, atau lainnya) dalam penyelenggaraan program sekolah?
6. Apakah ada dukungan material/fasilitas dari pemerintah dalam penyelenggaraan program sekolah?
7. Apakah ada dukungan pemikiran dari warga sekolah dalam penyelenggaraan program sekolah?
8. Apakah ada dukungan pemikiran dari pemerintah dalam penyelenggaraan program sekolah?
9. Apakah ada dukungan pemikiran dari masyarakat (orang tua siswa/komite sekolah, Du/Di, atau lainnya) dalam penyelenggaraan program sekolah?
10. Apakah ada dukungan tenaga dari warga sekolah dalam penyelenggaraan program sekolah?
11. Apakah ada dukungan tenaga dari pemerintah dalam penyelenggaraan program sekolah?
12. Apakah ada dukungan tenaga dari masyarakat (orang tua siswa/komite sekolah, Du/Di, atau lainnya) dalam penyelenggaraan program sekolah?

Pedoman Wawancara Keterbukaan Sekolah

1. Siapa saja yang terlibat dalam perumusan program sekolah?
2. Siapa saja yang terlibat dalam perumusan keuangan sekolah (RAPBS)?
3. Apakah sekolah mensosialisasikan program dan keuangan sekolah kepada warga sekolah dan masyarakat (orang tua siswa/komite sekolah)?
4. Melalui jalur komunikasi/wadah informasi apa saja sekolah mensosialisasikan program dan keuangan sekolah?
5. Apakah sekolah memberikan kemudahan akses informasi kepada warga sekolah dan masyarakat terkait dengan informasi program dan keuangan sekolah?

Pedoman Wawancara Akuntabilitas Sekolah

1. Apakah sekolah membuat laporan pertanggungjawaban proses dan hasil pelaksanaan program maupun keuangan sekolah?
2. Kepada siapa saja sekolah memberikan laporan pertanggungjawaban proses dan hasil pelaksanaan program maupun keuangan sekolah?
3. Apakah sekolah mengadakan pertemuan dengan warga sekolah, masyarakat (komite sekolah) maupun yayasan atau pemerintah dinas untuk membahas pertanggungjawaban proses dan hasil pelaksanaan program maupun keuangan sekolah?
4. Apakah warga sekolah dan masyarakat (orang tua siswa/komite sekolah) merasa puas terhadap pertanggungjawaban sekolah?

Pedoman Dokumentasi

No.	Dokumen	Hasil
1	Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)	
2	Dokumen Kurikulum	
3	Naskah kerjasama (MoU)	
4	Pendidik dan tenaga kependidikan	
5	Sarana dan prasarana sekolah	
6	Data Pokok Sekolah 2010	
7	Silabus	
8	RPP	
9	Program kerja sekolah	
10	Laporan keuangan	
11	Surat Keterangan Pengurus komite sekolah	

LAMPIRAN 5

DATA HASIL ANGKET

Skor Kemandirian Sekolah

Res	No. Item																																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	
2	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	2	2	4	3	3	3	3	3	2	2	4	2	4	2	4	4	2	4	3	3	3	2
3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	
4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	
5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
6	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	
7	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
8	4	4	4	3	2	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	2	3	3	2	2	3	3	3	2
9	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	
10	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	
11	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
12	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
13	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	2	2	4	3	3	3	3	3	2	3	4	2	4	2	4	3	2	4	3	3	3	2
14	4	4	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	2	3	3	2	2	3	3	3	2
15	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
16	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
17	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	
18	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
19	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	
20	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	
21	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	
22	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	
23	4	4	4	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	2	
24	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
25	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2		
26	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
27	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2		
28	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	s	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
29	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	2	2	4	3	3	3	3	3	2	2	4	2	4	3	4	3	2	4	3	3	3	2
30	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
31	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2		

bersambung...

[illegible]

198

[illegible]

Skor Kerjasama Sekolah

Res	No. Item											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3
2	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	2	3
14	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
23	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
29	4	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
44	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Bersambung...

...lanjutan

Res	No. Item											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
51	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
55	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3
56	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
62	4	3	3	4	3	3	3	2	3	3	2	3
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
75	2	3	2	3	3	3	2	2	3	3	2	3
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
89	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
90	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
91	4	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3
92	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
95	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Skor Bentuk Partisipasi

Res	No. Item											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
2	4	4	3	2	3	2	3	4	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
6	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
7	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	4	4	2	2	3	2	3	2	3	3	2	3
9	4	4	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3
10	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11	4	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
12	4	4	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3
13	4	4	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3
14	4	4	2	2	3	2	3	3	3	3	3	2
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
18	4	4	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3
19	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
21	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
23	4	4	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
25	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3
26	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3
28	4	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
29	4	4	3	2	3	2	3	4	3	2	3	3
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
31	4	4	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3
32	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
34	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2
35	4	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
36	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
37	4	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2
38	4	4	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3
39	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
40	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
41	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3
42	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
43	4	4	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3
44	4	4	2	2	3	2	3	3	2	3	3	2
45	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
46	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
47	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3

Bersambung...

...lanjutan

Res	No. Item											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
49	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
50	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
51	4	4	3	2	3	2	3	3	4	3	3	2
52	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
54	4	4	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3
55	4	4	2	2	3	2	3	3	3	2	3	3
56	4	4	3	2	3	2	3	3	4	3	2	3
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
58	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
59	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
60	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
62	3	3	3	2	2	2	3	3	4	3	2	3
63	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
64	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
66	4	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
67	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
69	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
70	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
71	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3
72	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
73	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2
74	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
75	4	4	2	2	2	2	3	3	2	3	2	3
76	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
78	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
79	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
80	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
81	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
83	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
86	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2
88	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3
89	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
90	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
91	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
92	4	4	3	2	3	2	3	3	3	3	2	3
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3
95	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2
96	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
97	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
98	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3

Skor Keterbukaan Sekolah

Res	No. Item							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	4	3	4	3	3	3	3	3
2	4	3	4	3	3	3	3	2
3	4	3	4	3	3	3	3	3
4	4	3	4	3	3	3	3	3
5	4	3	4	3	3	3	3	3
6	3	3	3	3	3	3	3	3
7	4	3	4	3	3	3	3	3
8	3	2	3	2	3	2	3	2
9	4	3	4	3	3	3	3	3
10	4	3	4	3	3	3	3	3
11	4	3	4	3	3	3	3	3
12	4	3	4	3	3	3	3	3
13	3	3	3	3	3	3	3	3
14	3	2	3	2	3	2	3	2
15	4	3	4	3	3	3	3	3
16	4	3	4	3	3	3	3	3
17	3	3	3	3	3	3	3	3
18	4	3	4	3	3	3	3	3
19	4	3	4	3	3	2	3	2
20	4	3	4	3	3	3	3	3
21	4	3	4	3	3	3	3	3
22	4	3	4	3	3	3	3	3
23	3	2	3	2	3	2	3	2
24	4	3	4	3	3	3	3	3
25	4	3	4	3	3	3	3	3
26	4	3	4	3	3	3	3	3
27	4	3	4	3	3	3	3	3
28	4	3	4	3	3	3	3	3
29	3	3	3	3	3	2	3	2
30	4	3	4	3	3	2	3	2
31	4	3	4	3	3	3	3	3
32	3	3	3	3	3	3	3	3
33	4	3	4	3	3	3	3	3
34	4	3	4	3	3	3	3	3
35	3	3	3	3	3	3	3	3
36	4	3	4	3	3	3	3	3
37	4	3	4	3	3	3	3	3
38	4	3	4	3	3	3	3	3
39	4	3	4	3	3	2	3	2
40	4	3	4	3	3	3	3	3
41	4	3	4	3	3	3	3	3
42	3	3	3	3	3	3	3	3
43	4	3	4	3	3	3	3	3
44	3	2	3	2	3	2	3	2
45	4	3	4	3	3	3	3	3
46	4	3	4	3	3	3	3	3
47	4	3	4	3	3	3	3	3
48	3	3	3	3	3	3	3	3
49	4	3	4	3	3	3	3	3

Res	No. Item							
	1	2	3	4	5	6	7	8
50	4	3	4	3	3	3	3	3
51	3	3	3	3	3	2	3	2
52	4	3	4	3	3	2	3	2
53	4	3	4	3	3	3	3	3
54	4	3	4	3	3	3	3	3
55	3	2	3	2	3	2	3	2
56	3	3	3	3	3	2	3	2
57	4	3	4	3	3	3	3	3
58	4	3	4	3	3	3	3	3
59	3	3	3	3	3	3	3	3
60	4	3	4	3	3	3	3	3
61	4	3	4	3	3	3	3	3
62	3	3	3	3	3	2	3	2
63	4	3	4	3	3	3	3	3
64	4	3	4	3	3	3	3	3
65	4	3	4	3	3	2	3	2
66	3	3	3	3	3	3	3	3
67	4	3	4	3	3	3	3	3
68	4	3	4	3	3	3	3	2
69	4	3	4	3	3	3	3	3
70	3	3	3	3	3	3	3	3
71	4	3	4	3	3	3	3	3
72	4	3	4	3	3	3	3	3
73	4	3	4	3	3	3	3	3
74	4	3	4	3	3	3	3	3
75	3	2	3	2	3	2	3	2
76	4	3	4	3	3	3	3	3
77	4	3	4	3	3	3	3	3
78	4	3	4	3	3	3	3	3
79	4	3	4	3	3	3	3	3
80	4	3	4	3	3	3	3	3
81	3	3	3	3	3	3	3	3
82	4	3	4	3	3	3	3	3
83	4	3	4	3	3	3	3	3
84	4	3	4	3	3	3	3	3
85	3	3	3	3	3	3	3	3
86	4	3	4	3	3	3	3	3
87	4	3	4	3	3	3	3	3
88	4	3	4	3	3	3	3	3
89	4	3	4	3	3	3	3	3
90	4	3	4	3	3	3	3	3
91	3	3	3	3	3	3	3	2
92	4	3	4	3	3	3	3	3
93	4	3	4	3	3	3	3	3
94	4	3	4	3	3	3	3	3
95	4	3	4	3	3	3	3	3
96	4	3	4	3	3	3	3	3
97	4	3	4	3	3	3	3	2
98	4	3	4	3	3	3	3	3

Skor Akuntabilitas Sekolah

Res	No. Item					
	1	2	3	4	5	6
1	3	3	3	3	3	3
2	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3
4	3	3	3	3	3	3
5	3	3	3	3	3	3
6	3	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3	3
8	3	3	3	3	3	2
9	3	3	3	3	3	3
10	3	3	3	3	3	3
11	3	3	3	3	3	3
12	3	3	3	3	3	3
13	3	3	3	3	3	3
14	3	3	3	3	3	2
15	3	3	3	3	3	3
16	3	3	3	3	3	3
17	3	3	3	3	3	3
18	3	3	3	3	3	3
19	3	3	3	3	3	3
20	3	3	3	3	3	3
21	3	3	3	3	3	3
22	3	3	3	3	3	3
23	3	3	3	3	3	2
24	3	3	3	3	3	3
25	3	3	3	3	3	3
26	3	3	3	3	3	3
27	3	3	3	3	3	3
28	3	3	3	3	3	3
29	3	3	3	3	3	2
30	3	3	3	3	3	3
31	3	3	3	3	3	3
32	3	3	3	3	3	3
33	3	3	3	3	3	3
34	3	3	3	3	3	3
35	3	3	3	3	3	3
36	3	3	3	3	3	3
37	3	3	3	3	3	3
38	3	3	3	3	3	3
39	3	3	3	3	3	3
40	3	3	3	3	3	3
41	3	3	3	3	3	3
42	3	3	3	3	3	3
43	3	3	3	3	3	3
44	3	3	3	3	2	2
45	3	3	3	3	3	3
46	3	3	3	3	3	3
47	3	3	3	3	3	3
48	3	3	3	3	3	3
49	3	3	3	3	3	3

Res	No. Item					
	1	2	3	4	5	6
50	3	3	3	3	3	3
51	3	3	3	3	3	3
52	3	3	3	3	3	3
53	3	3	3	3	3	3
54	3	3	3	3	3	3
55	3	3	3	3	3	3
56	3	3	3	3	3	3
57	3	3	3	3	3	3
58	3	3	3	3	3	3
59	3	3	3	3	3	3
60	3	3	3	3	3	3
61	3	3	3	3	3	3
62	3	3	3	3	3	2
63	3	3	3	3	3	3
64	3	3	3	3	3	3
65	3	3	3	3	3	3
66	3	3	3	3	3	3
67	3	3	3	3	3	3
68	3	3	3	3	3	3
69	3	3	3	3	3	3
70	3	3	3	3	3	3
71	3	3	3	3	3	3
72	3	3	3	3	3	3
73	3	3	3	3	3	3
74	3	3	3	3	3	3
75	3	3	3	3	2	2
76	3	3	3	3	3	3
77	3	3	3	3	3	3
78	3	3	3	3	3	3
79	3	3	3	3	3	3
80	3	3	3	3	3	3
81	3	3	3	3	3	3
82	3	3	3	3	3	3
83	3	3	3	3	3	3
84	3	3	3	3	3	3
85	3	3	3	3	3	3
86	3	3	3	3	3	3
87	3	3	3	3	3	3
88	3	3	3	3	3	3
89	3	3	3	3	3	3
90	3	3	3	3	3	3
91	3	3	3	3	2	2
92	3	3	3	3	3	3
93	3	3	3	3	3	3
94	3	3	3	3	3	3
95	3	3	3	3	3	3
96	3	3	3	3	3	3
97	3	3	3	3	3	3
98	3	3	3	3	3	3

LAMPIRAN 6

DATA HASIL WAWANCARA

Hasil Wawancara Kemandirian Sekolah

1. Bagaimana pengembangan dokumen kurikulum/Buku 1 KTSP sekolah ?

Sekolah menggunakan kurikulum KTSP yang dikembangkan sendiri oleh guru-guru produktif, normativ, maupun adaptif bersama dengan kepala sekolah dan wakilnya serta komite sekolah dan Du/Di. Setiap program keahlian membuat dokumen kurikulumnya sendiri-sendiri.

Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2006 atau KTSP yang dikembangkan sendiri oleh guru dan komite sekolah. Dokumen pendukung KTSP yang dimiliki sekolah sangat memadai, demikian keberadaan bahan ajar pendukung. Setiap guru memiliki program pembelajaran, baik program tahunan, semesteran, sampai rencana pelaksanaan pembelajaran.

2. Bagaimana pengembangan silabus dan RPP oleh para guru?

Setiap guru mengembangkan silabus dan RPP sendiri, ada juga yang dikembangkan oleh guru secara bersama dengan sesama guru mata pelajaran

3. Apakah guru menyiapkan perangkat pembelajaran (silabus, RPP, dan bahan ajar) sebelum mengajar?

Iya, sebelum tahun ajaran baru guru diwajibkan membuat buku administrasi guru yang berisi perencanaan pembelajaran, seperti program semester, silabus, RPP dan lainnya. Klo untuk bahan ajar biasanya gurua-guru disini membuat modul pembelajaran

4. Apakah guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran?

Penggunaan metode pembelajaran guru bermacam-macam ya, ada yang ceramah, diskusi, praktek tergantung tujuan pembelajaran tiap mata pelajaran karena karena karakteristik mata pelajaran itu kan berbeda ada yang harus ceramah, latihan, atau praktek.

5. Apakah guru menggunakan fasilitas, media pembelajaran, dan alat bantu yang tersedia secara efektif dan efisien?

Iya, fasilitas atau alat bantu belajar di sini bisa dibilang sudah bagus bahkan hampir semua guru di sini punya laptop dan sering digunakan untuk mengajar apalagi didukung dengan adanya LCD di setiap kelas, itu sangat membantu guru dalam proses belajar mengajar. Bahkan kami sudah menerapkan e-learning di website sekolah jadi nanti disitu ada bahan ajar berupa modul yang bisa didownload oleh para siswa

6. Apakah guru menyusun instrumen sendiri secara mandiri sesuai dengan teknik dan metode penilaian kompetensi mata pelajaran pada ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester?

Iya, setiap guru disini harus menyusun instrumen penilaian proses belajar mengajar sendiri karena mereka yang lebih tahu kan dengan apa yang mereka ajarkan dan. Penilaiannya itu disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran jadi setiap guru menentukan sendiri metodenya sesuai dengan mata pelajaran yang diampu agar kompetensi siswa dapat terukur. Kemudian untuk hasil penilaiannya, siswa bisa langsung melihat lewat komputer sekolah yang sudah terhubung dengan internet atau bisa juga dilihat lewat internet di luar sekolah.

7. Bagaimana ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dilihat dari jumlah, kualifikasi dan kompetensinya?

Jumlah guru dan karyawan di sekolah sudah sangat memadai, di sini jumlah gurunya sekitar ada 102 dan karyawannya ada 36 orang. Untuk kualifikasi latar belakang pendidikannya hampir semuanya S1 dan karyawannya kebanyakan lulusan SMA. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di arsip guru dan karyawan sekolah.

8. Bagaimana peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan sekolah?

Peningkatan kualitas sumber daya guru dan karyawan melalui penataran, lokakarya, KKG, dan pembinaan dinas lainnya. Sekarang ini ada 3 guru yang sedang magang di Industri untuk meningkatkan kompetensinya.

9. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana sekolah?

Sarana dan prasarana sekolah sekitar 90% sudah tercukupi, disini sudah ada lab komputer, lab bahasa, dan fasilitas lainnya saya kira sudah lengkap, cuma masih kurang lab fisika, kemudian masih ada beberapa ruangan yang masih kurang tapi sekarang sedang dibangun. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada arsip sarpras nanti.

10. Bagaimana program pengembangan sarana dan prasarana sekolah?

Peningkatan sarana dan prasarana sekolah setiap tahun telah ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas. Saat ini sedang membangun lab. Fisika dan lab. Kimia, dan juga sedang membuat taman-taman sekolah. Program pengembangan sarana dan prasarana sekolah dilakukan dengan bekerjasama antara sekolah dengan komite sekolah

11. Dari mana saja sumber pendanaan sekolah?

Sumber pendanaannya terutama dari orang tua siswa yang berupa SPP dan uang masuk, kemudian bantuan dari pemerintah pusat dana RSBI, dari pemerintah daerah BOMM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu) dan BKM, kemudian biasanya ada dari lembaga lain yang sifatnya insidental. Sumber dana sekolah hampir sepenuhnya dari orang tua siswa, dan ada bantuan dana dari pemerintah.

12. Bagaimana pemanfaatan sumber daya sekolah dalam upaya menambah pendapatan dana sekolah?

Biasanya kami lewat bantuan komite sekolah untuk ikut memikirkan bagaimana mendapatkan dana. Kalau yang lain seperti yang ada di depan sekolah, ada warnet dan photo copy sebagai unit produksi sekolah dan masing-masing jurusan mempunyai unit produksi yang dapat memberikan tambahan penghasilan bagi setiap jurusan.

13. Apa saja unit-unit usaha yang ada di sekolah?

Di jurusan TKJ ada warnet dan photocopy, teknik kendaraan ringan ada setir mobil dan penjualan spare part motor, mesin ada bengkel las, teknik audio video ada servis tv atau radio, gambar bangunan ada konsultan bangunan, dan di jurusan teknik pemanfaatan listrik ada instalasi listrik rumah tangga dan industri.

14. Apakah sekolah mampu menjalin kerjasama dengan pihak perusahaan atau pihak lainnya untuk membantu pendanaan sekolah?

Untuk saat ini sekolah belum dapat menjalin kerjasama dengan pihak perusahaan untuk membantu pendanaan sekolah

Hasil Wawancara Kerjasama Sekolah

1. Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antar warga sekolah?

Kerjasama antar warga sekolah disini baik, antar guru dapat bekerjasama dengan baik dan kompak, begitu juga kerjasama guru dengan karyawan. Kerjasama yang baik antar warga sekolah dapat dilihat dari dapat bekerjanya secara sinergis semua bagian atau unit kegiatan untuk mencapai sasaran sekolah, dan terjalinnya hubungan yang baik antara semua warga sekolah. Disini juga ada kegiatan MGMP untuk setiap mata pelajaran.

2. Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antara sekolah dengan pemerintah (dinas pendidikan)?

Kerjasama dengan dinas terutama dalam pengembangan kurikulum sekolah, kemudian penyesuaian program-program dinas dengan program sekolah. Setiap kegiatan rapat dinas dari pihak sekolah selalu ikut, sehingga terjalin komunikasi yang baik antara sekolah dengan dinas.

3. Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antara sekolah dengan masyarakat (komite sekolah)?

Komite sekolah itu kan sifatnya membantu sekolah yang terdiri dari perwakilan wali siswa. Sekolah sering mengadakan rapat pertemuan dengan komite sekolah untuk membahas program-program sekolah. Setiap program dan dana sekolah harus dilaporkan kepada komite sekolah.

4. Bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin antara sekolah dengan dunia usaha/ industri (DUDI)?

Kerjasama dengan pihak industri biasanya seperti praktek kerja industri, magang guru, kunjungan industri, pengembangan kurikulum dan uji kompetensi siswa.

5. Apakah sekolah menjalin kerjasama dengan pihak lain yang relevan berkaitan dengan input sekolah (kurikulum, dana, siswa, sarana prasarana)?
Iya, kurikulum yang dikembangkan sekolah sebelum di sah kan harus disinkronkan dulu dengan dunia industri agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri, jadi pada saat mengembangkan kurikulum kami minta masukan-masukan dari dunia industri.
6. Apakah sekolah menjalin kerjasama dengan pihak lain yang relevan berkaitan dengan proses belajar mengajar sekolah?
Iya, itu dilakukan dalam bentuk prakerin, biasanya para siswa prakerin di industri dan instansi-instansi pemerintah.
7. Apakah sekolah menjalin kerjasama dengan pihak lain yang relevan berkaitan dengan keluaran (output) sekolah (penilaian kompetensi siswa)?
Iya, dalam uji kompetensi siswa kami bekerja sama dengan dunia industri untuk menguji kompetensi siswa di sekolah.
8. Apakah sekolah menjalin kerjasama dengan pihak lain yang relevan berkaitan dengan pemanfaatan lulusan sekolah?
Tentu saja, di sini ada BKK sekolah yang baru saja kemarin-kemarin habis melaksanakan tes seleksi di sekolah. Dari pihak industri kesini untuk menyeleksi para siswa.
9. Apakah kerjasama antara sekolah dengan pihak lain yang relevan memiliki nota kesepahaman (MoU)?
Ada beberapa industri yang bersedia membuat MoU dengan sekolah, tapi sebagian besar industri tidak membuat MoU dengan sekolah karena tidak semua industri mau membuat MoU.
10. Upaya apa saja yang dilakukan oleh sekolah untuk menjaga hubungan kerjasama dengan pihak-pihak terkait tersebut?
Setiap bulan kami ada pertemuan dengan komite sekolah, industri, atau dinas. Kadang-kadang di luar acara formal kami membahas tentang program sekolah, melalui kunjungan.

Hasil Wawancara Bentuk Partisipasi

1. Apa saja dukungan dana dari warga sekolah dalam penyelenggaraan program sekolah?

Dukungan dana dari warga sekolah itu tidak ada kayaknya, kami disinikan guru, jadi justru kami yang mendapatkan dana atau gaji dari SPP wali murid. Kalaupun ada biasanya kecil seperti untuk kegiatan latihan qurban atau zakat fitrah.

2. Apa saja dukungan dana dari masyarakat (orang tua siswa/komite sekolah, Du/Di, atau lainnya) dalam penyelenggaraan program sekolah?

Dari wali murid berupa dana SPP dan dana non SPP, SPP itu dibayar setiap bulan sedangkan non SPP itu digunakan untuk mendanai kegiatan siswa seperti kegiatan ekstrakurikuler, untuk membeli bahan maupun peralatan praktek dan kegiatan yang lainnya.

3. Apa saja dukungan dana dari pemerintah dalam penyelenggaraan program sekolah?

Biasanya ada bantuan dari pemerintah, dari pemerintah pusat berupa dana RSBI, kemudian dari pemerintah daerah berupa dana BOMM untuk meningkatkan manajemen mutu dan beasiswa untuk siswa miskin dana BKM.

4. Apa saja dukungan material/fasilitas dari warga sekolah dalam penyelenggaraan program sekolah?

Kalau dari guru-guru itu biasanya kami menyiapkan bahan ajar untuk digunakan siswa, dan dari siswa ya berupa peralatan belajar mereka.

5. Apa saja dukungan material/fasilitas dari masyarakat (orang tua siswa/komite sekolah, Du/Di, atau lainnya) dalam penyelenggaraan program sekolah?

Dukungan dari industri untuk sekolah yang berupa dukungan fasilitas itu seperti magang guru di PT-PT atau praktek kerja industri untuk siswa, itu semua kan guru ataupun siswa mendapatkan fasilitas peralatan praktek disana untuk belajar. Atau juga dari kegiatan KKN-PPL UNY para mahasiswanya membuat media pembelajaran atau lainnya yang dibutuhkan oleh sekolah.

6. Apa saja dukungan material/fasilitas dari pemerintah dalam penyelenggaraan program sekolah?

Sekolah baru saja mendapatkan bantuan buku-buku dari dinas untuk melengkapi perpustakaan, terus terang saja koleksi perpustakaan kami saat ini masih sedikit sehingga masih butuh buku-buku untuk melengkapinya.

7. Apakah ada dukungan pemikiran dari warga sekolah dalam penyelenggaraan program sekolah?

Dukungan pemikiran warga sekolah bagus, mereka sering memberikan saran maupun usulan untuk memajukan sekolah dalam kegiatan rapat evaluasi setiap bulan. Mengusulkan untuk secepatnya menyiapkan SDM yang berkualitas dan menguasai bahasa asing untuk kelas bilingual.

8. Apakah ada dukungan pemikiran dari pemerintah dalam penyelenggaraan program sekolah?

Kalau dari dinas pendidikan biasanya dalam rapat-rapat dinas diberikan pengarahan atau masukan untuk mensinkronkan program dinas dengan program sekolah.

9. Apakah ada dukungan pemikiran dari masyarakat (orang tua siswa/komite sekolah, Du/Di, atau lainnya) dalam penyelenggaraan program sekolah?

Dukungan pemikiran dari masyarakat di sini sudah bagus, sekolah sering mengadakan pertemuan dengan komite maupun Du/Di. Seperti dalam pengembangan kurikulum sekolah mendapatkan banyak masukan dari mereka, karena mereka yang tahu lapangan sehingga sekolah mengetahui apa saja yang dibutuhkan Du/Di dari para siswa setelah lulus.

10. Apakah ada dukungan tenaga dari warga sekolah dalam penyelenggaraan program sekolah?

Tentu saja, dukungan tenaga kan berarti ikut serta melaksanakan program sekolah seperti menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik, para guru mengajar, karyawan menjalankan tugasnya, dan para siswa datang ke sekolah untuk belajar. Kemudian ikut serta dalam kegiatan sekolah lainnya selain kegiatan belajar mengajar, seperti bakti sosial, pengajian, atau lainnya lagi.

11. Apakah ada dukungan tenaga dari pemerintah dalam penyelenggaraan program sekolah?

Ada, salah satunya pada kegiatan IHT (in house training) itu ada perwakilan dari dinas yang menjadi penyaji atau pembicara di sekolah.

12. Apakah ada dukungan tenaga dari masyarakat (orang tua siswa/komite sekolah, Du/Di, atau lainnya) dalam penyelenggaraan program sekolah?

Dari masyarakat itu biasanya dalam kegiatan pengajian diundang sebagai penceramah, bakti sosial, datang ke undangan sekolah, adanya pertemuan. Dari industri biasanya dalam pelaksanaan uji kompetensi siswa, kemudian dari kegiatan KKN-PPL UNY seperti Anda-Anda ini kan disini ikut mengajar dan membantu melaksanakan program-program sekolah

Hasil Wawancara Keterbukaan Sekolah

1. Siapa saja yang terlibat dalam perumusan program sekolah?

Warga sekolah disini terlibat dalam perumusan program sekolah. Perumusan program sekolah diawali dari masukan warga sekolah selanjutnya dirapatkan pada masing-masing jurusan untuk ditentukan skala prioritasnya atau kelompok kegiatan kerja, kemudian diteruskan ke waka yang membidangi. Setelah rencana program sekolah jadi terus dirapatkan dulu dengan komite sekolah, setelah semuanya OK baru di acc oleh komite dan kepala sekolah untuk disahkan majlis dan dinas.

2. Siapa saja yang terlibat dalam perumusan keuangan sekolah (RAPBS)?

Itu sama dengan perumusan program sekolah kan jadi satu paket, program sekolah membutuhkan dana kemudian dituangkan ke dalam RAPBS. Jadi warga sekolah dan komite sekolah ikut terlibat dalam memutuskan program dan RAPBS itu.

3. Apakah sekolah mensosialisasikan program dan keuangan sekolah kepada warga sekolah dan masyarakat (orang tua siswa/komite sekolah)?

Iya, setiap awal tahun ajaran baru kami mengundang masyarakat untuk mensosialisasikan program-program sekolah beserta kebutuhan dana untuk pelaksanaan program-program tersebut. Kalau sosialisasi kepada warga sekolah biasanya melalui rapat dewan.

4. Melalui jalur komunikasi/wadah informasi apa saja sekolah mensosialisasikan program dan keuangan sekolah?

Ya itu kami mengundang orang tua ke pertemuan, di depan sekolah juga ada layanan informasi yang dijaga oleh guru piket, siapa saja yang ingin mencari informasi tentang sekolah bisa lewat situ, melalui papan pengumuman, laporan, dan juga di website sekolah biasanya kami menginformasikan program sekolah yang telah dilaksanakan.

5. Apakah sekolah memberikan kemudahan akses informasi kepada warga sekolah dan masyarakat terkait dengan informasi program dan keuangan sekolah?

Iya, tentu saja sekolah terbuka kepada warga sekolah maupun masyarakat yang ingin mengakses informasi tentang sekolah bisa datang langsung kesini dan bertanya langsung ataupun lewat media yang di siapkan sekolah seperti papan pengumuman dan website sekolah.

Hasil Wawancara Akuntabilitas Sekolah

1. Apakah sekolah membuat laporan pertanggungjawaban proses dan hasil pelaksanaan program maupun keuangan sekolah?

Iya, masing-masing penanggung jawab kegiatan membuat laporan tertulis pertanggung-jawaban penggunaan dana, proses dan hasil program yang dilaksanakan, biasanya setelah program selesai dilaksanakan hasilnya dilaporkan kepada kepala sekolah dulu kemudian dibahas bersama komite sekolah.

2. Kepada siapa saja sekolah memberikan laporan pertanggungjawaban proses dan hasil pelaksanaan program maupun keuangan sekolah?

Laporan pertanggungjawaban sekolah diberitahukan kepada warga sekolah, komite sekolah, orang tua siswa, dinas pendidikan dan yayasan muhammadiyah. Setiap program dan dana sekolah dibahas bersama komite sekolah, jadi program dan dana sekolah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan baik kepada wali murid, warga sekolah, QMR dari ISO, masjid pdm, dan dinas.

3. Apakah sekolah mengadakan pertemuan dengan warga sekolah, masyarakat (komite sekolah) maupun yayasan atau pemerintah dinas untuk membahas pertanggung-jawaban proses dan hasil pelaksanaan program maupun keuangan sekolah?

Iya, masing-masing penanggung jawab kegiatan membuat laporan pertanggung-jawaban kepada kepala sekolah, kemudian disampaikan dan dibahas bersama dengan komite sekolah dan QMR. Pada akhir tahun ajaran disosialisasikan kepada wali murid dan warga sekolah, dan biasanya kami adakan evaluasi bersama warga sekolah setiap akhir tahun ajaran. Program dan dana sekolah juga dilaporkan kepada masjid dikdasmen PDM dan dinas pendidikan pada akhir tahun ajaran

4. Apakah warga sekolah dan masyarakat (orang tua siswa/komite sekolah) merasa puas terhadap pertanggungjawaban sekolah?

Menurut saya, selama ini baik warga sekolah ataupun komite sekolah sudah merasa puas dengan pertanggungjawaban sekolah. Selama ini tidak ada protes dari warga sekolah maupun komite sekolah tentang laporan pertanggungjawaban sekolah

LAMPIRAN 7

DATA HASIL DOKUMENTASI



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

Jl. Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, Gedung E Lantai 12-13
Telp (021)52725477 (hunting), 5725468-9, 5725468-4, 5725466
Fax : 5725473; 5725049; 575475 <http://www.ditpsmk.net>

DATA POKOK PSMK 2010

NPSN : 20403275 ID UN : 04-01-04-125 NSS : 323046008010
 Nama SMK : SMK MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA Status : Swasta
 No. SK Pendirian: 0266/H/1986 Tanggal SK : 05-08-1986 Penanda Tangan SK : Menteri Pendidikan
 PBM : Pagi
 Alamat : Jl. Pramuka 62 RT/RW : 02/01
 Desa : Giwangan Kecamatan : Umbulharjo Kab/kota : Kota Yogyakarta
 Propinsi : D.I. Yogyakarta Kode Pos : 55163
 Telepon : (0274) 372778 Fax : (0274) 411106 Website : www.smkmuh3-yog.sch.id
 Email : info@smkmuh3-yog.sch.id

Jumlah Guru : Total 102 (PNS : 18 Non PNS : 7) (Guru Tetap : 32 Guru Tidak Tetap : 45)
 Rata-rata Nilai UN TP 2009/2010 : Matematika : 6,72 Bhs Indonesia : 6,47 Bhs Inggris : 6,69 Produktif : 6,04
 Sertifikat ISO : 9001:2008 Tahun mendapat ISO : 2010

DATA AKREDITASI DAN PENERAPAN KURIKULUM SMK

Kompetensi Keahlian	Akreditasi	Tahun Diakreditasi	KURIKULUM YANG DIGUNAKAN			
			Tk. 1	Tk. 2	Tk. 3	Tk. 4
Teknik Gambar Bangunan	Akreditasi A	2008	KTSP	KTSP	KTSP	KTSP
Teknik Instalasi Tenaga Listrik	Akreditasi A	2008	KTSP	KTSP	KTSP	KTSP
Teknik Permesinan	Akreditasi A	2008	KTSP	KTSP	KTSP	KTSP
Teknik Kendaraan Ringan	Akreditasi A	2008	KTSP	KTSP	KTSP	KTSP
Teknik Audio-Video	Akreditasi A	2008	KTSP	KTSP	KTSP	KTSP
Teknik Komputer dan Jaringan	Akreditasi A	2008	KTSP	KTSP	KTSP	KTSP

DATA PSB DAN SISWA PER TINGKAT

Kompetensi Keahlian	PSB				SISWA												Total Siswa L + P
	Pendaftar		Diterima		Rombel	Tk. 1		Rombel	Tk. 2		Rombel	Tk. 3		Rombel	Tk.. 4		
	L	P	L	P		L	P		L	P		L	P		L	P	
Teknik Gambar Bangunan	55	4	31	3	1	31	3	1	36	3	1	26	2				101
Teknik Instalasi Tenaga Listrik	45		28		1	28		1	39	2	1	35					104
Teknik Permesinan	138		109		4	109		4	118		4	125					352
Teknik Kendaraan Ringan	179		148		5	148		6	195		6	167					510
Teknik Audio-Video	78	5	54	5	2	54	5	2	52	7	2	54	4				176
Teknik computer Jaringan	157	12	79	10	3	79	10	2	73	8	2	61	6				237
Total	652	21	449	18	16	449	18	16	513	20	16	468	12				1480

SISWA MENGULANG DAN PUTUS SEKOLAH

Kompetensi Keahlian	Siswa Mengulang								Siswa Putus Sekolah							
	Tk. 1		Tk. 2		Tk. 3		Tk. 4		Tk. 1		Tk. 2		Tk. 3		Tk. 4	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Teknik Gambar Bangunan	2		2						2		2		1			
Teknik Instalasi Tenaga Listrik																
Teknik Permesinan			2						14		9		1			
Teknik Kendaraan Ringan	7		3		1				39		15	1	4			
Teknik Audio-Video	2								9	1						
Teknik computer Jaringan	1										1					
Total	12		7		1				64	1	27	1	6			

DATA SISWA MENURUT USIA

Umur	Jumlah Siswa			
	Tk. 1	Tk. 2	Tk. 3	Tk. 4
<=15 Tahun	190			
16 Tahun	238	222	202	
17 Tahun	39	225	213	
18 Tahun		64	65	
>=19 Tahun		22		
Total	467	533	480	

DATA EKONOMI ORANG TUA SISWA DAN ASAL SEKOLAH SISWA BARU

Ekonomi Orang Tua Siswa	Jumlah Siswa			
	Tk. 1	Tk. 2	Tk. 3	Tk. 4
Prasejahtra 1 (Miskin)	347	433	400	
Menengah Dan Sejahtra	120	100	80	
Total	467	533	480	

Sekolah Asal Pendaftar	Jumlah Siswa Diterima	Hasil UN di Sekolah Peringkat 1-10
MTs	41	0
Paket B	2	0
SMP	424	0
Total	467	0

PESERTA UJIAN

Kompetensi Keahlian	Peserta Ujian TP 2009/2010				
	Peserta UN		LULUS		Bersertifikat Kompetensi
	L	P	L	P	
Teknik Gambar Bangunan	24	4	23	4	27
Teknik Instalasi Tenaga Listrik	33		33		33
Teknik Permesinan	132		132		132
Teknik Kendaraan Ringan	193		193		193
Teknik Audio-Video	66	2	66	2	68
Teknik computer Jaringan	62	1	62	1	63
Total	510	7	509	7	516

PENELUSURAN LULUSAN

Kompetensi Keahlian	Penelusuran Lulusan TP 2008/2009				
	Bekerja di DU/DI dan Instansi Pemerintah	Wirausaha	Lanjut Ke PT	Masa tunggu untuk bekerja	
				< 1 thn	> 1 thn
Teknik Gambar Bangunan	5	5	3	2	
Teknik Instalasi Tenaga Listrik		10		4	
Teknik Permesinan	7	80		12	10
Teknik Kendaraan Ringan	5	60	7	57	54
Teknik Audio-Video	3	50	5	10	6
Teknik computer Jaringan		10	10	35	10
Total	20	215	25	120	80

TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga Kependidikan	Total	Status Kepegawaian				Pendidikan				Usia			Kelamin		Kebutuhan Pegawai	
		PNS		Non PNS		SLTA	Dip	S1/D4	S2	< 35	35-50	> 51	L	P	Ideal	Kurang
		PT	PTT	PT	PTT											
Kepala Tata Usaha	1			1			1				1		1		1	
Tenaga Teknis Keuangan	4			1	3	2	1	1		1	3			4	4	
Tenaga Perpustakaan	1				1		1			1			1		1	
Tenaga Laboratorium																
Tenaga Teknik Praktek Kejuruan	10				10	10				9		1	10		10	
Pesuruh/Penjaga Sekolah	14			1	13	13		1		4	10		14		14	
Tenaga Administrasi Lainnya	6			2	4	5		1		2	4		3	3	6	
Total	36			5	31	30	3	3		17	18	1	29	7	36	

PENDIDIK (GURU)

Nama Mata Diklat/Pelajaran	Total	Status Kepegawaian				Pendidikan			Lulus Sertifikasi Profesi	Usia			Kelamin		Kebutuhan Guru	
		PNS		Non PNS		Dip	S1/D4	S2		< 35	35-50	> 51	L	P	Ideal	Kurang
		GT	GTT	GT	GTT											
ADAPTIF																
Matematika	7	1		2	4		7		1	4	3			7	7	
Bahasa Inggris	8	1		7		1	7			4	4		1	7	8	
KKPI	3				3	2	1			3			3		3	
Kewirausahaan	3			1	2		3			3			2	1	3	
Fisika	3	1			2		3		1	2	1			3	3	
Kimia	3			1	2		3			3			2	1	3	
NORMATIF																
Pendidikan Agama	10			8	2		9	1	4		9	1	7	3	10	
PKn & Sejarah	5			4	1		5				5		1	4	5	
Bahasa Indonesia	4	2	1		1		4		3		4		1	3	4	
Pendidikan Jasmani & Olahraga	3	1	1		1		3		2		3		3		3	
Seni & Budaya	1			1			1			1			1		1	
Muatan Lokal	1				1		1			1				1	1	
BK/BP	4	2	1		1		4		3		4		2	2	4	

PRODUKTIF																
Teknik Gambar Bangunan	7	3			4	2	5		3	1	5	1	4	3	7	
Teknik Instalasi Tenaga Listrik	3	1		1	1		2	1	1	1	2		3		3	
Teknik Pemesinan	15	5	1	4	5		14	1	5	11	3	1	15		15	
Teknik Kendaraan Ringan	12	1		5	6		11	1	1	6	6		12		12	
Teknik Audio-Video	5	1	1	2	1	1	4		2	2	3		4	1	5	
Teknik Komputer Dan Jaringan	5		1	1	3		4	1		5			4	1	5	
Total	102	19	6	37	40	6	91	5	26	47	52	3	65	37	102	

PRASARANA SEKOLAH

Nama Ruang/Area Kerja	Kondisi Saat Ini						Kebutuhan Ruang		
	Jumlah Ruang	Luas (m2)	Total Luas (m2)	Jumlah Baik	Jumlah Rusak Sedang	Jumlah Rusak Berat	Jumlah Ruang	Luas (m2)	Total Luas (m2)
Ruang Pembelajaran Umum									
Ruang Kelas	31	72	2232	13			36	72	2592
Ruang Lab.Fisika	1	72	72	1			2	72	144
Ruang Lab. Kimia	1	72	72	1			2	72	144
Ruang Lab. Bahasa	2	60	120	2			2	60	120
Ruang Lab. Komputer	2	72	144	2			3	72	216
Ruang Lab. Multimedia	1	72	72				2	72	144
Ruang Praktek Gambar Teknik	1	72	72	1			2	72	144
Ruang Perpustakaan konvensional	1	225	225	1			1	225	225
Ruang Perpustakaan Multimedia							1	72	72
Ruang Khusus (Praktek)									
Ruang Praktek Teknik Gambar Bangunan	3	72	216	3			4	72	288
Ruang Praktek Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	72	144	2			3	72	216
Ruang Praktek Teknik Pemesinan	3	225	675	3			3	225	675
Ruang Praktek Teknik Kendaraan Ringan	3	150	450	3			4	150	600
Ruang Praktek Teknik Audio-Video	3	72	216	3			3	72	216
Ruang Praktek Teknik Komputer Dan Jaringan	4	72	288	4			5	72	360

Ruang Penunjang Sekolah									
Ruang Kepala Sekolah & Wakil	1	120	120	1			1	120	120
Ruang Guru	1	144	144	1			1	144	144
Ruang Pelayanan Administrasi	1	104	104	1			1	104	104
BP/BK	1	72	72	1			1	72	72
Ruang OSIS	1	20	20	1			1	20	20
Ruang Unit Produksi	1	40	40	1			1	40	40
Ruang Pramuka	1	20	20	1			1	20	20
Koperasi	1	40	40	1			1	40	40
UKS	1	25	25	1			2	25	50
Ruang Ibadah	1	450	450	1			1	450	450
Ruang Bersama (Aula)	1	160	160	1			1	160	160
Ruang Kantin Sekolah	1	180	180	1			1	180	180
Ruang Toilet	5	24	120	5			10	24	240
Ruang Gudang	1	40	40	1			2	40	80
Ruang Penjaga Sekolah	1	12	12	1			2	40	80
Ruang Unit Produksi	1	40	40	1			1	40	40

STATUS LAHAN SMK

Jenis Lahan	Luas (m2)	Status Kepemilikan Lahan		Keterangan Lahan
		Yayasan	Lainnya (sebutkan)	
Luas Lahan Bangunan	9010	√		
Luas Taman	800	√		
Luas Lapangan Olah Raga	2500	√		
Luas Lahan Praktek	2000	√		
Lain-lain	7500	√		
Total Luas Lahan Seluruhnya	21810			

INFRASTRUKTUR SMK

Sumber Listrik	Daya Listrik	Voltase	Phase	Biaya per bulan (Rp)
PLN	> 15.000 Watt	220 Volt/110 Volt	1 Phase	500.000
			3 Phase	8.000.000
Akses Internet	Provider	Bandwith (Mbps)		Biaya per bulan (Rp)
VSAT/Leasedline/Wireless/Mobile Broadband/Modem Mobile)	Jardiknas/Telkom	1, 15 Mbps		1.750.000
Sumber Air Bersih		Ketersediaan		Biaya per bulan (Rp)
Sumur Gali		Memadai		

PERABOT RUANG PEMBELAJARAN & BUKU TEKS PENUNJANG UJIAN NASIONAL DI PERPUSTAKAAN

Jenis Perabot	Jumlah yang Ada	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Kekurangan
Meja Siswa	1200	1200	
Kursi Siswa	1640	1640	
Lemari	20	30	10
Papan Tulis	57	57	
Meja Guru	102	102	
Kursi Guru	102	102	
Rak Buku Perpustakaan	7	10	3
Lemari Alat & Bahan	12	18	6

Mata Pelajaran	Jumlah Judul	Jumlah Eksemplar	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Kekurangan
Bahasa Indonesia	49	314		
Matematika	73	454		
Bahasa Inggris	24	92		
Teknik Gambar Bangunan	56	609		
Teknik Instalasi Tenaga Listrik	25	227		
Teknik Pemesinan	15	504		
Teknik Kendaraan Ringan	49	699		
Teknik Audio-Video	56	594		
Teknik Komputer Dan Jaringan	53	114		

SARANA PENUNJANG PEMBELAJARAN

Nama Sarana	Kondisi Saat Ini			Kebutuhan Alat	
	Jumlah Alat	Jumlah Baik	Jumlah Rusak	Jumlah Alat	+/-
Komputer Laptop	30	28	2	38	-10
Komputer PC	255	255	0	295	-40
Komputer Server	6	6	0	8	-2
LCD/Projector	25	25	0	50	-25
Tape / Audio	8	8	0	10	-2
TV/ Video	5	5	0	8	-3
Printer	17	17	0	30	-13

PENERIMA BEASISWA

Jenis Beasiswa	Jumlah Penerima Beasiswa		Sumber Beasiswa	Dana/bulan/Siswa	Jumlah Dana Seluruhnya (dalam Ribuan Rp)
	L	P			
Beasiswa Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah (SMK)/Bantuan Khusus Murid (BKM)	235	4	Provinsi	65	186.420
RAPUS	15	1	Provinsi	100	19.200
RETRIEVAL	1		Provinsi	200	2.400

BANTUAN YANG PERNAH DITERIMA 2 TAHUN TERAKHIR

Nama Bantuan	Tahun	Nilai Dana Bantuan (Rp)	Sumber Dana	Nilai Dana Pendamping (Rp)	Sumber Dana Pendamping
RKB	2008	170.000.000	Pusat	50.000.000	Komite Sekolah
RSBI	2008	250.000.000	Pusat	30.000.000	Komite Sekolah
BOMM	2008	123.900.000	Pusat	225.000.000	Komite Sekolah
Rehabilitasi Gedung	2008	120.000.000	Pusat	480.000.000	Komite Sekolah
Peningkatan SDM	2008	50.000.000	Pusat	100.000.000	Komite Sekolah
RSBI	2009	600.000.000	Pusat	199.000.000	Komite Sekolah
BOMM	2009	190.080.000	Dekosentrasi	250.000.000	Komite Sekolah
RKK	2009	75.000.000	Pusat	15.000.000	Komite Sekolah
School Business Centre	2009	400.000.000	Pusat	40.000.000	Komite Sekolah
Total		2.078.980.000		1.389.000.000	

KERJASAMA DENGAN DU/DI

Nama DU/DI	Alamat	Lokasi (DN/LN)	Tahun MoU	No. MoU	Masa Berlaku	Bentuk Kerjasama	Kompetensi Keahlian Terkait
PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA	BOGOR JABAR	DN	2010			DIKLAT, UKP, BKK	Tek. Mesin, TKR
PT. PORTER	TANGERANG	DN	2010			PRAKERIN, MAGANG	Tek. Mesin, TKR
PT. HINO	TANGERANG	DN	2008		2013	PRAKERIN, MAGANG	TKR
PT. CIPTANING WIRAHARJA	JAKARTA	DN	2006	01/HUMAS/05	2011	PRAKERIN, BKK	Tek. Mesin
PT. IRG GLOBAL SEARCH (M)	MALAYSIA	LN	2009	E-6/264/a.20/WKS4/VI/09	2014	BKK	Tek. Mesin, TKR
PT. MAK	YOGYAKARTA	DN	2009	E-2//a.20/XII/09	2012		Tek. Mesin
CV. UTILINDO PERKASA	YOGYAKARTA	DN	2009	E-2//a.20/XII/09	2012	PRAKERIN, UKP	Listrik
CV. KUSUMA BAJA INDO KLATEN	KLATEN	DN	2008	E-2/047/WKS4/a.20		PRAKERIN	Tek. Mesin
PT. JARI ALAM SAPUTRA	YOGYAKARTA	DN	2008	E-6/264/a.20/III/08		PRAKERIN	Tek. Mesin
BINA ANTAR BUDAYA	JAKARTA	DN	2008	E-6/315/a.20/WKS4/IX/09	2013	PERTUKARAN BUDAYA	Umum

PEMBELAJARAN

Penerapan Pembelajaran berbasis TIK/e-pembelajaran bagi siswa SMK (proses belajar dan materi pelajaran disampaikan dengan menggunakan perangkat TIK)

- ✓ Sudah dilakukan menggunakan : modul interaktif, power point, LCD, jaringan LAN, akses internet, penugasan on-line, ujian on-line, *learning management system (moodle)*, untuk sebanyak pada 12 mata pelajaran

Penerapan Pembelajaran Kewirausahaan bagi siswa SMK

- ✓ Sudah dilakukan dengan menerapkan : teaching industri, unit produksi, modal bergulir, grosir, retail, door to door

Penerapan pembelajaran membangun karakter bangsa

- ✓ Sudah dilakukan yaitu dengan menyelenggarakan ekstra/kokurikuler : antara lain osis, pramuka, paskibra, PMR, pecinta alam, olah raga

Yogyakarta, 24 Agustus 2010
Kepala Sekolah

Drs. Sutrisno, M.M.
NIP. 19660207 1991103 1 010

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (K T S P)

SMK MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA

PROGRAM KEAHLIAN
TEKNIK PEMESINAN

2006/2007



MUHAMMADIYAH MADTS PENGURUSAN DASAR DAN MENENGAH
SELATAN MENEGGAH KEMURAH
SMK MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA
STATUS TELAKHIDAH A
JI. PRADJALA No. 67 GUNWANG, TELUKAN (SUW) 55778 YOGYAKARTA
E-mail : smk3mu@smk3mu.yogya.sch.id

LEMBAR PENETAPAN

Sekolah menetapkan perimbangan Komite Sekolah maka dengan ini Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta untuk Program Keahlian Teknik Pemesinan ditetapkan untuk diberlakukan mulai tahun pelajaran 2006/2007



Mengetahui
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Pemerintah Daerah Yogyakarta



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya kepada kita semua. SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta sebagai kami dapat menyelenggarakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan selamat dan lancar. Semoga KTSP ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Harapan kami semoga nantinya SMK Muhammadiyah Yogyakarta dapat meningkatkan mutu pendidikan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ini kami susun melalui rapat kerja tahunan yang diikuti oleh Kepala Sekolah, para wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, para guru mata pelajaran normatif, adaptif, dan produktif dan Pengurus Komite Sekolah dengan berlandaskan pada

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);

Standar Kompetensi Kerja (SKKNI-SKK);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan SI dan SKL;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan SI dan SKL.

Dengan adanya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta telah memiliki standar isi baik untuk evaluasi yang bersifat mikro seperti kualitas proses dan kualitas produk pembelajaran, maupun evaluasi yang bersifat makro seperti efektivitas dan efisiensi program pendidikan di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta.

Alhamdulillah Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ini.

Semoga Allah senantiasa memberikan Rahmat, Barokah, dan Pertunjuknya kepada kita untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta.



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENETAPAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
I. Tujuan Pendidikan Menengah Kejuruan	1
II. Visi dan Misi SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta	1
III. Tujuan SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta	2
IV. Tujuan Program Keahlian Teknik Pemeliharaan	3
V. Standar Kompetensi	3
A. Standar Kompetensi) Lulusan Saran Pendidikan (SKL-SP)	3
B. Standar Kompetensi Kejuruan Mata Pelajaran (SK-KMP)	3
C. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Lulusan Mata Pelajaran	10
D. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Normatif Adagoga	11
E. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Kejuruan Teknik Pemeliharaan	17
F. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Materi Lokal	45
G. Pengembangan Diri	50
VI. Diagram Penugasan Kompetensi	100
VII. Standar Kurikulum Program Keahlian Pemeliharaan	101
VIII. Kalender Pendidikan	105
IX. Standar	106

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

(KTSP)

SMK MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA

PROGRAM KEAHLIAN : TEKNIK PEMESINAN

I. Tujuan Pendidikan Menengah Kejuruan

Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan ketrampilan, pengetahuan, pengalaman, sikap, nilai, serta kemandirian untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

II. Visi dan Misi SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta

A. VISI

Mewujudkan lulusan yang kokoh di dunia, unggul dalam moral, Unggul Pribadi dan mampu bersaing di Era Globalisasi

B. MISI

1. Meningkatkan kualitas Kemandirian
2. Mengembangkan wawasan kemandirian
3. Mengembangkan bakat siswa agar uket dan pijoib dalam berkebangsaan
4. Meningkatkan kompetensi berstandar nasional / internasional

III. Tujuan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta

1. Meningkatkan kualitas kehidupan
2. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan budaya profesional
3. Meningkatkan kualitas Manajemen Sekolah
4. Melaksanakan KEM yang berkeadilan baik di sekolah maupun masyarakat di DIY/DA
5. Meningkatkan sarana pendidikan sesuai dengan kurikulum IPT/IK
6. Menempatkan siswa kerja yang kreatif sebagai pelaksanaan TK
7. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan institusi dan instansi terkait.
8. Mengembangkan unit produksi yang dikelola secara profesional

IV. Tujuan Program Keahlian Teknik Permesian

Tujuan Program Keahlian Teknik Permesian secara umum mengacu pada isi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) pasal 3 mengenai Tujuan Pendidikan Nasional dan penjelasan pasal 13 yang menyebutkan bahwa pendidikan bertujuan mempersiapkan tenaga manusia yang produktif dan berkualitas dalam bidang industri.

Siswa khusus sebagai Program Keahlian Teknik Perminyakan adalah memiliki memiliki di peserta didik dengan kemampuan, pengetahuan dan sikap agar kompeten

- a. Mendidik peserta didik dengan keahlian dan keterampilan dalam program keahlian Teknik Perminyakan agar dapat bekerja dengan baik setelah selesai masa belajar pendidikan yang ada di dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah.
- b. Mendidik peserta didik agar mampu memiliki karier, bertanggung jawab dan mengembangkan sikap profesional dalam program keahlian Perminyakan
- c. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal bagi yang berminat untuk melanjutkan pendidikan.

V. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SATUAN PENDIDIKAN (SKL-SP)

1. Berpartisipasi sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja
2. Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya
3. Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan, dan pekerjaannya
4. Berpartisipasi dalam kegiatan aksi nyata sesuai dengan kondisi sosial, budaya, nilai, dan pola pikir masyarakat di lingkungan sekolah
5. Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global
6. Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif
7. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan
8. Memanfaatkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pembelajaran dan

SILABUS

DASAR KOMPETENSI KEJURUAN (DKK)



KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK (TITL)

SMK MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA

Th 2000

SILABUS

DAFTAR KEGIATAN BELAJAR DAN KEGIATAN BELAJAR
MATERI: KEGIATAN BELAJAR DAN KEGIATAN BELAJAR
KETERANGAN: KEGIATAN BELAJAR DAN KEGIATAN BELAJAR
KETERANGAN: KEGIATAN BELAJAR DAN KEGIATAN BELAJAR
KETERANGAN: KEGIATAN BELAJAR DAN KEGIATAN BELAJAR

DAFTAR KEGIATAN BELAJAR DAN KEGIATAN BELAJAR
MATERI: KEGIATAN BELAJAR DAN KEGIATAN BELAJAR
KETERANGAN: KEGIATAN BELAJAR DAN KEGIATAN BELAJAR
KETERANGAN: KEGIATAN BELAJAR DAN KEGIATAN BELAJAR
KETERANGAN: KEGIATAN BELAJAR DAN KEGIATAN BELAJAR

KETERANGAN	MATERI	MATERI	MATERI	WAKTU			KETERANGAN
				Waktu	Waktu	Waktu	
KETERANGAN	MATERI	MATERI	MATERI	Waktu	Waktu	Waktu	KETERANGAN
KETERANGAN	MATERI	MATERI	MATERI	Waktu	Waktu	Waktu	KETERANGAN
KETERANGAN	MATERI	MATERI	MATERI	Waktu	Waktu	Waktu	KETERANGAN

RENCANA PROGRAM PEMBELAJARAN (RPP)
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

Nama Sekolah	SMK MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA
Mata Pelajaran	Rangkaian Listrik
Kelas / Semester	XI / Dasar
Perkemahan	01
Alokasi Waktu	6 x 45 menit
Kode Standar Kompetensi	IPK 011
Standar Kompetensi	Menganalisis rangkaian listrik
Kompetensi Dasar	Mendeskripsikan konsep rangkaian listrik

Indikator

1. Dipahami struktur atom, bagian-bagian dan atom dan molekul
2. Elektron bebas dijelaskan sesuai dengan konsep kelentaran

2. Tujuan Pembelajaran

1. Dapat Memahami struktur atom dan muatannya
2. Dapat memahami proses terjadinya hole dan elektron bebas
3. Dapat memahami proses terjadinya arus listrik

3. Materi Ajar

1. Struktur atom, hole dan elektron bebas
2. Proses terjadinya arus listrik

4. Metode Pembelajaran

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Praktek

5. Langkah-Langkah Pembelajaran

a. Kegiatan Awal (30')

1. Berdoa dan tatarusi
2. Peserta didik menyimak tujuan pembelajaran
3. Apresiasi dilakukan untuk menggali pengalaman peserta didik tentang struktur atom
4. Apresiasi dilakukan untuk menggali pengalaman peserta didik tentang terjadinya aliran arus listrik
5. Strategi pembelajaran dijelaskan selanjutnya proses belajarnya

b. Kegiatan Inti (210')

1. Menguraikan struktur atom dan arah aliran elektron
2. Menguraikan proses terjadinya aliran arus listrik pada rangkaian tertutup
3. Menguraikan prosedur keselamatan kerja penggunaan alat ukur
4. Praktek rangkaian listrik
 - a. Menggunakan amperemeter untuk mengukur arus (Praktek)
 - b. Menggunakan voltmeter untuk mengukur tegangan (Praktek)

c. Kegiatan Akhir (30')

1. Melakukan evaluasi pembelajaran
2. Peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran
3. Guru menegaskan kesimpulan dari pembelajaran

V. Alat, Bahan dan sumber tenaga

1. Alat
 - 1.1. Jangkaukur
 - 1.2. Multimeter
2. Bahan
 - 2.1. Resistor
 - 2.2. Kabel
3. Sumber tenaga
 - 3.1. Penerapan Konsep Dasar Sistem dan Elektronika
 - 3.2. Jaringan Pengkabelan Data

VI. Penilaian

A. Metode

1. Tes Tertulis
2. Praktek

B. Soal Test

1. Tes tertulis
 1. Jelaskan proses terjadinya arus listrik
 2. Sebutkan syarat terjadinya arus listrik
 3. Apakah beda dari arus listrik dengan elektron?

Kunci Jawaban

1. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah
2. Terjadi dalam rangkaian tertutup (sumber, beban dan saklar)
3. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi

Kriteria Penilaian

Nilai Kompetensi Dasar (KD) = 30% Soal Test = 70% Nilai Praktek

Kriteria Penilaian Tertulis

No Soal	Skor maksimal	Bobot	Nilai
1	5	3	
2	10	3	
3	10	4	
Jumlah Score	100		

• Job Praktek (contoh pada Jawaban)

Yogyakarta, Juli 2023

Guru Mata Pelajaran



Harmoni, S.Pd

Nilai Score

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) LESSON PLAN

Bahan Pendidikan	Ilmu Muhammadiyah 3 Yogyakarta
Sekolah Negeri	Ilmu Muhammadiyah 3 Yogyakarta
Program Keahlian	Teknik Instalasi Tenaga Listrik
Sub Program	Power Electricity Installation Engineering
Mata Pelajaran	Rangkaian Listrik
Subjek	Technical Circuit
Kelas/Semester	XI Dasar
Class / Semester	XI Dasar
Pertemuan ke	12
Meeting	12
Alokasi Waktu	6 x 45 menit
Time Allocation	6 x 45 minutes
Standar Kompetensi	Menganalisis rangkaian listrik
Standards Competence	Analyze electrical circuit
Kode Kompetensi	211
Code Competence	211
Kompetensi Dasar	Pengisian pengosongan kapasitor
Basic Competence	Charge the capacitor discharge
Indikator / Indicators	Siswa dapat memahami tentang pengisian kapasitor Students can understand about charge the capacitor Siswa dapat memahami tentang pengosongan kapasitor Students can understand about the discharge capacitor

A. TUJUAN PEMBELAJARAN / LEARNING OBJECTIVES

Setelah pembelajaran diharapkan

After learning is expected to

1. Siswa dapat memahami tentang rangkaian paralel kapasitor dengan benar
Students can understand about the capacitor parallel circuit correctly
2. Siswa menghitung nilai C total dalam rangkaian paralel dengan benar
Students calculate the value of total C in capacitor parallel circuit correctly

B. MATERI AJAR / LEARNING MATERIAL

1. Konsep pengisian pengosongan kapasitor / The concept of charging a capacitor discharge
2. Waktu pengisian pengosongan kapasitor / The time of charging a capacitor discharge
3. Rangkaian pengisian pengosongan kapasitor / The circuit of charging a capacitor discharge

C. METODE PEMBELAJARAN / LEARNING METHOD

1. Ceramah / Lecture
2. Tanya jawab / questioning
3. Demonstrasi / Demonstration
4. Praktek / Practice

D. LAMBIKAN LANGKAH PENBELAJARAN / LEARNING ACTIVITY

No. No	Kegiatan / Activity	Waktu / Time
1	Pendahuluan / Beginning	
	Mengamati gambar / Observing image	10
	Mengamati gambar / Observing the scope of material	10
	Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait / Give questions related	10
	Membaca / membaca about charging a capacitor / charging a capacitor / Membaca / membaca about application charge the capacitor discharge	10
2	Kegiatan inti / Main activities	
	Mengajukan konsep pengisian pengosongan kapasitor / Explain the concept of charge the capacitor discharge	20
	Mengajukan waktu pengisian pengosongan kapasitor / Explain the time of charging a capacitor discharge	20
	Mengajukan rangkaian pengisian pengosongan kapasitor / Explain The circuit of charging a capacitor discharge	20
	Guru memberikan contoh soal cara menghitung waktu untuk pengisian pengosongan kapasitor / Teacher give the sample questions about how to calculate the time of charging a capacitor discharge	10
	Siswa diberi soal latihan / Students were given the questions	20
	Siswa dibagi dalam kelompok praktik / Students are divided into practical groups	5
	Guru mendemonstrasikan / Teachers demonstrate	20
	Siswa praktik / Students practice	220
3	Kegiatan penutup / Closing	
	Mengumpulkan materi / Conclude the material	10
	Evaluasi / Evaluation	10

E. SUMBER BELAJAR / LEARNING SOURCE

1. Buku pegangan mata diklat rangkaian listrik
2. Modul Job Sheet / Job Sheet's module

F. PENILAIAN / ASSESSMENT

1. Sikap / Attitude
2. Keterampilan / Ability
3. Hasil praktik / Results practices
4. Evaluasi / Evaluation

Teknik / Technique

Bentuk instrumen / Form of instrument

Suatunstrumen / Questionnaire/instrument

tes tulis / written test

uraian / description

tertutup / enclosing document

Yogyakarta,
Guru mata diklat Rli
Teacher

Hermanto, S.Pd.T
NPM 004200

2. Sumber Belajar :

- Modul
- Buku paket
- Internet (BIA)

3. Penilaian :

Penilaian dilakukan

NO	ASPEK YANG DINILAI	INDIKATOR KETERHASILAN	PENILAIAN			
			YA	YA	YA	TIDAK
1						
2						
3						
4						

Rumus

- N_{KOMP} = 0,7 nilai kompetensi praktik + 0,3 nilai kompetensi teori
 $N_{\text{KOMP PRAKTIK}}$ = 0,4 nilai laporan + 0,6 nilai uji kompetensi
 $N_{\text{KOMP TEORI}}$ = nilai evaluasi antara teori dan kompetensi

Keterangan :

- N_{KOMP} = nilai akhir penggabungan kompetensi (nilai teori + praktik)
 $N_{\text{KOMP PRAKTIK}}$ = nilai yang diperoleh dalam praktik
 $N_{\text{KOMP TEORI}}$ = nilai yang diperoleh dalam KIR dan kompetensi praktik

Mengajar
2015/2

Tanggal, 10/10/2015
Guru Mata Pelajaran

Narasumber, 1/10/2015

Dik. 10/10/2015

SINAY KEPUTUSAN

Forum Pengantar Kajian Sastra Remaja: *Optimizing Indonesian Literature Education*
Tahun 2007 – 2010

Magis Pendidikan: Jurnal dan Riset tentang Pendidikan Islam Muhammadiyah 2016, Yogyakarta

1. Wenn eine Intervall-Lösung λ existiert, dann gilt: $\lambda \in \text{Int}(\lambda)$.
Daher ist λ eine Intervall-Lösung.
2. Wenn eine Intervall-Lösung λ existiert, dann gilt: $\lambda \in \text{Int}(\lambda)$.
Daher ist λ eine Intervall-Lösung.

1. Die ...
2. Die ...
3. Die ...

Mengetahui : 1. Ketua Kepala SMK Muhammadiyah 2 Tegal
2. Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Tegal
3. Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Tegal
4. Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Tegal
5. Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Tegal
6. Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Tegal
7. Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Tegal
8. Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Tegal
9. Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Tegal
10. Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Tegal

DISCUSSION

Pertama	Susunan nama dan jabatan pengurus Komite Dekan SMK Muhammadiyah 1 Tegalrejo sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Kedua	Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk masa kerja pertama 2017 - 2019.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai surat
Penerangan dan apabila disetujui dari temenggah di bawah terdapat tindakan dalam keputusan
ini akan dilaksanakan dan dipaparkan sebagaimana mestinya.

1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Dr. Wm. Herbert Lamb
1907-1912



Nama : ...
 No. : ...
 Kelas : ...

**DAFTAR PENGHUNUS KOMITE BERSILAH
DARI MUHAMMADIYAH 8 YOGYAKARTA
PERIODE 2022 - 2023**

NOMOR	NAMA	JABATAN	KEPERAWATAN
1	Dr. H. M. M. M. M.	Presiden	Ujung Lingsar, PUS 1000
2	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
3	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
4	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
5	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
6	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
7	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
8	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
9	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
10	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
11	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
12	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
13	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
14	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
15	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
16	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
17	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
18	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
19	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
20	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
21	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
22	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
23	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
24	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
25	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
26	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
27	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
28	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
29	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
30	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
31	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
32	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
33	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
34	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
35	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
36	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
37	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
38	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
39	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
40	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
41	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
42	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
43	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
44	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
45	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
46	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
47	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
48	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
49	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar
50	Dr. H. M. M. M.	Wakil Presiden	Ujung Lingsar

18 Desember 2022 di
Pusat Kegiatan
28 November 2022 di

Ketua
Dr. H. M. M. M. M.
No. 487.003

Sekretaris
Dr. H. M. M. M. M.
No. 487.003

**DAFTAR ANGGOTA TIDAK TETAP
PERGURUAN KOMITE KEMULIAH
ISLAM MUHAMMADIYAH 1 YOGYAKARTA
PERIODE 1997 - 1998**

NOMOR	NAMA	KEANGGUTAN	REVISI/REVISI
1	Wahyuni	Anggota Tidak Tetap	1997/1998
2	Kusuma	Anggota Tidak Tetap	1997/1998
3	Rizki, S. Ag	Anggota Tidak Tetap	1997/1998
4	Sugiharto	Anggota Tidak Tetap	1997/1998
5	Rizkiyati	Anggota Tidak Tetap	1997/1998
6	Dr. H. H. H. H. H.	Anggota Tidak Tetap	1997/1998
7	Dr. H. H. H. H. H.	Anggota Tidak Tetap	1997/1998
8	Dr. H. H. H. H. H.	Anggota Tidak Tetap	1997/1998
9	Dr. H. H. H. H. H.	Anggota Tidak Tetap	1997/1998
10	Dr. H. H. H. H. H.	Anggota Tidak Tetap	1997/1998
11	Dr. H. H. H. H. H.	Anggota Tidak Tetap	1997/1998
12	Dr. H. H. H. H. H.	Anggota Tidak Tetap	1997/1998
13	Dr. H. H. H. H. H.	Anggota Tidak Tetap	1997/1998
14	Dr. H. H. H. H. H.	Anggota Tidak Tetap	1997/1998
15	Dr. H. H. H. H. H.	Anggota Tidak Tetap	1997/1998
16	Dr. H. H. H. H. H.	Anggota Tidak Tetap	1997/1998
17	Dr. H. H. H. H. H.	Anggota Tidak Tetap	1997/1998
18	Dr. H. H. H. H. H.	Anggota Tidak Tetap	1997/1998
19	Dr. H. H. H. H. H.	Anggota Tidak Tetap	1997/1998
20	Dr. H. H. H. H. H.	Anggota Tidak Tetap	1997/1998
21	Dr. H. H. H. H. H.	Anggota Tidak Tetap	1997/1998
22	Dr. H. H. H. H. H.	Anggota Tidak Tetap	1997/1998
23	Dr. H. H. H. H. H.	Anggota Tidak Tetap	1997/1998
24	Dr. H. H. H. H. H.	Anggota Tidak Tetap	1997/1998
25	Dr. H. H. H. H. H.	Anggota Tidak Tetap	1997/1998
26	Dr. H. H. H. H. H.	Anggota Tidak Tetap	1997/1998
27	Dr. H. H. H. H. H.	Anggota Tidak Tetap	1997/1998
28	Dr. H. H. H. H. H.	Anggota Tidak Tetap	1997/1998
29	Dr. H. H. H. H. H.	Anggota Tidak Tetap	1997/1998
30	Dr. H. H. H. H. H.	Anggota Tidak Tetap	1997/1998
31	Dr. H. H. H. H. H.	Anggota Tidak Tetap	1997/1998
32	Dr. H. H. H. H. H.	Anggota Tidak Tetap	1997/1998

18 Desember 1997
28 November 1997

Ketua,

Dr. H. H. H. H. H.
NPM. 497.903



Sekretaris,

Dr. H. H. H. H. H.
NPM. 531.532

RAPBS

SMK MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

SMK MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA

Alamat: Jl. Pramuka 62 Grogol Telp/Fax (0274) 372778 Yogyakarta 55163

E-mail: info@smkmu3-yog.sch.id

Homepage: <http://www.smkmu3-yog.sch.id>

[illegible]

NERACA **TAHUN 2009-2010**

O	JENIS KEGIATAN	JUMLAH	TOTAL	KETERANGAN
	PENDAPATAN			
	Sisa Tahun Lalu			
	Uang Hibahan	20.000.000		
	Uang Persewaan	8.748.125.000		
	Hasil Aneka Usaha	20.000.000		
	Penerimaan Bantuan			
	SD	800.000.000		
	Penghasilan Mula			
	Rehabilitasi Gedung			
	SPM	180.000.000		
			8.878.125.000	
	PENGELUARAN			
	1. Pengeluaran	1.824.816.670		
	2. Biaya Kantor	278.000.000		
	3. Biaya Persewaan	300.400.000		
	4. Kegiatan Sosial dan Organisasi	2.871.875.000		
	5. Biaya dan Inventaris	1.097.740.000		
	6. Bantuan ke Masyarakat dan Sekeloa	27.800.000		
	7. Bantuan			
	SD	800.000.000		
	Penghasilan Mula			
	Rehabilitasi Gedung			
	SPM	180.000.000		
	Lab/Len			
	Prondal	60.000.000		
	D = Biaya Inggat	100.000.000		
			8.827.876.670	88.148.000